



Profil

KABUPATEN PASURUAN

MEUJU KABUPATEN LAYAK ANAK

2025



PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan "Profil Kabupaten Pasuruan Menuju Kabupaten Layak Anak Tahun 2025" telah dapat dirampungkan.

Dokumen ini merupakan instrumen strategis yang disusun sebagai bagian integral dari proses Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA). Penyusunannya tidak semata-mata sebagai pemenuhan administratif, melainkan sebagai sebuah rujukan esensial dan basis data komprehensif bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Penyelesaian profil ini adalah buah dari sinergi dan kolaborasi konstruktif dari berbagai pemangku kepentingan. Untuk itu, apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh jajaran Gugus Tugas KLA Kabupaten Pasuruan, Pimpinan dan Anggota Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta media massa yang telah berkontribusi secara aktif, baik dalam bentuk data, gagasan, maupun sumber daya.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan berkelanjutan seiring dengan dinamika data dan tantangan di lapangan. Kendati demikian, kami memiliki harapan besar bahwa profil ini dapat berfungsi sebagai acuan analitis yang valid dan kredibel. Semoga profil ini dapat memantik terobosan inovasi lebih lanjut dan memperkuat fondasi kebijakan demi percepatan terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang seutuhnya layak, aman, dan nyaman bagi tumbuh kembang optimal seluruh anak sebagai generasi penerus bangsa.

Pasuruan, 31 Januari 2025

KETUA GUGUS TUGAS KLA

Sekretaris Daerah,

YUDHA TRI WIDYA SASONGKO, S.Sos., M.Si.



DAFTAR ISI

PENGANTAR..... I

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABELIV

DAFTAR GAMBAR.....V

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1.Latar Belakang dan Urgensi Program 1

1.2.Dasar Hukum 2

1.3.Tujuan dan Sasaran 2

1.4.Sistematika Penulisan 3

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH..... 4

2.1.Posisi dan Peran Strategis Daerah 4

2.2.Potensi Sumber Daya Daerah..... 6

 A.Topografi..... 6

 B.Geologi dan Jenis Tanah 10

 C.Klimatologi..... 14

 D.Penggunaan Lahan 15

2.3.Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup..... 17

 A.Daya Dukung Air 17

 B.Daya Dukung Pangan 18

2.4.Ketahanan Energi 19

2.5.Lingkungan Hidup Berkualitas..... 21

2.6.Demografi..... 24

 A.Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk..... 24

 B.Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur 26

 C.Persebaran Penduduk & Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan..... 28

 D.Komposisi Penduduk berdasarkan Ketenagakerjaan..... 32

 E.Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan 34

 F.Komposisi Penduduk berdasarkan Agama dan Kepercayaan yang Dianut .. 36

G.Proyeksi Demografi.....	38
2.8.Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	42
A.Laju Pertumbuhan Ekonomi	42
B.Indeks/Rasio Gini	44
C.Angka Kemiskinan.....	46
D.Tingkat Pengangguran Terbuka	49
E.PDRB Perkapita	50
F.Indeks Pembangunan Manusia.....	51
BAB III KABUPATEN LAYAK ANAK.....	55
3.1.Kelembagaan	55
3.2.Klaster 1: Hak Sipil dan Kebebasan	60
3.3.Klaster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	64
3.4.Klaster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	71
3.5.Klaster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	77
3.6.Klaster 5: Perlindungan Khusus	82
3.7.Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak	87
3.8.Penghargaan dan Inovasi	88
BAB IV PENUTUP	91
4.1.Kesimpulan	91
4.2.Tantangan dan Arah Kebijakan Strategis	92

DAFTAR TABEL

2.1	Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan Luas Wilayahnya.....	4
2.2	Kondisi Ketinggian Topografi Berdasarkan Klasifikasinya.....	8
2.3	Jenis Batuan di Wilayah Kabupaten Pasuruan	11
2.4	Iklim Kabupaten Pasuruan	15
2.5	Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan	16
2.6	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Tahun 2024	26
2.7	Persebaran Penduduk Tahun 2020-2024.....	28
2.8	Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2021-2024.....	30
2.9	Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2021-2024.....	32
2.10	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	33
2.11	Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan	34
2.12	Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan	35
2.13	Persentase Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan	36
2.14	Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	37
2.15	Presentase Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	37
2.16	Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2025-2030.....	39
2.17	Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2030 ..	41
2.18	Perkembangan Kemiskinan Tahun 2020-2024	48
2.19	Perkembangan IPM dan Komponen IPM Tahun 2017-2021 (SP2010).....	52
2.20	Perkembangan IPM dan Komponen IPM Tahun 2022-2024 (SP2020).....	53
3.1	Lembaga Konsultasi Berbasis Masyarakat	64

DAFTAR GAMBAR

2.1	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pasuruan	6
2.2	Kondisi Topografi Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Ketinggian	8
2.3	Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan	16
2.4	Daya Dukung Air Tahun 2024 dan Tahun 2029	18
2.5	Grafik Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Tahun 2029	19
2.6	Jumlah Konsumsi Listrik Perkapita di Kab. Pasuruan Tahun 2020-2024 ...	21
2.7	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk	25
2.8	Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2024	27
2.9	Ekonomi Kab. Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	44
2.10	Indeks Gini Kab. Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024..	46
2.11	Kemiskinan Kab. Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 .	48
2.12	TPT Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..	50
2.13	IPM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 ...	54
3.1	Buku RAD KLA	57
3.2	Buku Profil KLA.....	57
3.3	Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA	58
3.4	Penandatanganan Kerjasama Pemerintah (MoU)	59
3.5	Inovasi Layanan e-PAKLADI.....	60
3.6	Ragam Kegiatan Informasi Layak Anak	61
3.7	Partisipasi Anak dalam Musrenbang	63
3.8	Anak sebagai Agen Perubahan.....	63
3.9	Pelayanan Konseling Puspaga	65
3.10	Penguatan Kapasitas Bina Keluarga Balita (BKB).....	65
3.11	Penguatan Kapasitas Bina Keluarga Remaja (BKR)	66
3.12	Bukti Akreditasi LKSA	67
3.13	Bimtek Pengembangan PAUD-HI	68
3.14	Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	69
3.15	Angkutan Sekolah Gratis	70
3.16	Ruang Laktasi di Fasilitas Publik	70



3.17 Tren Penurunan Prevalensi Stunting 73

3.18 Dasar Hukum Puskesmas Ramah Anak 74

3.19 Inovasi “SELAMBU PERIAS” 75

3.20 Inovasi "BABY SERTIF" 75

3.21 Inovasi Promosi Kesehatan Lainnya 76

3.22 Dasar Hukum Kawasan Tanpa Rokok..... 77

3.23 Inovasi "GETARVOS" untuk Pendidikan Kesetaraan 78

3.24 Program Pendukung Aksesibilitas Pendidikan 79

3.25 Sebaran Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) 79

3.26 Kebijakan Anti-Kekerasan di Sekolah 80

3.27 Pusat Kreativitas Anak (PKA)..... 81

3.28 Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) 82

3.29 Tren Kasus Kekerasan pada Anak..... 83

3.30 Mekanisme Penanganan Kasus 84

3.31 Mekanisme Penanganan AMPK di RSUD Bangil..... 85

3.32 Layanan Asesmen dan Pendampingan Korban 85

3.33 Layanan Penjangkauan dan Perlindungan 86

3.34 Layanan Koordinasi dan Fasilitasi Sistemik 86

3.35 Aktivitas Forum Anak di Tingkat Kecamatan 87

3.36 Inisiatif Lokal dan Kreativitas Anak..... 87

3.37 Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Peringkat Nindya 88

3.38 Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri..... 89

3.39 Penghargaan Capaian Program KB Terbaik 89

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Urgensi Program

Anak merupakan aset fundamental dan pilar utama keberlanjutan peradaban suatu bangsa. Sebagai generasi penerus, kualitas hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan anak tidak hanya merefleksikan martabat kemanusiaan, tetapi juga menjadi investasi strategis yang menentukan daya saing dan arah masa depan bangsa. Paradigma pembangunan modern telah bergeser dari sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan manusia yang holistik. Dalam kerangka ini, pemenuhan hak-hak anak menjadi indikator sentral keberhasilan pembangunan, di mana negara memegang kewajiban esensial untuk menjamin setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta memperoleh perlindungan mutlak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Komitmen global terhadap hak-hak anak termaktub dalam Convention on the Rights of the Child, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Komitmen ini kemudian diinternalisasikan secara kuat ke dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi landasan yuridis utama dalam upaya mewujudkan generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakarakter, dan sejahtera. Sebagai manifestasi dari komitmen tersebut di tingkat implementasi, pemerintah menginisiasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), sebuah sistem pembangunan terintegrasi yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021. KLA dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak anak tidak hanya diakui, tetapi juga secara sistematis diintegrasikan ke dalam setiap aspek kebijakan, program, dan penganggaran pembangunan di tingkat daerah.

Di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menunjukkan komitmen yang tegas dan terstruktur dalam mengimplementasikan visi ini. Komitmen tersebut dilembagakan melalui kerangka regulasi yang solid, mencakup Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diperkuat lebih lanjut oleh Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak. Berlandaskan kerangka tersebut, Profil Kabupaten Layak Anak ini disusun sebagai sebuah dokumen analitis yang komprehensif. Dokumen ini menyajikan data dan informasi mendalam mengenai kondisi aktual pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Pasuruan, berfungsi sebagai landasan strategis yang akurat untuk perumusan kebijakan, implementasi program, serta

evaluasi pembangunan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, guna mengakselerasi pencapaian target KLA pada tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan dan implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pasuruan didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum yang kuat. Dasar hukum ini mencakup peraturan di tingkat daerah yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan anak serta kebijakan pendukung lainnya. Adapun dasar hukum yang menjadi acuan utama antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perpustakaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kabupaten Layak Anak.
6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Penyusunan profil ini diarahkan untuk mencapai serangkaian tujuan strategis yang terukur:

1. Menjadi rujukan analitis utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam merumuskan, menyempurnakan, dan mengimplementasikan kebijakan serta program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup anak.
2. Berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan pemahaman yang mendalam bagi seluruh pemangku kepentingan mengenai situasi anak, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai basis data empiris dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak.

3. Menjadi alat monitoring dan evaluasi yang objektif dan sistematis terhadap implementasi serta capaian Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pasuruan periode 2022-2026.

Adapun sasaran dari penyusunan profil ini mencakup spektrum pemangku kepentingan yang luas:

1. Pemerintah Daerah: Sebagai panduan dalam perencanaan strategis, alokasi anggaran yang efektif, dan pelaksanaan program lintas sektor yang mendukung terwujudnya KLA.
2. Lembaga dan Organisasi Masyarakat: Sebagai referensi untuk menyinergikan program, memperkuat kolaborasi, dan membangun kemitraan yang produktif dalam pemenuhan hak-hak anak.
3. Masyarakat Umum: Sebagai media informasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Pembuat Kebijakan dan Legislatif: Sebagai dasar empiris yang kuat dalam merancang dan mengadvokasi regulasi yang progresif dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Profil Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 terdiri dari:

- BAB I menguraikan konteks fundamental, landasan pemikiran, tujuan, sasaran, serta kerangka metodologis penulisan dokumen.
- BAB II menyajikan profil geografis, administratif, dan demografis wilayah sebagai konteks makro yang melandasi seluruh analisis.
- BAB III merupakan inti pembahasan yang mengkaji secara mendalam implementasi KLA melalui pilar Kelembagaan dan lima klaster hak anak yang saling terkait, yaitu: (1) Hak Sipil dan Kebebasan; (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; serta (5) Perlindungan Khusus. Bab ini juga mengelaborasi peran strategis Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai ujung tombak implementasi di tingkat akar rumput.
- BAB IV merangkum kesimpulan dari keseluruhan analisis yang telah dilakukan serta merumuskan serangkaian rekomendasi kebijakan strategis yang dapat ditindaklanjuti.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis, Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 7°32'42.14" - 7°57'24.32" Lintang Selatan dan 112°34'29.31"-113° 6'0.29" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan sebesar 1.474,02 km2 dengan batas administrasi Kabupaten Pasuruan meliputi:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan Selat Madura
- Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu

Secara administratif, struktur kewilayahan di Kabupaten Pasuruan terorganisasi ke dalam pembagian unit pemerintahan yang jelas dan terperinci. Wilayah ini terbagi menjadi 24 kecamatan sebagai satuan administratif utama. Selanjutnya, di lingkup yang lebih spesifik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terdapat 24 kelurahan serta 341 desa yang tersebar di seluruh kecamatan tersebut. Rincian lengkap mengenai pembagian wilayah administratif ini disajikan secara mendetail pada Tabel berikut:

Tabel 2.1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan Luas Wilayahnya

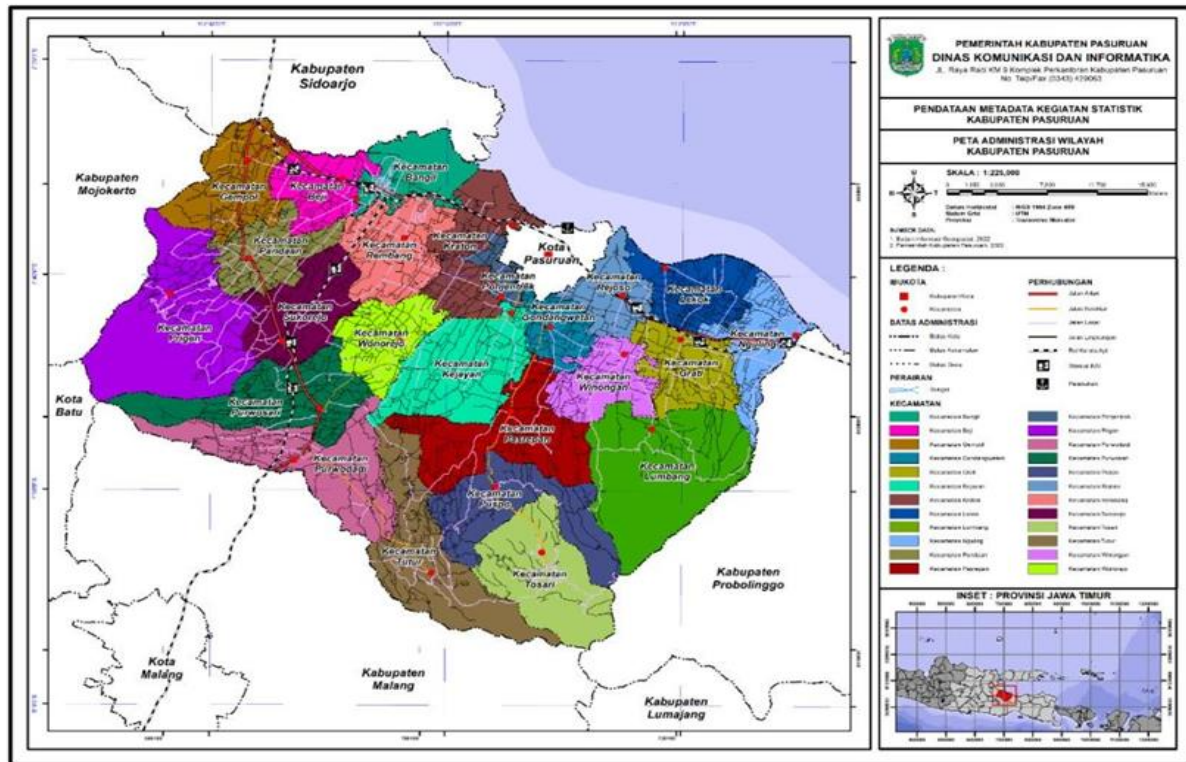
No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km2)	Presentase (%)
		Desa	Kelurahan		
1	Purwodadi	13	-	102,46	6,95
2	Tutur	12	-	86,30	5,85
3	Puspo	7	-	58,35	3,96
4	Lumbang	12	-	125,55	8,52
5	Pasrepan	17	-	89,95	6,10
6	Kejayan	24	1	79,15	5,37
7	Wonorejo	15	-	47,30	3,21
8	Purwosari	14	1	59,87	4,06
9	Sukorejo	19	-	58,18	3,95
10	Prigen	9	-	121,90	8,27
11	Pandaan	14	4	43,27	2,94
12	Gempol	15	-	64,92	4,40
13	Beji	12	2	39,90	2,71
14	Bangil	4	11	44,60	3,03
15	Rembang	17	-	42,52	2,88

No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km2)	Presentase (%)
		Desa	Kelurahan		
16	Kraton	25	-	50,75	3,44
17	Pohjentrek	11	3	11,88	0,81
18	Gondang Wetan	19	1	26,25	1,78
19	Winongan	18	-	45,97	3,12
20	Grati	14	1	50,78	3,45
21	Nguling	15	-	42,60	2,89
22	Lekok	11	-	46,57	3,16
23	Rejoso	16	-	37,00	2,51
24	Tosari	8	-	98,00	6,65
Kabupaten Pasuruan Total:		341	24	1.474,2	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Ditinjau dari perspektif ekonomi, letak geografis wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki posisi yang sangat strategis dan menguntungkan. Hal ini dikarenakan keberadaannya yang berada tepat di simpul segitiga jalur ekonomi vital yang menghubungkan koridor Surabaya - Jember / Banyuwangi / Bali, koridor Surabaya - Malang, serta lintas Malang - Jember / Banyuwangi / Bali. Konektivitas wilayah ini semakin diperkuat dengan adanya lintasan jalur kereta api yang melayani angkutan penumpang maupun barang untuk rute Surabaya - Bangil - Banyuwangi dan Surabaya - Bangil - Malang.

Nilai strategis tersebut kian bertambah dengan adanya dukungan infrastruktur jalan bebas hambatan yang terintegrasi, meliputi ruas Tol Porong - Gempol, Gempol - Pandaan, Pandaan - Malang, Gempol - Pasuruan, hingga Pasuruan - Probolinggo. Pembangunan akses tol ini secara signifikan memangkas waktu tempuh menuju Surabaya, sehingga menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai destinasi investasi yang sangat tepat dan menarik bagi pengembangan sektor industri. Adapun visualisasi mengenai peta wilayah Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan telah disajikan secara rinci pada Gambar berikut:



Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pasuruan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2. Potensi Sumber Daya Daerah

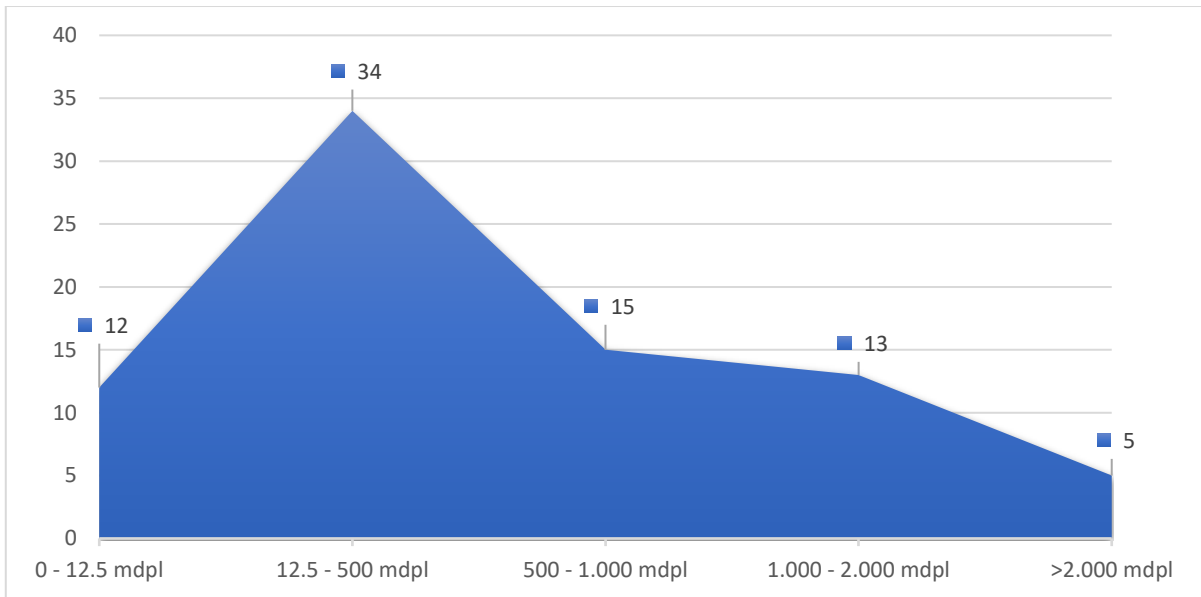
A. Topografi

Secara topografis, bentang alam wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan variasi elevasi yang sangat beragam, terentang mulai dari titik terendah di 0 mdpl hingga mencapai puncak tertinggi di 3.313 meter di atas permukaan laut (mdpl). Data ketinggian ini tercatat secara rinci di setiap wilayah administrasi kecamatan. Karakteristik wilayah ini terbagi secara jelas berdasarkan letak geografisnya; dataran rendah mendominasi kawasan bagian utara, khususnya di sepanjang garis Pesisir Selat Madura, dengan rentang ketinggian antara 0 hingga 290 mdpl. Konsekuensi dari kondisi topografi yang rendah ini menyebabkan kawasan tersebut diidentifikasi memiliki potensi kerawanan terhadap ancaman bencana banjir.

Sebaliknya, kontur dataran tinggi terpusat pada bagian tenggara yang merupakan bagian dari Kawasan Gunung Bromo, serta di bagian barat daya yang meliputi Kawasan Gunung Welirang. Morfologi kawasan pegunungan di Kabupaten Pasuruan ini sebagian besar ditandai dengan kondisi kelerengan yang terjal atau curam, yang secara alamiah membawa implikasi risiko berupa potensi bencana tanah longsor.

Lebih lanjut, berdasarkan analisis tingkat kemiringan lahan atau kelerengan, wilayah Kabupaten Pasuruan dapat diklasifikasikan secara spesifik ke dalam tujuh (7) kategori zona, yaitu sebagai berikut:

1. Zona Kelerengan 0 - 2% (Datar): Wilayah ini meliputi cakupan yang luas, antara lain mencakup seluruh wilayah Kecamatan Bangil, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kraton, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso, dan Kecamatan Lekok. Selain itu, zona ini juga mencakup sebagian wilayah dari Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Winongan, Kecamatan Grati, serta Kecamatan Nguling.
2. Zona Kelerengan 2 - 5% (Landai): Kategori ini tersebar meliputi sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Winongan, Kecamatan Grati, dan Kecamatan Nguling.
3. Zona Kelerengan 5 - 8% (Agak Miring): Kawasan yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Winongan, dan Kecamatan Lekok.
4. Zona Kelerengan 8 - 15% (Miring): Wilayah dengan kemiringan ini mencakup sebagian dari Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Winongan, serta Kecamatan Grati.
5. Zona Kelerengan 15 - 25% (Agak Curam): Daerah yang memiliki tingkat kemiringan ini meliputi sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Gempol, dan Kecamatan Beji.
6. Zona Kelerengan 25 - 45% (Curam): Kawasan dengan topografi curam ini terdapat pada sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Gempol.
7. Zona Kelerengan > 45% (Sangat Curam): Zona dengan kemiringan ekstrem ini meliputi sebagian wilayah di kawasan pegunungan, yaitu Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, serta Kecamatan Prigen.



Gambar 2.2 Kondisi Topografi Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Ketinggian
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan visualisasi data yang disajikan pada Gambar tersebut, kondisi topografi wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan karakteristik yang sangat dinamis dan bervariasi apabila ditinjau dari aspek ketinggian lahan atau elevasi. Keragaman bentang alam ini menjadi dasar fundamental dalam pemetaan karakteristik geografis daerah tersebut. Oleh karena itu, merujuk pada perbedaan elevasi yang ada, wilayah Kabupaten Pasuruan diklasifikasikan secara spesifik ke dalam 5 (lima) kategori atau jenis wilayah. Rincian sistematis mengenai kelima klasifikasi wilayah tersebut dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 2.2 Kondisi Ketinggian Topografi Berdasarkan Klasifikasinya

No	Jenis Wilayah	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Fungsional Wilayah	Persebaran Wilayah
1	Wilayah Pesisir	0 - 12,5	18.819.04	Kawasan pengembang an usaha perikanan dan pertambakan	Pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Bangil, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kraton, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso, Winongan,



No	Jenis Wilayah	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Fungsional Wilayah	Persebaran Wilayah
					Kecamatan Grati, Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling
2	Wilayah Dataran	12,5 - 500	50.384,02	Kawasan pengembangan pertanian, permukiman, perindustrian	Pada sebagian wilayah kecamatan - kecamatan di Kabupaten Pasuruan kecuali Kecamatan Tosari
3	Wilayah Perbukitan	500 - 1.000	21.877,17	Kawasan untuk tanaman keras/tahunan dan sebagai penyangga bagi kawasan perlindungan tanah dan air serta untuk lahan pertanian tanaman pangan dengan sistem teras siring	Sebagian kawasan Kecamatan Lumbang, Kecamatan Gempol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tukur, Kecamatan Tosari, Pasrepan, Kecamatan Puspo, Kecamatan Purwosari, dan Kecamatan Prigen
4	Wilayah Pegunungan	1.000 - 2.000	18.615,08	Kawasan penyangga untuk perlindungan tanah dan air	Sebagian kawasan Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tukur, Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Puspo, Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Prigen
5	Kawasan Pegunungan Tinggi	>2.000	7.920,77	Kawasan hutan lindung yang berfungsi untuk melindungi kawasan bawahannya	Sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tukur, Kecamatan Tosari, Kecamatan

No	Jenis Wilayah	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Fungsional Wilayah	Persebaran Wilayah
					Lumbang, Kecamatan Puspo, Purwosari, dan Kecamatan Prigen

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

B. Geologi dan Jenis Tanah

Secara geologis, karakteristik litologi wilayah bagian selatan Kabupaten Pasuruan merupakan bagian integral dari bentang alam Pegunungan Malang Selatan yang secara dominan tersusun oleh struktur batuan vulkanik. Pembentukan formasi batuan ini merupakan hasil dari aktivitas vulkanisme gunung berapi yang terjadi pada masa lampau (paleovolcanism). Material penyusun kawasan ini mencakup variasi jenis batuan beku dan piroklastik, seperti andesit, basalt, serta batuan piroklastik lainnya. Keberadaan gunung-gunung api strato yang menjulang tinggi, khususnya Gunung Arjuno dan Gunung Welirang, menjadi bukti nyata sekaligus sumber material utama dari deposit batuan vulkanik yang tersebar luas di wilayah selatan ini.

Sementara itu, pada sisi bagian utara dan timur Kabupaten Pasuruan, kondisi geologinya didominasi oleh hamparan batuan sedimen. Jenis batuan ini terbentuk melalui proses sedimentasi yang kompleks, meliputi endapan sungai (fluvial), bentukan delta, hingga sedimen laut (marine sediment). Proses pembentukannya sangat dipengaruhi oleh dinamika geologis seperti mekanisme pengendapan material, sedimentasi berkelanjutan, serta aktivitas tektonik. Jaringan sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Pasuruan berperan vital dalam transportasi material endapan yang tererosi dari kawasan pegunungan dan perbukitan di sekitarnya menuju ke dataran yang lebih rendah. Akibat proses ini, pada kawasan dataran rendah terbentuk lapisan endapan alluvial yang sangat subur dan kaya akan kandungan bahan organik, yang pada gilirannya menjadi fondasi utama bagi kesuburan tanah untuk mendukung sektor pertanian yang makmur di wilayah tersebut.

Lebih jauh lagi, posisi geografis Wilayah Kabupaten Pasuruan berada dalam zona yang tergolong aktif secara tektonik. Hal ini ditandai dengan keberadaan jalur-jalur patahan (sesar) dan rekahan geologi yang mengindikasikan adanya potensi kerawanan terhadap bencana gempa bumi. Aktivitas tektonik yang berlangsung dalam kurun waktu geologis tersebut juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan konfigurasi relief permukaan bumi serta pola aliran sungai (drainase) yang ada saat ini. Di samping itu, beberapa bagian dari wilayah Kabupaten Pasuruan juga teridentifikasi

memiliki kandungan deposit batu gamping (batu kapur). Batuan ini umumnya terbentuk dari proses sedimentasi laut purba dan kini menjadi salah satu sumber daya alam mineral yang bernilai ekonomis tinggi, khususnya sebagai bahan baku utama untuk mendukung industri konstruksi dan bahan bangunan.

Ditinjau dari perspektif struktur geologi secara makro, wilayah Kabupaten Pasuruan terbagi secara proporsional ke dalam dua kelompok formasi geologi besar. Kelompok pertama adalah formasi gunung api kuartir muda (young quaternary) yang mendominasi wilayah dengan cakupan luasan mencapai 52,43%, sedangkan kelompok kedua adalah formasi kuartir tua (old quaternary) yang mencakup luasan sebesar 34,95%. Secara lebih spesifik, kondisi geologi wilayah ini tersusun atas dua belas (12) satuan batuan yang meliputi: Satuan Alluvium (Qa), Satuan Tuff Rabano (Qvtr), Satuan batuan gunung api kuartir atas Penanggungan (Qvn), Satuan batuan gunung api Arjuno-Welirang (Qvaw), Satuan batuan gunung api kuartir tengah Ringgit (Qvr), serta Satuan gunung api kuartir Tengger tua (Qpvtr).

Secara garis besar, klasifikasi jenis batuan yang terdapat di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori utama, yaitu: kelompok batuan permukaan, kelompok batuan sedimen, dan kelompok batuan gunung api. Rincian penjelasan teknis mengenai karakteristik masing-masing jenis batuan tersebut telah disajikan secara lengkap pada Tabel berikut.

Tabel 2.3 Jenis Batuan di Wilayah Kabupaten Pasuruan

Jenis Batuan	Karakteristik dan Persebaran
Endapan Permukaan	
Batuan Alluvium	1. Terdiri dari bahan kerakal, kerikil, pasir, lempung dan lumpur 2. Terdiri dari endapan sungai Rejoso dan endapan pantai sepanjang Selat Madura
Batuan Sedimen	
Formasi Kabuh	1. Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batu lempung tufan, batu pasir gampingan, konglomerat, lempung dan tuf vulkan 2. Sebarannya tidak luas, terdapat disekitar Desa Raci dan di Beji
Formasi Jombang	1. Terdiri dari bahan breksi, batu pasir tufan, batu lempung tufan, lempung, batu gamping dan tufan

Jenis Batuan	Karakteristik dan Persebaran
	2. Sebarannya terdapat di sekitar Raci, sebelah selatan Bangil, Beji dan Gondangwetan
Formasi Welang	1. Terdiri Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batupasir, lempung, konglomerat dan tuf vulkan 2. Sebarannya tidak luas di Sungai Welang
Batuan Gunung Api	
Batuan Gunung Api Quarter Bawah (Gendis)	1. Terdiri dari bahan breksi gunung api, tuf breksi, lava, tuf dan aglomerat
Batuan Gunung Api Quarter Tengah (Ringgit)	1. Terdiri dari batuan gunung api ringgit, batuan gunung api tengger tua
Batuan Gunung Api Arjuna - Welirang	1. Terdiri dari breksi gunung api, lava, breksi tufan dan tuf
Batuan Gunung Api Tengger	1. Terdiri dari tuf pasiran, tuf batu apung, tuf abu dan aglomerat
Tuf Rabano	1. Terdiri dari tuf pasiran, tuf batu apung, breksituf dan tuf halus
Batuan Gunung Api Kuarter Atas Penanggungan	1. Terdiri dari breksi gunung api, lava tuf, breksi tufan, aglomerat dan lahar
Batuan Gunung Api Bromo	1. Terdiri dari breksi gunung api, lava, tuf, tuf breksi, dan lahar 2. Batuan ini merupakan endapan hasil kegiatan erupsi dari kelompok Gunung Bromo.
Pasir Gunung Api Tengger	1. Terdiri dari pasir gunung api, bom gunung api dan batu apung 2. Pasir gunung api ini merupakan endapan piroklastika muda yang terendapkan dalam kawah tengger, berbentuk tapal kuda yang mengelilingi kelompok G. Bromo

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Kompleksitas proses geologi yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang di wilayah Kabupaten Pasuruan telah meninggalkan jejak yang signifikan. Fenomena ini membentuk banyak rekaman peristiwa geologi yang unik dan menarik, yang memiliki nilai ilmiah serta estetika tinggi. Oleh karena itu, potensi ini perlu dikelola dan ditetapkan sebagai Warisan Geologi (Geological Heritage). Langkah pelestarian ini menjadi sangat krusial agar keberadaan situs-situs geologi tersebut tetap terjaga

keasliannya dan terhindar dari kerusakan, sekaligus mendorong pengakuan status Warisan Geologi tersebut tidak hanya pada tingkat Nasional, tetapi juga menembus pengakuan di tingkat Internasional.

Lebih lanjut, beralih pada aspek pedologi atau karakteristik tanah, wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki variasi jenis tanah yang cukup beragam. Berdasarkan karakteristik fisik dan kimianya, jenis tanah di wilayah ini secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kelompok utama. Identifikasi ini penting untuk menentukan daya dukung lahan terhadap berbagai aktivitas pembangunan dan pertanian. Berikut adalah rincian keenam kelompok tanah tersebut:

1. Tanah Alluvial Jenis tanah ini memiliki karakteristik fisik berupa warna dominan kelabu dengan tekstur liat. Tingkat keasaman tanah ini bervariasi (aneka), namun memiliki kandungan zat organik yang tergolong lemah. Meskipun demikian, tingkat kejenuhan biasanya berkisar antara sedang hingga tinggi. Dari sisi hidrologi, tanah Alluvial memiliki permeabilitas yang rendah. Meskipun kepekaan terhadap erosi tergolong tinggi, namun karena sebarannya mayoritas berada di daerah yang datar, risiko erosi lanjut tidak terjadi secara signifikan. Pemanfaatan: Lahan dengan jenis tanah ini sangat cocok dan umum digunakan untuk budidaya padi sawah, tanaman palawija, serta kegiatan perikanan darat.
2. Tanah Regosol Tanah Regosol dicirikan dengan warna yang bervariasi dari kelabu hingga kuning dengan tekstur yang kasar atau berpasir. Kandungan liat pada tanah ini relatif sedikit, yakni kurang dari 40%. Sifat kimianya menunjukkan keasaman dan kejenuhan basa yang beraneka ragam, serta kandungan zat organik yang rendah. Tanah ini memiliki permeabilitas atau kemampuan meloloskan air yang tinggi, serta memiliki kepekaan yang tinggi pula terhadap erosi. Pemanfaatan: Jenis tanah ini mendukung untuk kegiatan pertanian seperti padi sawah, tanaman palawija, perkebunan tebu, serta budidaya berbagai jenis sayuran.
3. Tanah Andosol Tanah yang umumnya terbentuk dari material vulkanik ini memiliki ciri khas warna hitam hingga kuning. Teksturnya berkisar dari lempung hingga debu, dengan kandungan liat yang cenderung menurun. Derajat keasamannya berada pada rentang agak masam hingga netral, dengan kandungan zat organik yang lemah dan kejenuhan basa. Sifat fisiknya memiliki permeabilitas sedang, namun perlu diwaspadai karena memiliki kepekaan yang besar terhadap ancaman erosi. Pemanfaatan: Lahan Andosol sangat produktif untuk komoditas dataran tinggi seperti sayur-mayur, tanaman bunga-bunga, perkebunan teh, kopi, serta pengembangan hutan pinus.

4. Tanah Grumusol Karakteristik fisik tanah Grumusol ditandai dengan warna kelabu hingga hitam pekat. Tekstur tanah ini didominasi oleh liat, di mana kandungan liatnya akan semakin meningkat seiring bertambahnya kedalaman tanah. Secara kimiawi, tanah ini memiliki reaksi sedikit asam hingga alkalin (basa), dengan kadar zat organik yang rendah namun memiliki kejenuhan basa yang tinggi. Permeabilitas tanah ini rendah, yang menyebabkan air sulit meresap, dan memiliki kepekaan erosi yang besar. Pemanfaatan: Tanah ini dimanfaatkan secara luas untuk pertanian padi sawah, tanaman jagung, kedelai, tebu, kapas, serta sangat cocok untuk pertumbuhan hutan jati.
5. Tanah Mediteran Tanah Mediteran mudah dikenali dari warnanya yang kuning hingga merah. Tekstur tanah ini adalah lempung liat dengan tingkat keasaman mulai dari agak masam hingga netral. Kandungan zat organik di dalamnya tergolong rendah, namun memiliki kejenuhan basa yang tinggi. Sifat permeabilitasnya sedang, sementara kepekaan terhadap erosi berkisar dari besar hingga sedang, tergantung pada kondisi lingkungan sekitarnya. Pemanfaatan: Potensi lahan ini umumnya digunakan untuk areal persawahan (padi sawah), lahan tegalan, serta area pertumbuhan rumput untuk pakan ternak.
6. Tanah Latosol Jenis tanah ini memiliki warna khas merah hingga kuning dengan tekstur liat yang konsisten dari lapisan atas hingga ke bawah. Tingkat keasamannya berkisar dari masam hingga agak masam. Kandungan zat organiknya bervariasi dari rendah hingga agak sedang di lapisan permukaan (top soil) dan menurun pada lapisan yang lebih dalam. Kejenuhan basanya rendah hingga sedang, namun memiliki permeabilitas yang tinggi dan keunggulan berupa kepekaan erosi yang kecil, sehingga relatif stabil. Pemanfaatan: Tanah Latosol sangat mendukung berbagai jenis tanaman pertanian dan perkebunan, meliputi padi sawah, jagung, tanaman umbi-umbian, kelapa, coklat (kakao), cengkeh, kopi, maupun sebagai area hutan tropika.

C. Klimatologi

Secara klimatologis, karakteristik wilayah Kabupaten Pasuruan secara umum dikategorikan memiliki tipe iklim tropis basah. Kondisi cuaca dan iklim di daerah ini sangat dipengaruhi oleh dinamika sirkulasi udara regional, khususnya hembusan angin Muson yang bertiup secara periodik. Keberadaan angin Muson ini memegang peranan vital dalam membentuk pola iklim wilayah serta menentukan siklus pergantian musim. Fenomena alam tersebut mengakibatkan terjadinya dualisme musim, yakni musim penghujan yang ditandai dengan aktivitas angin Muson Timur, serta musim kemarau yang terjadi akibat pengaruh hembusan angin Muson Barat. Adapun gambaran spesifik

mengenai data dan kondisi iklim aktual yang terjadi di Kabupaten Pasuruan sepanjang Tahun 2024, disajikan secara terperinci dalam Tabel berikut.

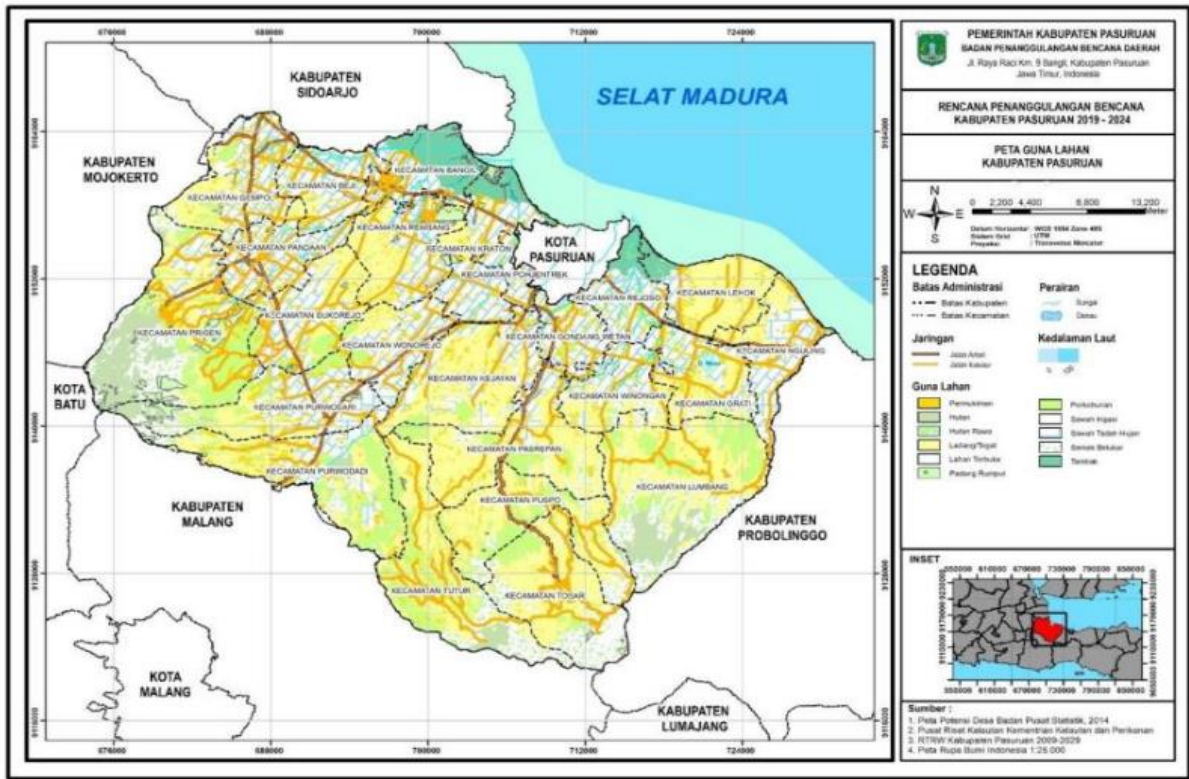
Tabel 2.4 Iklim Kabupaten Pasuruan

Kecepatan Angin	Maks 13 Knots terjadi di bulan Maret dan April
Rata-rata Kelembapan Maksimum	91% di bulan Februari dan Desember
Hari Hujan	Terbanyak selama 25 hari di bulan Maret dan Desember
Rata-rata Penyinaran Matahari	Paling lama 6,3 jam di bulan Agustus
Curah Hujan	Maks 736,1 mm/tahun terjadi di bulan Desember
Rata-rata Suhu Tertinggi	Mencapai 24,5 C terjadi di bulan Oktober

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

D. Penggunaan Lahan

Ditinjau dari aspek tata guna lahan, pola pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan dominasi yang signifikan pada sektor pertanian. Hal ini terindikasi dari penggunaan lahan terbesar yang dialokasikan untuk areal persawahan dengan sistem irigasi, yang mencatatkan total luasan mencapai 38.391,34 Hektar. Di sisi lain, proporsi lahan yang dimanfaatkan sebagai kawasan terbangun yang meliputi permukiman, kawasan industri, dan fasilitas infrastruktur lainnya tercatat seluas 17.301,60 Hektar. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai distribusi spasial dan komposisi peruntukan lahan lainnya, rincian data secara mendetail telah diuraikan dalam Tabel berikut:



Gambar 2.3 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

Tabel 2.5 Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan

No	Penggunaan	Presentase
1	Aneka Industri	0,994
2	Industri Kecil	0,023
3	Jasa Permukiman	10,169
4	Peternakan Unggas	0,021
5	Tambak	1,696
6	Sawah Irigasi	26,187
7	Sawah Tadah Hujan	1,536
8	Buah-Buahan	0,006
9	Kebun Campuran	3,242
10	Perkebunan	2,805
11	Tegalan/Ladang	36,051
12	Hutan Sejenis	11,878
13	Padang Rumput	0,707
14	Semak	2,708
15	Kolam Air Tawar	0,001
16	Lapangan Olahraga	0,215
17	Tanah Kosong yang Diperuntukkan	0,033
18	Tanah Terbuka	1,224
19	Sungai	0,217
20	Danau/Situ/Telaga	0,127
21	Jalan Aspal	0,081
22	Pemakaman	0,081

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pasuruan, 2024

2.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

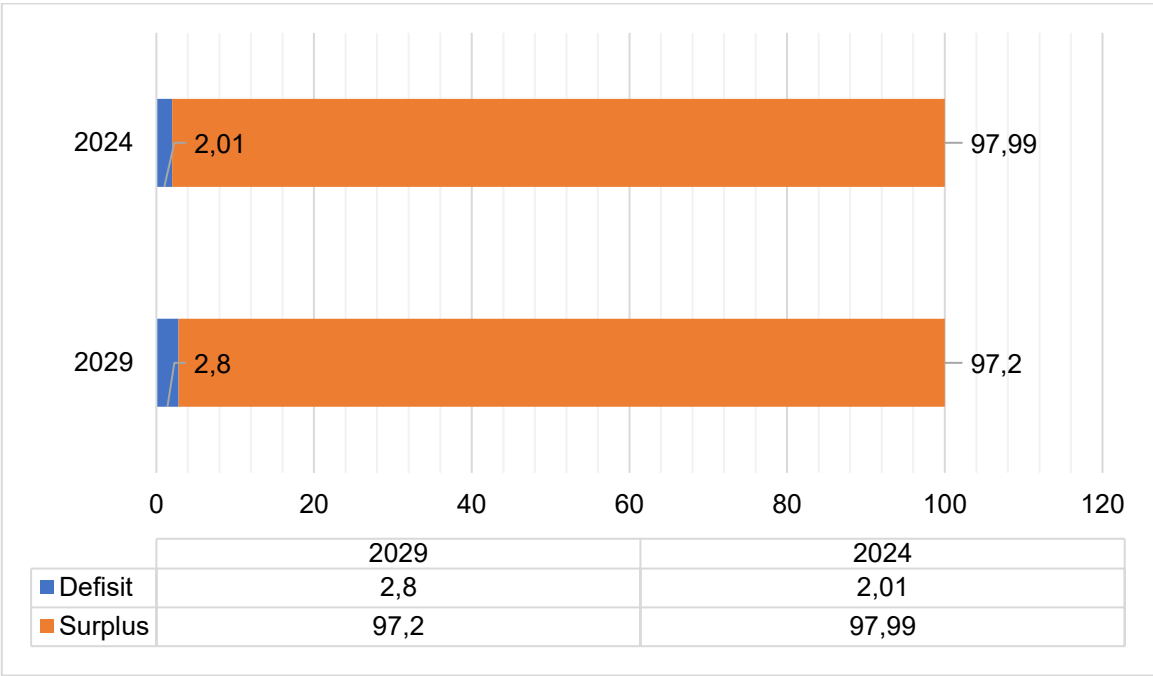
A. Daya Dukung Air

Evaluasi yang bersifat komprehensif dan mendalam mengenai keberlanjutan sumber daya alam, dengan fokus utama pada aspek daya dukung air, telah berhasil dilaksanakan sebagai bagian integral dari penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini disusun sebagai landasan ilmiah untuk mendukung perumusan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan untuk periode perencanaan tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaannya, analisis mengenai kondisi daya dukung air tanah di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan menggunakan pendekatan spasial yang memiliki tingkat presisi tinggi, yakni dengan menerapkan metode sistem grid (grid system). Penggunaan pendekatan teknis ini dinilai sangat krusial karena memungkinkan dilakukannya pemetaan yang akurat dan terperinci mengenai sebaran neraca air di setiap segmen wilayah secara spesifik.

Berdasarkan hasil visualisasi dan interpretasi data spasial tersebut, dapat diidentifikasi secara jelas bagaimana kondisi ketersediaan air yang diklasifikasikan berdasarkan proporsi wilayah surplus dan wilayah defisit. Pada kondisi eksisting tahun 2024, ketahanan air di Kabupaten Pasuruan secara umum menunjukkan status yang relatif aman dan terkendali. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa mayoritas kebutuhan air di wilayah ini masih dapat terpenuhi dengan sangat baik, yang terindikasi secara statistik dengan cakupan wilayah yang berada dalam kondisi surplus mencapai angka dominan sebesar 97,99%. Kendati demikian, terdapat sinyal kerawanan dini yang sama sekali tidak boleh diabaikan oleh para pemangku kepentingan, yaitu adanya 2,01% bagian wilayah yang telah teridentifikasi mulai mengalami tekanan dan berada dalam kondisi defisit air.

Lebih lanjut, apabila ditinjau berdasarkan analisis proyeksi untuk jangka menengah hingga tahun 2029, terlihat adanya tren pergeseran neraca air yang mengarah pada kondisi yang perlu diwaspadai secara serius. Berdasarkan model proyeksi tersebut, diprediksi akan terjadi peningkatan luas wilayah yang mengalami defisit menjadi 2,80%. Peningkatan area defisit ini secara otomatis akan diikuti dengan penurunan proporsi wilayah yang memiliki surplus air menjadi 97,20%. Meskipun secara kuantitatif angka pergeseran menuju defisit tersebut tampak relatif kecil, namun adanya tren kenaikan defisit yang terjadi secara konsisten dalam kurun waktu lima tahun memberikan indikasi kuat mengenai potensi penurunan daya dukung air yang berlangsung secara bertahap di masa mendatang.

Fenomena penurunan kapasitas daya dukung lingkungan ini disinyalir kuat merupakan dampak akumulatif dari berbagai faktor tekanan (driver) pembangunan. Faktor utamanya adalah peningkatan permintaan kebutuhan air baku yang beriringan dengan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, serta dampak dari fenomena perubahan iklim global yang secara signifikan mempengaruhi pola curah hujan dan siklus pengisian kembali (recharge) ketersediaan sumber daya air tanah. Oleh sebab itu, indikasi peningkatan tren defisit ini menuntut adanya langkah antisipatif yang konkret dan segera, melalui perumusan kebijakan pengelolaan tata kelola air yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi sangat krusial untuk menjaga stabilitas keseimbangan antara sisi kebutuhan (demand) dan sisi ketersediaan (supply) air di masa depan agar tidak terjadi krisis air. Adapun visualisasi lengkap mengenai peta sebaran kondisi daya dukung air ini telah disajikan secara rinci pada Gambar berikut:



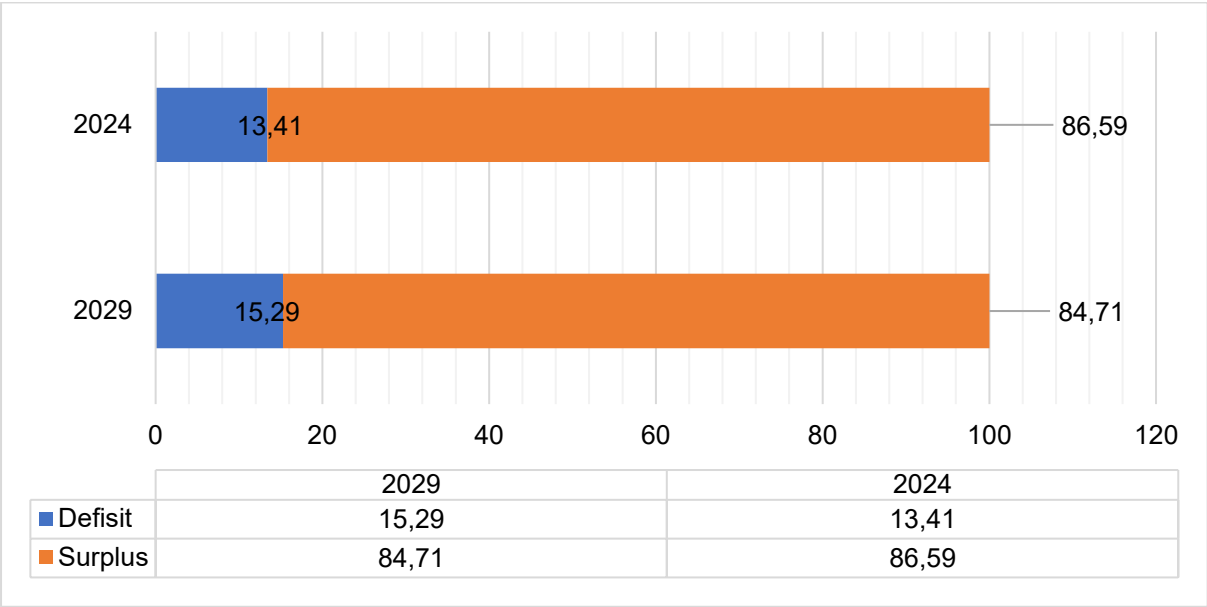
Gambar 2.4 Daya Dukung Air Tahun 2024 dan Tahun 2029

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

B. Daya Dukung Pangan

Merujuk pada hasil analisis mendalam yang termuat dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, gambaran mengenai kondisi daya dukung pangan di wilayah ini pada tahun 2024 menunjukkan performa ketahanan pangan yang kuat. Secara agregat, mayoritas wilayah Kabupaten Pasuruan berada dalam kondisi aman, yang ditandai dengan capaian kondisi surplus sebesar 86,59%. Angka persentase yang dominan ini merepresentasikan suatu kondisi di mana total ketersediaan dan pasokan pangan mampu melampaui jumlah kebutuhan konsumsi masyarakat secara signifikan.

Meskipun demikian, masih terdapat catatan yang perlu mendapatkan perhatian, yakni adanya proporsi wilayah sebesar 13,41% yang teridentifikasi mengalami kondisi defisit. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian kecil wilayah atau kelompok masyarakat tertentu yang kebutuhan pangannya belum dapat terpenuhi secara optimal dari produksi lokal atau pasokan yang ada. Untuk memahami sebaran lokasi antara area yang mengalami surplus dan area yang mengalami defisit secara lebih spesifik, visualisasi spasialnya telah disajikan secara terperinci pada Gambar berikut:



Gambar 2.5 Grafik Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Tahun 2029
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

2.4. Ketahanan Energi

Dalam sebuah ekosistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, data demografi kependudukan di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berfungsi sebagai catatan statistik semata, melainkan memegang peranan yang sangat vital dan fundamental. Data ini menjadi basis perhitungan utama dalam menyusun proyeksi kebutuhan masa depan serta alat ukur yang presisi untuk menilai tingkat ketahanan energi wilayah. Salah satu indikator kunci yang paling representatif dalam memotret kondisi tersebut adalah tingkat konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita). Secara definisif dan teknis, konsumsi listrik per kapita dipahami sebagai rasio perbandingan antara total pemakaian tenaga listrik di suatu area dibagi dengan jumlah total penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut dalam kurun waktu periode satu tahun anggaran. Angka rasio ini mencerminkan akumulasi total volume energi listrik dalam satuan kWh (kilo Watt hours) yang dimanfaatkan oleh masyarakat, yang mencakup penggunaan secara langsung (rumah tangga) maupun tidak langsung (fasilitas publik dan industri) yang bersumber dari berbagai varian sumber energi yang tersedia di jaringan kelistrikan.

Merujuk pada hasil telaah mendalam terhadap data historis yang bersumber dari validasi Perusahaan Listrik Negara (PLN), terekam sebuah fenomena menarik di mana grafik konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Pasuruan selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dan konsisten. Sorotan khusus dan atensi mendalam perlu ditujukan pada kondisi aktual di tahun 2024, di mana terjadi sebuah lonjakan angka konsumsi yang tergolong sangat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fenomena kenaikan tajam ini bukanlah sekadar anomali statistik, melainkan memberikan indikasi kuat dan bukti empiris adanya akselerasi masif dalam aktivitas ekonomi daerah serta laju industrialisasi yang pesat. Hal ini ditandai secara nyata dengan bertumbuhnya sektor-sektor usaha baru dan ekspansi industri yang beroperasi secara intensif, yang secara otomatis mendorong permintaan energi.

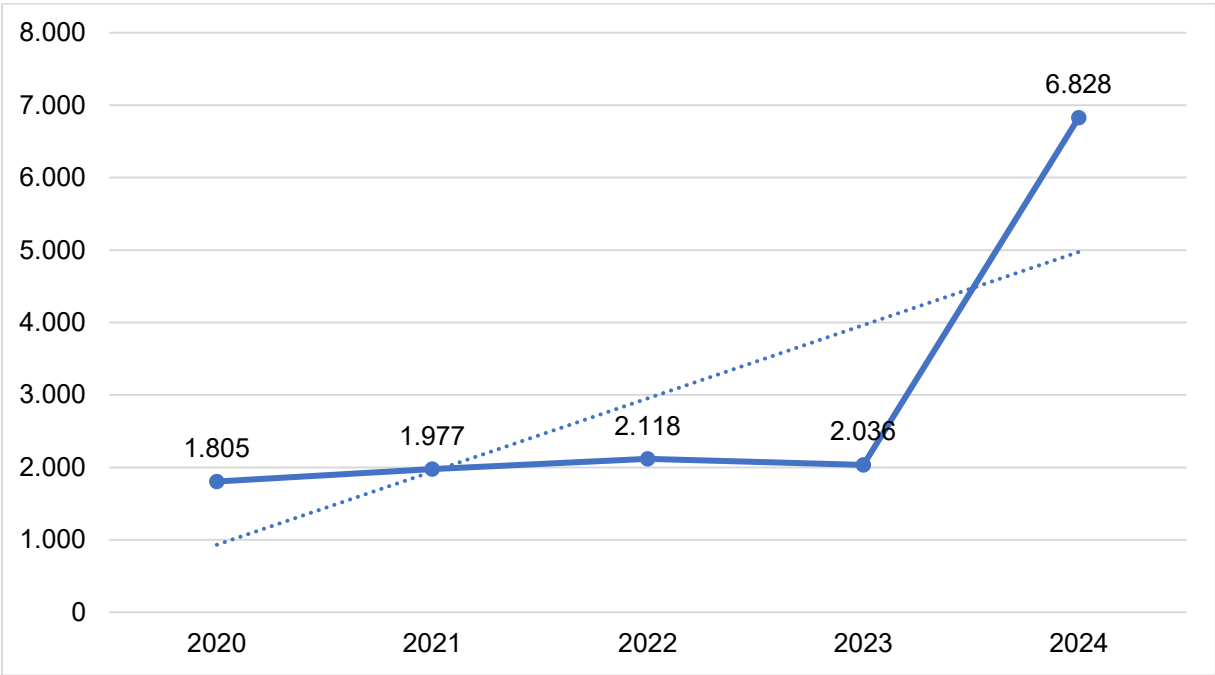
Dinamika lonjakan permintaan energi yang luar biasa ini membawa implikasi strategis yang serius dan menuntut adanya perumusan langkah-langkah penanganan yang bersifat komprehensif dan terukur. Fenomena tersebut mendorong urgensi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat sektor energi melalui tiga langkah prioritas utama, yakni:

Penguatan Infrastruktur Energi secara Masif: Sangat diperlukan upaya percepatan yang konkret dalam hal ekstensifikasi dan perluasan jangkauan jaringan listrik hingga ke seluruh pelosok wilayah untuk menjamin rasio elektrifikasi yang merata. Selain itu, pembangunan unit gardu induk baru di titik-titik lokasi strategis serta peningkatan kapasitas terpasang pada pembangkit listrik menjadi hal yang mutlak dilakukan agar sistem kelistrikan daerah mampu menopang beban puncak (peak load) yang diproyeksikan akan terus bertambah seiring dengan kemajuan ekonomi yang pesat.

Akselerasi Diversifikasi Sumber Energi: Pemerintah perlu mendorong transformasi energi secara progresif dengan memperluas diversifikasi sumber daya energi. Langkah strategis ini diimplementasikan dengan menggali dan mengembangkan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang tersedia di daerah, seperti tenaga surya atau biomassa. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat ketergantungan daerah yang selama ini masih tinggi terhadap pasokan listrik berbasis bahan bakar fosil, sekaligus mendukung kelestarian lingkungan.

Peningkatan Efisiensi dan Konservasi Energi: Mengimplementasikan manajemen pemakaian listrik atau Demand Side Management yang efisien, hemat, dan efektif di semua sektor. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketersediaan pasokan energi tidak hanya sekadar andal (reliable) dalam memenuhi lonjakan kebutuhan saat

ini, tetapi juga menjamin prinsip keberlanjutan (sustainable) demi menjaga ketahanan energi jangka panjang bagi generasi masa depan."



Gambar 2.6 Jumlah Konsumsi Listrik Perkapita di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

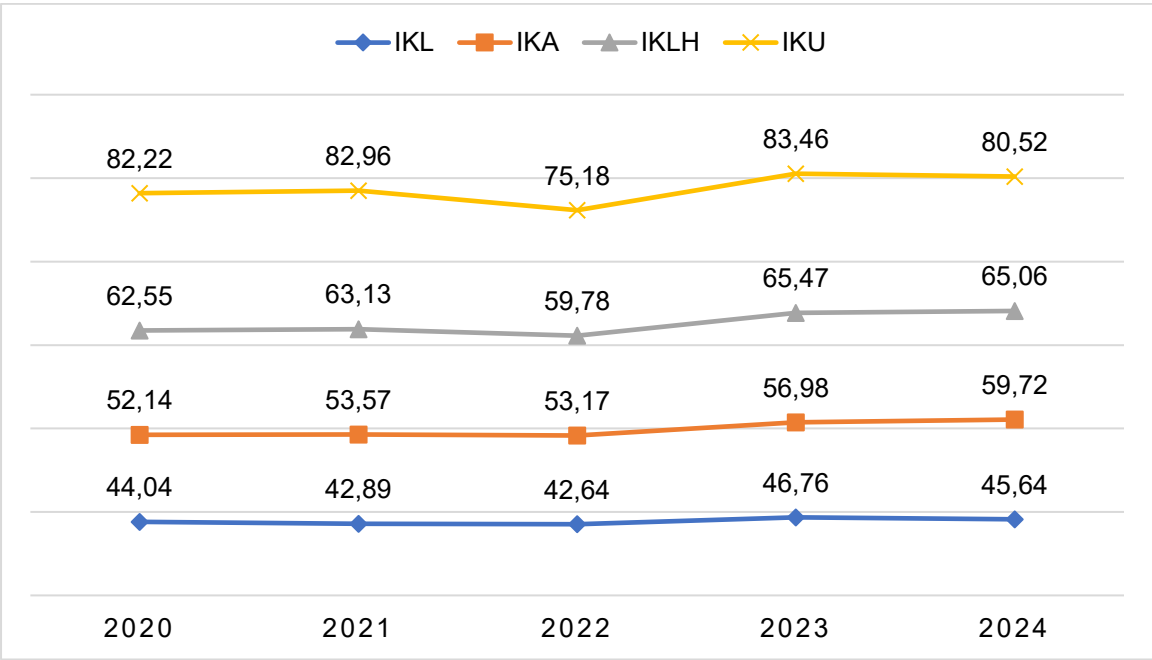
Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pasuruan, 2025

2.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Pola pemanfaatan dan tata kelola penggunaan lahan di suatu wilayah bukan hanya sekadar aktivitas fisik semata, melainkan memiliki korelasi yang sangat erat serta dampak yang fundamental terhadap fluktuasi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dinamika perubahan bentang alam yang didorong oleh aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan hutan menjadi area komersial (deforestasi), ekspansi urbanisasi perkotaan yang cepat dan masif, serta penerapan sistem pertanian intensif yang eksploitatif, dapat membawa konsekuensi serius. Salah satu dampak utamanya adalah pengurangan area tutupan vegetasi hijau secara drastis yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga alami ekosistem. Kondisi ini secara berantai berpotensi memicu peningkatan polusi udara dan air, memperparah degradasi struktur dan kualitas tanah, serta menggerus kekayaan keanekaragaman hayati. Secara akumulatif, keseluruhan faktor negatif tersebut akan melemahkan daya dukung lingkungan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup daerah secara signifikan.

Sebaliknya, pergeseran menuju penerapan paradigma praktik penggunaan lahan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi solusi strategis yang sangat krusial untuk memitigasi kerusakan tersebut. Strategi konkret seperti pengembangan pertanian organik yang ramah lingkungan serta upaya rehabilitasi lahan-lahan yang kritis

atau terdegradasi terbukti mampu memberikan kontribusi positif dalam mendorong capaian IKLH. Upaya-upaya konstruktif ini berperan penting dalam menjaga stabilitas kesuburan tanah, melindungi siklus hidrologi demi keberlanjutan sumber daya air, serta memperkaya ekosistem keanekaragaman hayati. Hal ini menjadi sangat fundamental, mengingat IKLH itu sendiri sejatinya merupakan nilai komposit yang terintegrasi dari tiga indikator utama performa lingkungan, yakni Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Oleh karena itu, manajemen penggunaan lahan yang tepat tidak hanya memperbaiki kondisi fisik tanah, tetapi akan berpengaruh langsung dan simultan terhadap perbaikan ketiga komponen penyusun indeks tersebut..



Gambar 2.22 Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2025

Sebagaimana tervisualisasi secara jelas pada Gambar 1.11, tren capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan performa apabila disandingkan dengan capaian pada tahun 2023. Penurunan agregat nilai indeks ini salah satunya dipicu oleh merosotnya angka Indeks Kualitas Udara (IKU) dari tahun 2023 ke tahun 2024. Analisis mendalam menunjukkan bahwa degradasi kualitas udara ini terkonsentrasi pada kawasan-kawasan dengan kepadatan transportasi tinggi, di mana emisi gas buang kendaraan bermotor menjadi kontributor pencemar utama. Kondisi ini diperparah dengan minimnya keberadaan tegakan pohon sebagai penyangga (buffer) alami di titik-titik krusial, khususnya yang teridentifikasi pada lokasi sampling di Exit Tol Grati, serta sepanjang koridor jalur lalu lintas utama Pasuruan - Probolinggo, Pasuruan - Malang, dan Pasuruan - Surabaya. Menyikapi kondisi tersebut, diperlukan langkah mitigasi yang konkret berupa

intensifikasi penanaman pohon peneduh di sepanjang jalur padat transportasi serta penerapan kebijakan yang ketat terkait pemenuhan baku mutu emisi kendaraan bermotor.

Selain faktor transportasi, penurunan kualitas lingkungan hidup secara umum juga didorong oleh akumulasi berbagai faktor tekanan lingkungan lainnya. Faktor-faktor tersebut meliputi praktik pembuangan air limbah domestik dan/atau air limbah industri yang belum memenuhi standar baku mutu lingkungan hidup, atau bahkan dibuang langsung ke badan air tanpa melalui proses pengolahan yang memadai pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Di sisi lain, sektor industri juga berkontribusi melalui belum optimalnya kelengkapan alat pengendali pencemaran udara pada cerobong-cerobong sumber emisi. Masalah ini semakin kompleks dengan terjadinya fenomena alih fungsi lahan yang masif yang memicu degradasi lingkungan, belum terpenuhinya target persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan, serta tren berkurangnya tutupan lahan vegetasi.

Dalam konteks pengendalian pencemaran, terdapat korelasi yang sangat signifikan antara ketersediaan RTH di wilayah perkotaan maupun peningkatan tutupan lahan terhadap perbaikan kualitas udara. Vegetasi dalam RTH memiliki fungsi vital ekologis dalam kemampuan penyerapan berbagai polutan udara berbahaya (seperti debu partikulat, CO, SO₂, dan NO₂). Saat ini, sebaran aset RTH telah mencakup wilayah perkotaan di seluruh kecamatan (24 Kecamatan). Guna meningkatkan fungsi ekologis tersebut, serangkaian upaya strategis untuk optimalisasi RTH terus dilakukan, yang meliputi:

1. Ekstensifikasi RTH: Meningkatkan kuantitas ketersediaan RTH di kawasan perkotaan melalui pembangunan titik-titik lokasi RTH baru yang representatif.
2. Pemanfaatan Lahan Sempadan: Mengoptimalkan fungsi lahan sempadan sebagai sabuk hijau (green belt), mencakup area sempadan sungai, sempadan jalan raya, sempadan jalur SUTTET (Saluran Udara Tegangan Tinggi Ekstra Tinggi), sempadan rel kereta api, hingga sempadan danau.
3. Program PJLH: Mengoptimalkan program Penyedia Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) yang difokuskan pada penyediaan lahan konservasi tanaman keras baik jenis kayu-kayuan maupun tanaman buah-buahan produktif khususnya pada area di luar Kawasan Hutan Negara.

Sementara itu, pada komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL), juga tercatat adanya penurunan nilai indeks dari tahun 2023 ke tahun 2024. Perlu digarisbawahi bahwa penurunan ini utamanya disebabkan oleh kendala administratif teknis dalam proses penetapan delineasi tutupan vegetasi pada sistem aplikasi IKLH Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada verifikasi data tahun 2023, delineasi tutupan lahan telah terverifikasi valid sehingga berkontribusi pada lonjakan signifikan nilai IKL dibanding tahun 2022. Namun, pada saat proses verifikasi ulang untuk data tahun 2024, sebagian data delineasi mengalami penolakan (reject) oleh tim verifikator pusat. Penolakan ini terjadi akibat ditemukannya tumpang tindih (overlap) delineasi dan titik koordinat dalam satu wilayah yang sama. Konsekuensinya, luasan tutupan vegetasi yang diakui secara sistem menjadi berkurang, sehingga nilai IKL tahun 2024 mengalami koreksi penurunan akibat penyesuaian data tersebut. Sebagai tindak lanjut, diperlukan upaya perbaikan mendasar dalam hal peningkatan akurasi inventarisasi data serta presisi dalam delineasi peta tutupan lahan di masa mendatang.

2.6. Demografi

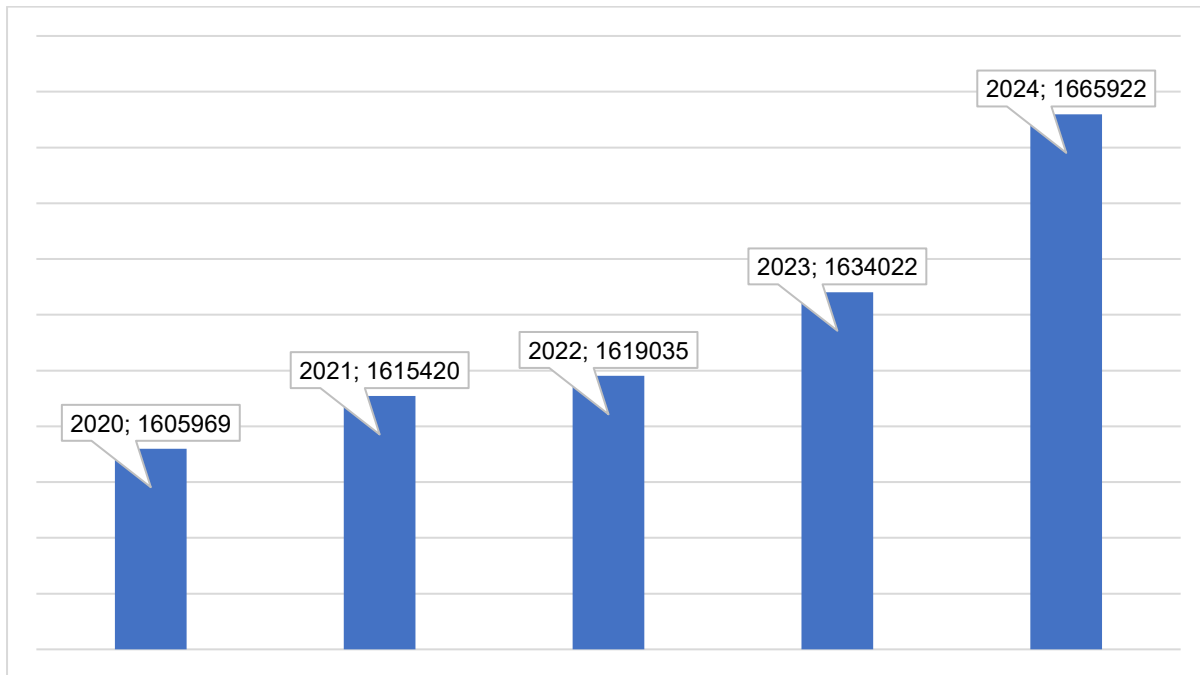
Dalam perspektif pembangunan daerah yang holistik, penduduk menempati posisi sentral sebagai salah satu modal dasar (basic capital) yang paling fundamental. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya disandarkan pada aspek kuantitas atau besaran jumlah penduduk semata, melainkan harus diimbangi dengan perhatian yang serius terhadap aspek kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar memang memiliki potensi, tetapi apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas, kompetensi, dan produktivitas, justru berpotensi memicu permasalahan sosial yang kompleks dan bertransformasi menjadi beban atau hambatan (liability) dalam akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah.

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan analisis terhadap data runtun waktu selama periode lima tahun (2020-2024) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan, dinamika kependudukan di wilayah ini menunjukkan tren yang dinamis. Tercatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan secara konsisten mengalami kenaikan, dengan catatan khusus pada tahun 2024 di mana laju pertumbuhan penduduk mengalami lonjakan peningkatan yang paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam periode tersebut.

Data tren demografi ini memegang nilai signifikansi yang tinggi sebagai basis data utama dalam formulasi perencanaan pembangunan strategis maupun perumusan kebijakan sosial di daerah. Hal ini dikarenakan keberadaan populasi penduduk yang besar secara langsung berkorelasi dengan jaminan ketersediaan pasokan tenaga kerja (labor supply). Ketersediaan sumber daya manusia ini sangat krusial untuk mengisi kebutuhan pasar kerja dan menggerakkan roda perekonomian di berbagai sektor unggulan, mulai dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan yang masif, hingga

sektor jasa. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk yang sehat dan terkendali diharapkan mampu menjamin ketersediaan jumlah angkatan kerja yang produktif guna mendukung daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.



Gambar 2.7 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Analisis terhadap perkembangan demografi di Kabupaten Pasuruan selama periode lima tahun terakhir (2020-2024) memperlihatkan tren yang cukup dinamis. Berdasarkan data visualisasi grafik, jumlah total penduduk secara konsisten mengalami tren kenaikan positif di setiap tahunnya, bergerak dari angka 1.605.969 jiwa pada tahun 2020 hingga mencapai 1.665.922 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan kuantitas ini mencerminkan daya tarik wilayah serta pertumbuhan alami yang terus berjalan.

Namun, jika ditinjau dari sisi laju pertumbuhan penduduk (LPP), tren yang terjadi menunjukkan pola fluktuasi yang signifikan, yang merefleksikan dinamika keberhasilan dan tantangan dalam kebijakan kependudukan:

1. Fase Akselerasi Awal (2021-2022): Terjadi peningkatan laju pertumbuhan dari 0,59% pada tahun 2021 menjadi 0,81% pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan adanya lonjakan pertumbuhan pasca-awal pandemi.
2. Fase Perlambatan (2023): Pada tahun 2023, laju pertumbuhan berhasil ditekan secara signifikan menjadi 0,58%. Angka ini menjadi titik terendah dalam periode pengamatan, yang mengindikasikan efektivitas intervensi program pengendalian penduduk pada tahun tersebut.

3. Fase Percepatan Kembali (2024): Memasuki tahun 2024, terjadi *rebound* atau percepatan kembali laju pertumbuhan yang cukup tajam mencapai angka 0,93%.

Secara keseluruhan, fluktuasi ini khususnya kemampuan daerah dalam menekan laju pertumbuhan pada periode tertentu (seperti tahun 2023) mengindikasikan bahwa instrumen dan program pengendalian penduduk di Kabupaten Pasuruan telah berjalan, meskipun masih menghadapi tantangan volatilitas yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Pola naik-turunnya laju pertumbuhan ini menjadi *baseline* penting untuk evaluasi strategi keluarga berencana dan manajemen migrasi di masa mendatang.

B. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Selain aspek pertumbuhan, pemahaman mengenai struktur umur penduduk adalah faktor kunci dalam perencanaan kebijakan publik, baik di sektor ekonomi maupun sosial. Dengan membedah komposisi umur, pemerintah dapat merancang program yang lebih presisi dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan kelompok usia dominan.

Berikut adalah rincian data jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan berdasarkan kelompok umur pada tahun 2024:

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan menurut Kelompok Umur Tahun 2024

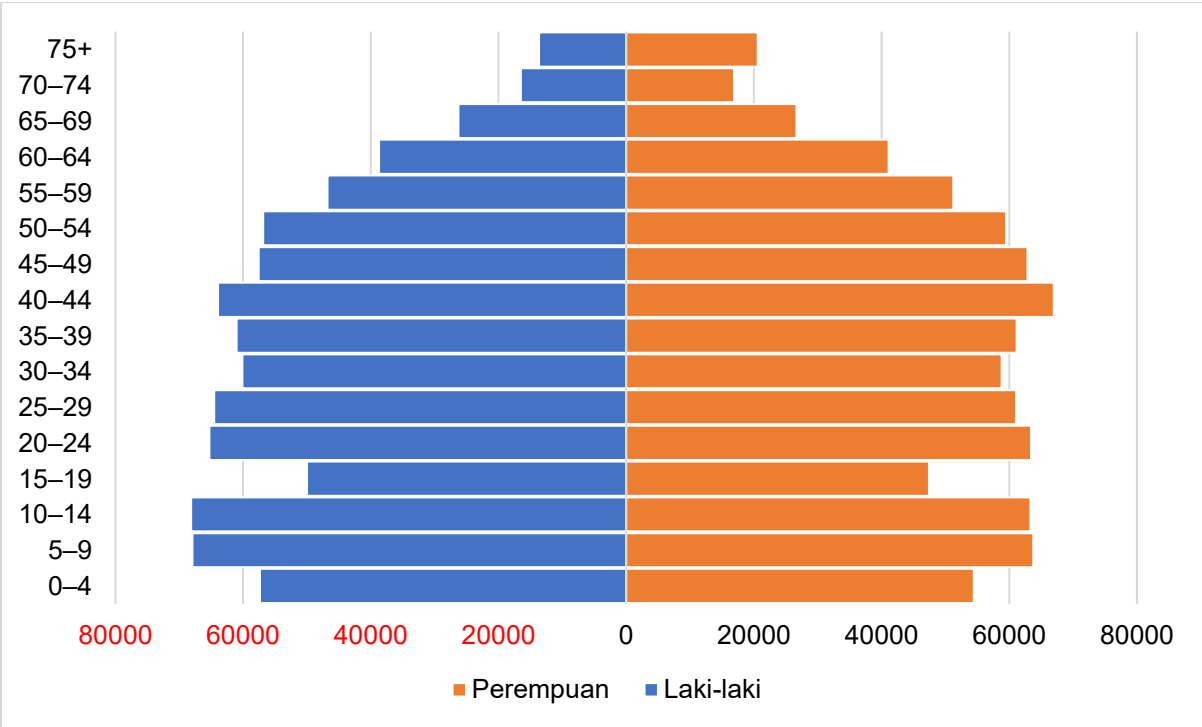
Kelompok Umur	Laki-laki (Ribuan Jiwa)	Perempuan (Ribuan Jiwa)	Jumlah (Ribuan Jiwa)
0-4	56.368	53.125	109.493
5-9	68.274	64.265	132.539
10-14	69.017	63.829	132.846
15-19	56.037	53.250	109.287
20-24	65.200	62.932	128.132
25-29	65.440	61.660	127.100
30-34	61.188	59.399	120.587
35-39	60.187	60.282	120.469
40-44	64.422	66.562	130.984
45-49	58.813	64.015	122.828
50-54	56.437	59.406	115.843
55-59	49.169	54.314	103.483
60-64	39.426	42.340	81.766
65-69	28.007	29.118	57.125
70-74	18.166	18.164	36.330
75+	14.954	22.156	37.110
Jumlah	831.105	834.817	1.665.922

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Merujuk pada Tabel di atas, dapat diidentifikasi pola persebaran usia yang signifikan. Kelompok umur 10-14 tahun tercatat sebagai kelompok dengan jumlah populasi tertinggi. Temuan ini membawa implikasi kebijakan bahwa pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas fasilitas pendidikan menengah serta program pengembangan anak dan remaja.

Di sisi lain, jumlah penduduk terendah berada pada kelompok lansia (umur 70-74 tahun dan 75+). Angka yang mengecil pada kelompok usia lanjut ini dapat mengindikasikan adanya tingkat mortalitas yang lebih tinggi pada segmen tersebut, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor akses terhadap layanan kesehatan geriatri, kondisi kesehatan umum, atau faktor sosial ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Gambaran lebih komprehensif mengenai struktur demografi dapat dilihat melalui bentuk piramida penduduk yang menggabungkan variabel umur dan jenis kelamin. Visualisasi ini krusial untuk menentukan karakteristik demografi suatu wilayah, apakah sedang tumbuh, stagnean, atau menua. Berikut adalah visualisasi Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2024:



Gambar 2.8 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Sebagaimana terlihat pada Gambar tersebut, piramida penduduk Kabupaten Pasuruan dikategorikan sebagai jenis Piramida Ekspansif. Bentuk piramida yang melebar di bagian bawah ini menunjukkan bahwa penduduk di wilayah ini berada dalam fase pertumbuhan (*growing population*).

Karakteristik utama dari piramida ekspansif ini meliputi:

- 1. Dominasi Penduduk Usia Muda: Sebagian besar populasi terkonsentrasi pada kelompok usia anak-anak dan remaja, yang menjadi basis bagi bonus demografi di masa depan.
- 2. Proporsi Lansia Kecil: Kelompok usia tua jumlahnya semakin mengerucut di bagian atas piramida.
- 3. Tingkat Kelahiran Tinggi: Dasar piramida yang lebar mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran bayi masih cukup tinggi.
- 4. Pertumbuhan Penduduk Tinggi: Secara agregat, wilayah ini masih mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat, yang menuntut penyediaan lapangan kerja dan layanan dasar yang masif.

C. Persebaran Penduduk & Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan

Dinamika persebaran penduduk merefleksikan pola konsentrasi pemukiman yang dipengaruhi oleh daya dukung wilayah dan aktivitas ekonomi. Berdasarkan analisis data demografi Kabupaten Pasuruan dari tahun 2020 hingga 2024 yang mencakup 24 kecamatan, terlihat adanya pola distribusi yang tidak merata antarwilayah.

Kecamatan Gempol secara konsisten tercatat sebagai wilayah dengan densitas demografi tertinggi, dengan jumlah penduduk mencapai 133.197 jiwa pada tahun 2024. Tingginya angka ini menempatkan Gempol sebagai pusat konsentrasi penduduk utama di kabupaten. Sebaliknya, Kecamatan Tosari menjadi wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 18.925 jiwa pada tahun 2024. Jumlah ini merepresentasikan proporsi yang sangat kecil, yakni hanya sekitar 1,2% dari total keseluruhan penduduk Kabupaten Pasuruan, yang mengindikasikan karakteristik wilayah yang mungkin lebih didominasi oleh kawasan lindung atau topografi pegunungan dengan pemukiman yang terbatas.

Rincian lengkap data tren persebaran penduduk di setiap kecamatan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	70.015	70.438	70.601	71.345	72.781
2	Tutur	53.743	53.887	53.830	55.107	56.187
3	Puspo	27.722	27.771	27.778	28.164	28.762
4	Tosari	18.799	18.818	18.837	18.550	18.925

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
5	Lumbang	35.174	35.385	35.464	35.879	36.681
6	Pasrepan	52.396	52.594	52.596	53.259	54.556
7	Kejayan	65.374	65.603	65.589	67.235	68.733
8	Wonorejo	59.864	60.186	60.286	61.112	62.326
9	Purwosari	84.137	84.706	84.962	86.266	88.051
10	Prigen	87.227	87.649	87.745	88.671	90.372
11	Sukorejo	87.477	88.069	88.336	88.839	90.568
12	Pandaan	111.062	111.563	111.651	112.299	114.237
13	Gempol	129.990	130.596	130.719	130.809	133.197
14	Beji	87.022	87.864	88.385	89.930	91.405
15	Bangil	83.307	83.671	83.724	84.241	85.504
16	Rembang	66.711	67.294	67.631	68.840	70.810
17	Kraton	88.525	88.912	88.969	88.535	90.315
18	Pohjentrek	31.296	31.581	31.751	31.436	31.900
19	Gondangwetan	56.264	56.589	56.705	57.339	58.533
20	Rejoso	46.766	47.036	47.132	48.366	49.070
21	Winongan	44.287	44.569	44.686	45.565	46.331
22	Grati	78.930	79.368	79.512	80.858	82.186
23	Lekok	77.514	78.176	78.551	78.286	80.139
24	Nguling	62.367	63.095	63.595	63.091	64.353
Kabupaten Pasuruan		1.605.969	1.615.420	1.619.035	1.634.022	1.665.922

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Indikator kepadatan penduduk merupakan parameter krusial dalam perencanaan tata ruang, karena menggambarkan intensitas tekanan demografis terhadap daya dukung lingkungan. Secara teoritis, standar kepadatan penduduk yang dianggap ideal untuk kenyamanan ruang hidup adalah 500 jiwa per kilometer persegi (km²). Semakin tinggi angka kepadatan di atas ambang batas tersebut, semakin besar pula tantangan dalam penyediaan infrastruktur, sanitasi, dan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan analisis data Badan Pusat Statistik tahun 2024, distribusi kepadatan penduduk di Kabupaten Pasuruan menunjukkan disparitas yang sangat tajam antarwilayah. Secara agregat, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Pasuruan telah mencapai 1.130,19 jiwa/km², angka yang jauh melampaui ambang batas ideal.

Tingkat kepadatan tertinggi terkonsentrasi di Kecamatan Pohjentrek, dengan angka densitas mencapai 2.685,19 jiwa/km². Angka ini mengindikasikan kondisi wilayah yang sangat padat (*overcrowded*), yang juga diikuti oleh wilayah urban lainnya seperti Kecamatan Pandaan (2.640,10 jiwa/km²) dan Kecamatan Beji (2.290,85 jiwa/km²). Tingginya kepadatan di wilayah-wilayah ini menuntut prioritas pada penataan kawasan kumuh dan manajemen limbah domestik.

Di sisi lain, spektrum kepadatan terendah berada di Kecamatan Tosari, dengan angka densitas hanya sebesar 193,11 jiwa/km². Wilayah ini, bersama dengan Kecamatan Lumbang (292,16 jiwa/km²) dan Kecamatan Puspo (492,92 jiwa/km²), menjadi satu-satunya tiga kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang masih berada dalam kategori kepadatan ideal (di bawah 500 jiwa/km²). Rendahnya kepadatan di wilayah-wilayah ini umumnya berkorelasi dengan karakteristik topografi pegunungan dan fungsi kawasan sebagai area konservasi atau pertanian.

Rincian lengkap mengenai tren kepadatan penduduk di seluruh kecamatan dari tahun 2021 hingga 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	687,47	689,06	696,32	710,34
2	Tutur	624,41	623,75	638,55	651,07
3	Puspo	475,94	476,06	482,67	492,92
4	Tosari	192,02	192,21	189,29	193,11
5	Lumbang	281,84	282,47	285,77	292,16
6	Pasrepan	584,70	584,72	592,10	606,51
7	Kejayan	828,84	828,67	849,46	868,39
8	Wonorejo	1.272,43	1.274,55	1.292,01	1.317,67
9	Purwosari	1.414,83	1.419,11	1.440,89	1.470,70
10	Prigen	719,02	719,81	728,79	741,36
11	Sukorejo	1.513,73	1.518,32	1.524,08	1.556,69
12	Pandaan	2.578,30	2.580,33	2.595,31	2.640,10
13	Gempol	2.011,65	2.013,54	2.014,93	2.051,71
14	Beji	2.202,11	2.215,16	2.253,88	2.290,85
15	Bangil	1.876,03	1.877,22	1.888,81	1.917,13
16	Rembang	1.582,64	1.590,57	1.619,00	1.665,33
17	Kraton	1.751,96	1.753,08	1.744,53	1.779,61
18	Pohjentrek	2.658,33	2.672,64	2.646,13	2.685,19
19	Gondangwetan	2.155,77	2.160,19	2.184,34	2.229,83
20	Rejoso	1.271,24	1.273,84	1.307,19	1.326,22
21	Winongan	969,52	972,07	991,19	1.007,85
22	Grati	1.562,98	1.565,81	1.592,32	1.618,47
23	Lekok	1.678,68	1.686,73	1.681,04	1.720,83
24	Nguling	1.481,10	1.492,84	1.481,01	1.510,63
Kabupaten Pasuruan		1.095,93	1.098,38	1.108,55	1.130,19

1 Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) merupakan indikator demografi vital yang mengukur perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk

perempuan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Indikator ini biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Keseimbangan rasio ini memiliki implikasi strategis dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender.

Berdasarkan analisis, terlihat adanya dinamika pergeseran struktur gender penduduk di Kabupaten Pasuruan selama empat tahun terakhir. Pada periode tahun 2021 hingga 2022, Kabupaten Pasuruan masih didominasi oleh penduduk laki-laki, ditandai dengan angka rasio di atas 100, yakni 100,13 pada tahun 2021 dan 100,11 pada tahun 2022.

Namun, memasuki tahun 2023 dan 2024, terjadi titik balik (*turning point*) di mana komposisi penduduk perempuan mulai lebih mendominasi dibandingkan laki-laki. Hal ini tecermin dari penurunan angka rasio menjadi 99,45 pada tahun 2023 dan sedikit naik namun tetap di bawah seratus pada angka 99,56 di tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa saat ini jumlah penduduk perempuan secara agregat lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki.

Jika ditinjau lebih spesifik per wilayah kecamatan pada tahun 2024, terdapat variasi yang cukup mencolok. Beberapa kecamatan masih mempertahankan dominasi laki-laki, seperti Kecamatan Prigen dengan rasio tertinggi sebesar 101,78. Sebaliknya, wilayah dengan dominasi perempuan (rasio terendah) terdapat di Kecamatan Nguling dengan angka rasio 96,40, yang mengindikasikan jumlah perempuan jauh melampaui laki-laki di wilayah tersebut.

Pergeseran dominasi jumlah penduduk ke arah perempuan ini membawa dampak turunan yang signifikan baik secara sosial maupun ekonomi:

1. Dampak Ekonomi: Peningkatan jumlah perempuan berpotensi mendorong partisipasi angkatan kerja wanita yang lebih besar. Hal ini menjadi peluang untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan kesetaraan pendapatan keluarga.
2. Dampak Sosial: Perubahan ini dapat mengubah dinamika peran dalam keluarga dan masyarakat, yang menuntut adanya kebijakan yang lebih inklusif untuk menjamin kesetaraan gender dan akses layanan publik yang setara bagi perempuan.

Data lengkap mengenai perbandingan rasio jenis kelamin di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-
2024

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	103,00	103,10	101,09	101,62
2	Tutur	101,78	101,72	100,76	101,09
3	Puspo	99,06	99,10	98,51	99,49
4	Tosari	99,47	99,29	99,36	99,78
5	Lumbang	98,90	98,90	98,07	98,35
6	Pasrepan	97,32	97,35	96,82	96,89
7	Kejayan	96,96	97,15	96,52	96,62
8	Wonorejo	97,77	97,87	97,28	97,32
9	Purwosari	101,45	101,47	100,93	100,88
10	Prigen	102,20	102,14	101,73	101,78
11	Sukorejo	99,43	99,32	99,23	99,55
12	Pandaan	100,28	100,32	100,30	100,29
13	Gempol	101,41	101,30	101,20	101,11
14	Beji	101,09	101,07	100,38	100,55
15	Bangil	99,80	99,63	99,38	99,32
16	Rembang	97,23	97,20	96,54	96,75
17	Kraton	103,06	102,88	100,09	100,08
18	Pohjentrek	102,27	102,25	101,49	101,26
19	Gondangwetan	102,31	102,62	100,91	100,89
20	Rejoso	101,89	101,83	101,63	101,65
21	Winongan	99,40	99,30	99,47	99,30
22	Grati	99,09	98,99	97,98	98,02
23	Lekok	98,37	98,49	97,80	98,24
24	Nguling	96,40	96,33	96,42	96,40
Kabupaten Pasuruan		100,13	100,11	99,45	99,56

Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

D. Komposisi Penduduk berdasarkan Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan merupakan parameter fundamental untuk mengukur dinamika ekonomi dan produktivitas daerah. Berdasarkan data periode 2021-2024, struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pemulihan dan penguatan yang positif.

Secara kuantitas, jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, bergerak dari 893.726 jiwa pada tahun 2021 menjadi 978.581 jiwa pada tahun 2024. Tren kenaikan ini berbanding terbalik dengan kelompok Bukan Angkatan Kerja (seperti mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya) yang terus mengalami penurunan dari 401.053 jiwa (2021)

menjadi 320.809 jiwa (2024). Pergeseran ini mengindikasikan semakin banyaknya penduduk usia produktif yang beralih status untuk aktif masuk ke pasar kerja.

Meskipun jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas sempat mengalami fluktuasi berupa penurunan pada tahun 2023 menjadi 1.285.630 jiwa, namun indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) justru menunjukkan tren positif yang terus menanjak, mencapai 71,31% pada tahun 2024. Kenaikan TPAK ini merefleksikan tingginya semangat dan ketersediaan penduduk untuk bekerja.

Di sisi lain, keberhasilan penyerapan tenaga kerja tecermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang signifikan, dari 6,03% pada tahun 2021 turun menjadi 5,02% pada tahun 2024. Hal ini didorong oleh kenaikan jumlah penduduk yang bekerja yang mencapai 929.468 jiwa pada tahun 2024, sementara jumlah pengangguran berhasil ditekan menjadi 49.113 jiwa. Rincian indikator makro ketenagakerjaan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.10 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja	Jiwa	893726	916175	915507	978581
	Bekerja	Jiwa	839861	862062	865336	929468
	Pengangguran	Jiwa	53865	54113	50171	49113
2	Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	401053	389023	370123	320809
	Sekolah	Jiwa	80310	70415	82044	78547
	Mengurus Rumah Tangga	Jiwa	247535	258013	237580	201369
	Lainnya	Jiwa	73208	60595	50499	40893
3	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Jiwa	1294779	1305198	1285630	1299390
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,03	70,19	71,21	71,31
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,03	5,91	5,48	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Ditinjau dari jenis pekerjaannya, struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan terlihat didominasi oleh sektor formal dan industri. Berdasarkan Tabel tersebut, mayoritas penduduk Kabupaten Pasuruan bekerja sebagai Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honorar, dengan jumlah mencapai 359.929 jiwa pada tahun 2024. Dominasi ini selaras dengan karakteristik wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Sektor pertanian juga masih memegang peranan penting, terlihat dari jumlah Petani/Peternak/Nelayan yang stabil di angka 189.490 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, jenis pekerjaan dengan jumlah paling sedikit tercatat pada profesi Pembantu Rumah Tangga yang hanya berjumlah 626 jiwa pada tahun 2024.

Secara implisit, komposisi struktur pekerjaan tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan ekonomi Kabupaten Pasuruan yang cukup tinggi terhadap sektor industri dan pertanian sebagai penopang utama penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini mencerminkan karakter ekonomi yang relatif produktif, namun sekaligus menuntut perhatian pada aspek perlindungan tenaga kerja, stabilitas pendapatan, serta keberlanjutan sektor-sektor dominan tersebut agar ketahanan ekonomi daerah tetap terjaga dalam jangka panjang.

Data lengkap mengenai sebaran jenis pekerjaan penduduk dapat dilihat pada kelanjutan tabel berikut:

Tabel 2.11 Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	2021	2022	2023	2024
1	Belum/Tidak Bekerja	366672	378282	391685	397661
2	Mengurus Rumah Tangga	230025	238608	246299	249523
3	Pelajar/Mahasiswa	235356	224234	213833	208582
4	PNS/TNI/Polri/Pensiunan	16834	16664	16565	16465
5	Petani/Peternak/Nelayan	189977	189391	189410	189490
6	Buruh Tani/Ternak/Nelayan	20114	20111	21479	21818
7	Perdagangan/Industri/Konstruksi/Transportasi	1862	1814	1844	1839
8	Buruh Harian Lepas	8948	9122	11640	12448
9	Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honororer	351171	357574	359011	359929
10	Guru/Dosen	11896	12306	12524	12693
11	Pembantu Rumah Tangga	638	622	625	626
12	Tukang Batu/Kayu	2149	2184	2650	2730
13	Pedagang/Wiraswasta	157972	159497	154107	161038
14	Kepala/Perangkat Desa	1186	1152	1106	1089
15	Lainnya	7123	4629	11244	4807

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025 (Data diolah)

E. Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk merupakan indikator fundamental dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus cerminan kualitas tenaga kerja di suatu wilayah.

Berdasarkan data runtun waktu tahun 2021-2024, profil pendidikan penduduk Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola distribusi yang mengerucut pada pendidikan dasar.

Secara kuantitas, penduduk dengan kualifikasi pendidikan Tamat SD/ sederajat masih mendominasi struktur demografi pendidikan, dengan proporsi mencapai 30,33% atau sebanyak 497.614 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, jenjang pendidikan tertinggi yakni S2/S3 memiliki jumlah populasi paling sedikit, yakni hanya 2.122 jiwa (0,13%). Ketimpangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan daya saing daerah di era ekonomi berbasis pengetahuan.

Meskipun demikian, terdapat pergeseran tren yang positif jika dilihat dari kontribusi per jenjang pendidikan. Kelompok penduduk dengan pendidikan rendah, khususnya yang Belum Tamat SD/ sederajat dan Tamat SD/ sederajat, menunjukkan tren penurunan persentase dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan akses pendidikan dasar dan keberhasilan program wajib belajar.

Di sisi lain, terjadi peningkatan yang menggembirakan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Penduduk yang menamatkan pendidikan SLTA/ sederajat mengalami kenaikan konsisten hingga mencapai 278.598 jiwa pada tahun 2024. Tren kenaikan serupa juga terjadi pada lulusan pendidikan tinggi (D1-D3, D4/S1, hingga S2/S3), yang menandakan semakin membaiknya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi pendidikan tinggi. Namun, perlu menjadi catatan khusus bahwa kelompok Tidak/ Belum Sekolah juga mengalami peningkatan angka yang cukup signifikan, yang kemungkinan besar berkorelasi dengan tingginya angka kelahiran (penduduk usia prasekolah) sebagaimana terlihat pada piramida penduduk ekspansif.

Rincian lengkap mengenai perkembangan komposisi pendidikan penduduk ini dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 2.12 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	2021 Jiwa	2022 Jiwa	2023 Jiwa	2024 Jiwa
1	Tidak/belum sekolah	324914	341313	357417	364634
2	Belum tamat SD/ sederajat	244233	235317	229615	226048
3	Tamat SD/ sederajat	505584	501397	498965	497614
4	Tamat SLTP/ sederajat	217145	216089	216327	217241
5	Tamat SLTA/ sederajat	260185	269151	276243	278598

No	Pendidikan	2021 Jiwa	2022 Jiwa	2023 Jiwa	2024 Jiwa
6	D1/D2/D3	9614	9871	10118	10237
7	D4/S1	38552	41085	43275	44244
8	S2/S3	1825	1967	2062	2122
Total		1602052	1616190	1634022	1640738

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025, diolah

Tabel 2.13 Presentase Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
1	Tidak/belum sekolah	20,28	21,12	21,87	22,22
2	Belum tamat				
	SD/ sederajat	15,25	14,56	14,05	13,78
3	Tamat SD/ sederajat	31,56	31,02	30,54	30,33
4	Tamat				
	SLTP/ sederajat	13,55	13,37	13,24	13,24
5	Tamat				
	SLTA/ sederajat	16,24	16,65	16,91	16,98
6	D1/D2/D3	0,6	0,61	0,62	0,62
7	D4/S1	2,41	2,54	2,65	2,7
8	S2/S3	0,11	0,12	0,13	0,13
Total		100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025, diolah

F. Komposisi Penduduk berdasarkan Agama dan Kepercayaan yang Dianut

Data mengenai komposisi agama dan kepercayaan merupakan indikator sosial yang penting untuk memetakan karakteristik sosiologis masyarakat serta merawat kerukunan antarumat beragama. Berdasarkan data runtun waktu tahun 2021-2024, struktur demografi religius di Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola yang sangat stabil dengan dominasi mayoritas yang jelas.

Penganut agama Islam merupakan kelompok terbesar secara mutlak. Pada tahun 2024, jumlah penduduk muslim tercatat sebanyak 1.616.155 jiwa, yang merepresentasikan 98,50% dari total populasi. Angka ini menunjukkan peningkatan persentase yang perlahan namun konsisten dibandingkan tahun 2021 yang berada di

angka 98,45%. Dominasi ini menegaskan identitas Kabupaten Pasuruan sebagai wilayah dengan basis komunitas muslim yang sangat kuat.

Di sisi lain, keberagaman tetap terlihat dengan keberadaan pemeluk agama lain. Secara statistik, Hindu menempati urutan kedua terbanyak dengan jumlah 14.999 jiwa (0,91%) pada tahun 2024, diikuti oleh penganut Kristen sebanyak 6.863 jiwa (0,42%) dan Katholik sebanyak 2.362 jiwa (0,14%).

Sementara itu, kelompok dengan jumlah penganut paling sedikit adalah agama Konghucu, yang pada tahun 2024 tercatat hanya berjumlah 17 jiwa (0,001%), serta penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berjumlah 23 jiwa. Meskipun proporsinya kecil, keberadaan berbagai kelompok agama ini menandakan adanya heterogenitas yang terjaga dalam harmoni sosial di Kabupaten Pasuruan.

Rincian lengkap statistik penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14 Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

No	Agama dan Kepercayaan	2021 Jiwa	2022 Jiwa	2023 Jiwa	2024 Jiwa
1	Islam	1580238	1591629	1609458	1616155
2	Kristen	6974	6883	6885	6863
3	Katholik	2430	2402	2377	2362
4	Hindu	14991	14891	14937	14999
5	Budha	367	351	326	319
6	Konghuchu	11	11	15	17
7	Kepercayaan	26	23	24	23
Total		1605037	1616190	1634022	1640738

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025, diolah

Tabel 2.15 Presentase Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

No	Agama dan Kepercayaan	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
1	Islam	98,455	98,48	98,497	98,501
2	Kristen	0,435	0,426	0,421	0,418
3	Katholik	0,151	0,149	0,145	0,144
4	Hindu	0,934	0,921	0,914	0,914

No	Agama dan Kepercayaan	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
5	Budha	0,023	0,022	0,02	0,019
6	Konghuchu	0,001	0,001	0,001	0,001
7	Kepercayaan	0,002	0,001	0,001	0,001
Total		100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025, diolah

G. Proyeksi Demografi

Proyeksi penduduk merupakan instrumen perencanaan strategis yang dibangun melalui perhitungan ilmiah, dengan mempertimbangkan asumsi dinamika komponen pertumbuhan penduduk yakni fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan). Keakuratan estimasi jumlah dan struktur penduduk untuk lima tahun mendatang menjadi basis fundamental bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang presisi dan antisipatif.

Pemanfaatan data proyeksi demografi ini memiliki urgensi yang mencakup berbagai dimensi pembangunan strategis:

1. Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah: Data ini menjadi acuan dalam menghitung beban kebutuhan dasar di masa depan, memastikan ketersediaan infrastruktur vital seperti jaringan jalan, pasokan listrik, dan akses air bersih mampu mengimbangi laju pertumbuhan populasi.
2. Optimalisasi Layanan Publik: Estimasi jumlah penduduk usia sekolah dan kelompok rentan memungkinkan pemerintah merencanakan kapasitas fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai.
3. Ekonomi dan Kesejahteraan: Proyeksi ini krusial untuk memetakan kebutuhan perumahan (*housing backlog*), menyiapkan strategi penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, serta merancang kebijakan ekonomi yang efektif.
4. Keberlanjutan Lingkungan: Data ini membantu dalam pengelolaan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung lingkungan, serta memperkuat kesiapsiagaan dalam manajemen bencana berbasis kepadatan wilayah.

Dengan demikian, proyeksi penduduk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berjalan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga berkelanjutan (*sustainable*) bagi generasi mendatang.

1. Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan hasil pemodelan demografi untuk periode jangka menengah (2025-2030), estimasi jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meskipun laju pertumbuhannya cenderung melambat. Data ini krusial sebagai landasan alokasi sumber daya daerah agar pembangunan dapat berjalan efektif.

Mengacu pada Tabel tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan dari 1.669,40 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 1.721,87 ribu jiwa pada tahun 2030. Kenaikan populasi ini secara langsung berdampak pada tingkat kepadatan penduduk yang diprediksi akan meningkat dari 1.132,55 jiwa/km² di tahun 2025 hingga mencapai angka di kisaran 1.161 jiwa/km² menjelang tahun 2030. Peningkatan densitas ini menuntut perhatian khusus pada penataan ruang dan penyediaan fasilitas publik.

Menariknya, struktur komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan pergeseran tren. Jika pada tahun 2025 rasio jenis kelamin diperkirakan masih seimbang di angka 100,00 (jumlah laki-laki dan perempuan setara), maka pada tahun-tahun berikutnya jumlah perempuan diproyeksikan akan mulai melampaui jumlah laki-laki. Hal ini terlihat dari penurunan angka rasio jenis kelamin (sex ratio) secara bertahap menjadi 99,54 pada tahun 2030.

Selain itu, terdapat indikasi perlambatan laju pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan. Laju pertumbuhan yang berada di angka 0,73% pada tahun 2025 diproyeksikan akan melandai menjadi 0,47% pada tahun 2030. Penurunan laju pertumbuhan ini dapat menjadi indikator keberhasilan program pengendalian penduduk atau perubahan pola fertilitas masyarakat.

Rincian lengkap data proyeksi jumlah, komposisi gender, dan kepadatan penduduk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16 Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2025-2030

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	1669,4	1681,02	1692,08	1702,57	1712,51	1721,87
Laki-Laki (Ribu Jiwa)	834,72	840,21	845,38	850,23	854,76	858,96
Perempuan (Ribu Jiwa)	834,68	840,82	846,7	852,34	857,74	862,91

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laju Pertumbuhan (%)	0,73	0,7	0,66	0,62	0,58	0,47
Rasio Jenis Kelamin (%)	100	99,93	99,84	99,75	99,65	99,54
Kepadatan (Jiwa/Km2)	1132,55	1140,43	1147,94	1155,05	1161,8	1153,05

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan,
2024, diolah

2. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pemetaan proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur memegang peranan vital dalam perencanaan pembangunan sektoral. Data ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kebutuhan spesifik di masa depan, mulai dari penyediaan sarana pendidikan dasar, kesiapan lapangan kerja, hingga layanan kesehatan geriatri. Berdasarkan proyeksi tahun 2025-2030, struktur umur penduduk Kabupaten Pasuruan menunjukkan adanya transisi demografi yang signifikan.

Mengacu pada Tabel tersebut, terlihat tren penurunan yang konsisten pada kelompok penduduk usia dini dan sekolah. Kelompok umur 0-4 tahun diproyeksikan menurun dari 116,68 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 111,48 ribu jiwa pada tahun 2030. Penurunan serupa juga terjadi pada kelompok umur 5-14 tahun. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program pengendalian kelahiran serta perubahan pola fertilitas di masyarakat, yang di satu sisi akan meringankan beban ketergantungan usia muda (young dependency ratio).

Sebaliknya, terjadi lonjakan yang sangat signifikan pada kelompok penduduk lanjut usia. Kelompok umur 60-64 tahun diprediksi meningkat tajam dari 83,06 ribu jiwa (2025) menjadi 96,33 ribu jiwa (2030). Kenaikan yang lebih dramatis terlihat pada kelompok lansia tua (75+ tahun), yang melonjak dari 36,72 ribu jiwa menjadi 52,88 ribu jiwa pada akhir periode proyeksi.

Fenomena ini menandakan bahwa Kabupaten Pasuruan sedang bergerak menuju struktur penduduk tua (aging population). Pergeseran ini menuntut adanya reorientasi kebijakan, di mana fokus pembangunan ke depan tidak hanya pada penciptaan lapangan kerja bagi usia produktif, tetapi juga perluasan akses perlindungan sosial dan layanan kesehatan jangka panjang yang ramah lansia.

Rincian lengkap proyeksi penduduk per kelompok umur dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 2.17 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	116,68	115,51	114,41	113,36	112,38	111,48
5-9	119,32	118,11	116,66	115,32	114,72	116,14
10-14	122,46	122,97	123,41	123,47	122,45	119,01
15-19	119,49	119,84	120,33	120,87	121,41	121,95
20-24	120,88	119,94	119,22	118,74	118,53	118,59
25-29	126,64	125,25	123,77	122,29	120,93	119,79
30-34	130,29	129,64	128,85	127,91	126,82	125,57
35-39	129,71	130,16	130,27	130,09	129,71	129,19
40-44	123,59	124,11	125,14	126,43	127,64	128,5
45-49	123,63	123,93	123,51	122,74	122,13	122,03
50-54	111,75	113,7	115,96	118,23	120,08	121,22
55-59	101,45	103,18	104,5	105,61	106,83	108,34
60-64	83,06	85,88	88,77	91,61	94,16	96,33
65-69	63,4	66,17	68,73	71,14	73,57	76,1
70-74	40,34	43,18	46,14	49,14	52,04	54,75
75+	36,72	39,47	42,44	45,64	49,12	52,88
Jumlah	1669,4	1681,02	1692,08	1702,57	1712,51	1721,87

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2024, diolah

3. Proyeksi Penduduk Usia Produktif, Penduduk Usia Lanjut, Angka Ketergantungan, dan Bonus Demografi

Analisis terhadap struktur umur penduduk khususnya perbandingan antara kelompok usia produktif dan non-produktif merupakan landasan vital dalam merancang kebijakan ekonomi makro daerah. Berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2030, Kabupaten Pasuruan diprediksi akan mengalami dinamika demografi yang menuntut adaptasi kebijakan yang cepat, terutama terkait pemanfaatan bonus demografi dan kesiapan menghadapi penuaan penduduk.

Secara umum, penduduk Kabupaten Pasuruan diprediksi menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 0,66%. Namun, pergeseran struktur demografis yang terjadi di dalamnya memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang di masa depan.

Pertama, terkait Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun). Kabupaten Pasuruan masih berada dalam fase Bonus Demografi yang optimal. Hal ini terlihat dari proporsi penduduk usia produktif yang sangat dominan, yakni mencapai 70,11% pada tahun 2025. Meskipun diproyeksikan mengalami fluktuasi dan sedikit penurunan menjadi 69,20% pada tahun 2030, angka ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk masih berada pada usia kerja yang potensial untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

Kedua, terjadi tren penurunan pada Penduduk Usia Muda (0-14 tahun). Persentase kelompok ini diproyeksikan menyusut secara bertahap dari 21,47% pada tahun 2025 menjadi 20,13% pada tahun 2030. Penurunan ini mengindikasikan bahwa beban tanggungan dari kelompok usia muda semakin berkurang seiring dengan keberhasilan pengendalian kelahiran.

Ketiga, tantangan utama muncul dari lonjakan Penduduk Usia Lanjut (65 tahun ke atas). Data menunjukkan percepatan pertumbuhan populasi lansia yang signifikan, bergerak dari 8,41% pada tahun 2025 hingga menembus angka dua digit menjadi 10,67% pada tahun 2030. Kenaikan proporsi ini menandakan bahwa Kabupaten Pasuruan mulai bertransisi menuju struktur penduduk tua (aging population), yang membawa konsekuensi pada perlunya peningkatan layanan kesehatan geriatri dan sistem jaminan sosial yang lebih inklusif.

Implikasi dari kombinasi tren di atas bermuara pada Angka Ketergantungan (Dependency Ratio). Meskipun jumlah penduduk usia muda menurun, pesatnya pertumbuhan lansia menyebabkan beban ketergantungan penduduk secara total justru mengalami peningkatan. Angka ketergantungan diproyeksikan naik dari 42,62 pada tahun 2025 menjadi 44,51 pada tahun 2030. Secara statistik, angka 44,51 ini bermakna bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Pasuruan menanggung beban ekonomi sekitar 45 orang penduduk non-produktif (anak-anak dan lansia). Tren peningkatan beban ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk segera mengoptimalkan produktivitas tenaga kerja sebelum beban demografi menjadi semakin berat di masa depan.

2.8. Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi demografi untuk periode tahun 2025 hingga 2030 memberikan gambaran yang sangat krusial dan mendalam mengenai peta jalan pergeseran beban ekonomi serta transformasi struktur tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan. Secara agregat, jumlah penduduk diproyeksikan akan terus tumbuh secara stabil dengan laju rata-rata pertumbuhan sebesar 0,66% per tahun. Namun, di balik angka pertumbuhan kuantitatif

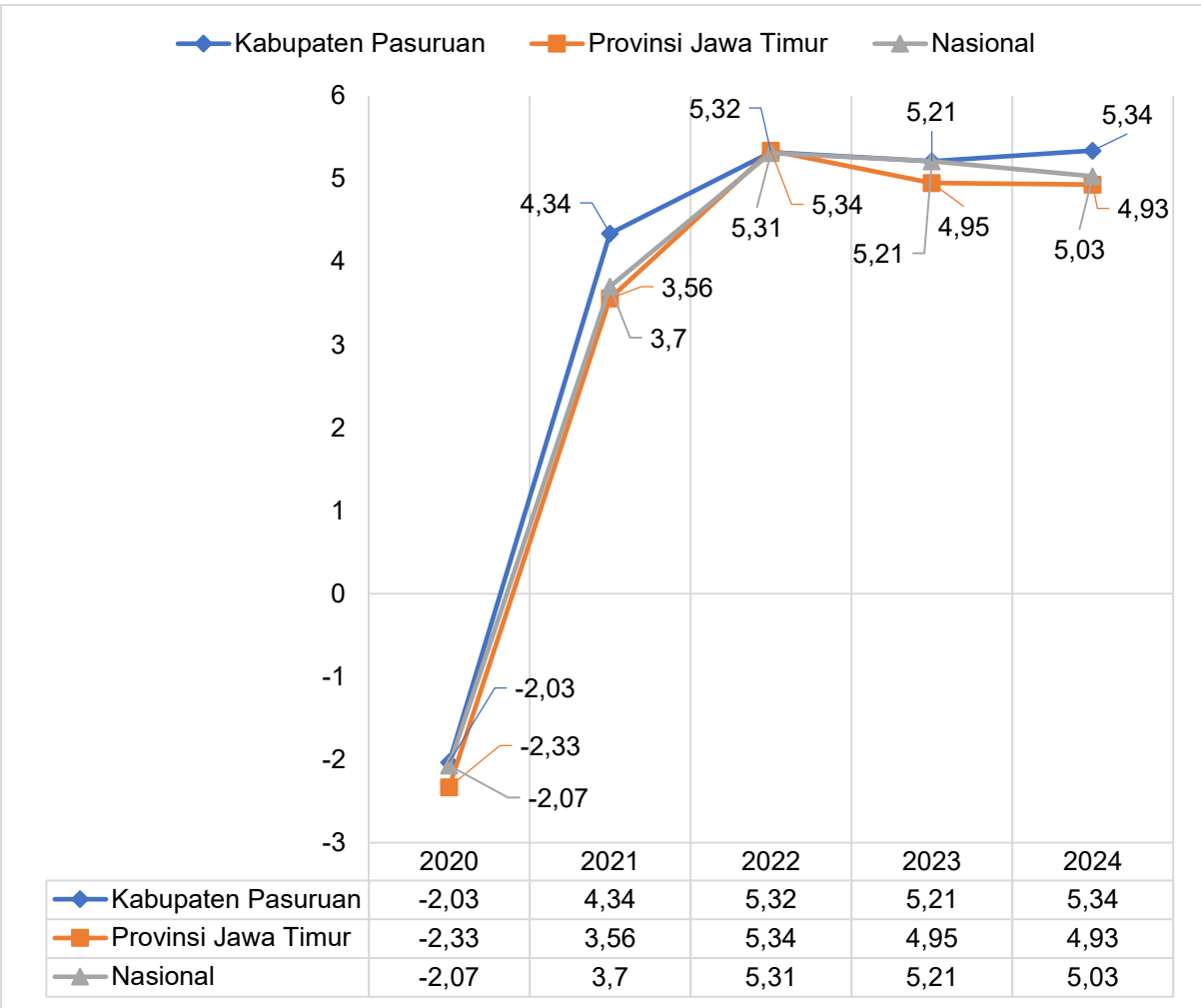
yang terlihat moderat dan terkendali ini, sesungguhnya sedang terjadi perubahan fundamental dan dinamis pada komposisi internal kelompok umur penduduk. Pergeseran struktur ini membawa implikasi serius yang menuntut perhatian khusus serta strategi adaptif dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah maupun panjang.

Ditinjau dari sisi potensi modal manusia dan ekonomi, Kabupaten Pasuruan saat ini masih berada dalam koridor emas fase Bonus Demografi. Kondisi menguntungkan ini ditandai dengan dominasi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang persentasenya sangat masif dibandingkan kelompok usia lainnya. Pada tahun 2025, proporsi kelompok produktif ini tercatat mencapai angka dominan sebesar 70,11% dari total populasi. Meskipun diprediksi akan mengalami sedikit koreksi penurunan secara alami menjadi 69,20% pada tahun 2030, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa ketersediaan suplai tenaga kerja di daerah ini masih sangat melimpah. Cadangan sumber daya manusia ini merupakan aset vital yang siap digerakkan untuk menopang percepatan roda aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah.

Di sisi lain, dinamika yang sangat kontras dan menarik untuk dicermati terjadi pada kedua kutub kelompok penduduk non-produktif. Pada satu sisi, kelompok penduduk usia muda (0-14 tahun) diproyeksikan terus mengalami tren penurunan proporsi, yakni bergerak turun dari 21,47% pada tahun 2025 menjadi 20,13% pada tahun 2030. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai indikator keberhasilan program pengendalian fertilitas dan keluarga berencana. Namun sebaliknya, fenomena penuaan penduduk (aging population) justru mulai terlihat nyata dan signifikan. Proporsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) diprediksi akan melonjak cukup tajam dari 8,41% pada tahun 2025 menjadi 10,67% pada tahun 2030. Kenaikan yang menembus ambang batas psikologis 10% ini menjadi sinyal peringatan dini yang kuat bagi pemerintah daerah untuk segera berbenah, terutama dalam memperkuat infrastruktur layanan kesehatan geriatri yang spesifik serta menyiapkan sistem jaminan sosial dan perlindungan lansia yang lebih komprehensif.

Akumulasi dari berbagai perubahan struktur umur tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan Angka Ketergantungan (Dependency Ratio). Meskipun beban tanggungan dari kelompok anak-anak secara statistik berkurang, pesatnya laju pertumbuhan jumlah lansia menyebabkan beban ekonomi total yang harus dipikul oleh penduduk produktif justru mengalami peningkatan. Angka ketergantungan ini diproyeksikan naik dari posisi 42,62 pada tahun 2025 menjadi 44,51 pada tahun 2030. Secara riil dan sederhana, angka rasio 44,51 pada tahun 2030 mengandung makna bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Pasuruan harus

menanggung beban ekonomi hidup untuk sekitar 45 orang penduduk non-produktif (yang merupakan gabungan antara anak-anak dan lansia). Tren peningkatan rasio ketergantungan ini menuntut adanya upaya strategis yang mendesak untuk memaksimalkan produktivitas dan kualitas angkatan kerja yang ada saat ini, sebelum beban demografi menjadi semakin berat dan kompleks di masa depan.



Gambar 2.9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

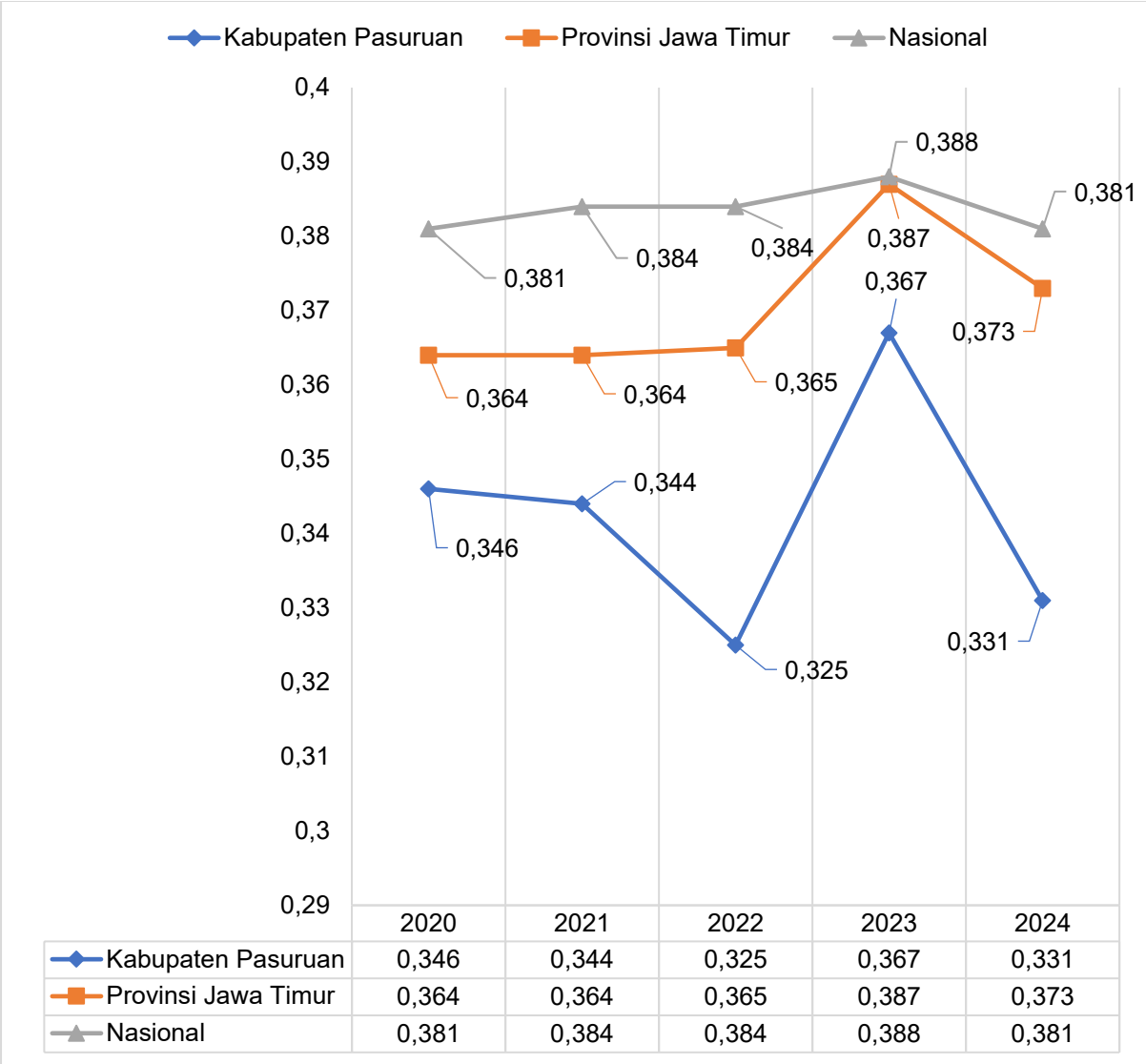
B. Indeks/Rasio Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator makro ekonomi utama yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan pengeluaran atau kesenjangan pendapatan antar penduduk di suatu wilayah. Nilai Indeks Gini bergerak dalam rentang 0 hingga 1. Apabila koefisien bernilai 0, hal itu menandakan pemerataan sempurna, sedangkan nilai 1 menandakan ketimpangan sempurna. Secara umum, semakin rendah nilai Indeks Gini, semakin merata distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Berdasarkan standar internasional, angka Indeks Gini yang berkisar antara 0,3 hingga 0,5 dikategorikan sebagai tingkat ketimpangan moderat (sedang).

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, dinamika ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola yang fluktuatif namun tetap terkendali dalam kategori moderat. Pada paruh pertama periode pengamatan, terjadi perbaikan pemerataan yang signifikan di mana Indeks Gini menyentuh titik terendah (paling merata) pada tahun 2022 dengan angka 0,325. Meskipun sempat mengalami lonjakan ketimpangan pada tahun 2023 menjadi 0,367, kondisi ini berhasil dipulihkan kembali pada tahun 2024 dengan penurunan angka menjadi 0,331. Penurunan kembali angka Gini Ratio pada akhir periode ini mengindikasikan perbaikan distribusi pendapatan yang positif, di mana kue pembangunan dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat.

Dalam konteks komparasi kewilayahan, capaian pemerataan ekonomi Kabupaten Pasuruan menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan rata-rata regional maupun nasional. Data menunjukkan konsistensi di mana angka Indeks Gini Kabupaten Pasuruan selalu lebih rendah (lebih merata) dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional di setiap tahun pengamatan. Sebagai ilustrasi nyata pada tahun 2024, saat ketimpangan Nasional berada di angka 0,381 dan Jawa Timur di angka 0,373, Kabupaten Pasuruan mampu menekan ketimpangan jauh lebih rendah di angka 0,331. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan memiliki kualitas yang baik karena bersifat inklusif (merata) dan kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain.

Data lengkap mengenai perbandingan Indeks Gini tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 2.10 Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

C. Angka Kemiskinan

Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), pengentasan kemiskinan (*No Poverty*) menempati Tujuan Pertama sebagai agenda prioritas global. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan, yang diukur melalui pendekatan pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan sendiri merupakan nilai rupiah minimum yang diperlukan seseorang untuk hidup layak, yang terdiri dari komponen makanan (setara 2.100 kilokalori) dan komponen non-makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan capaian yang positif dan kompetitif.

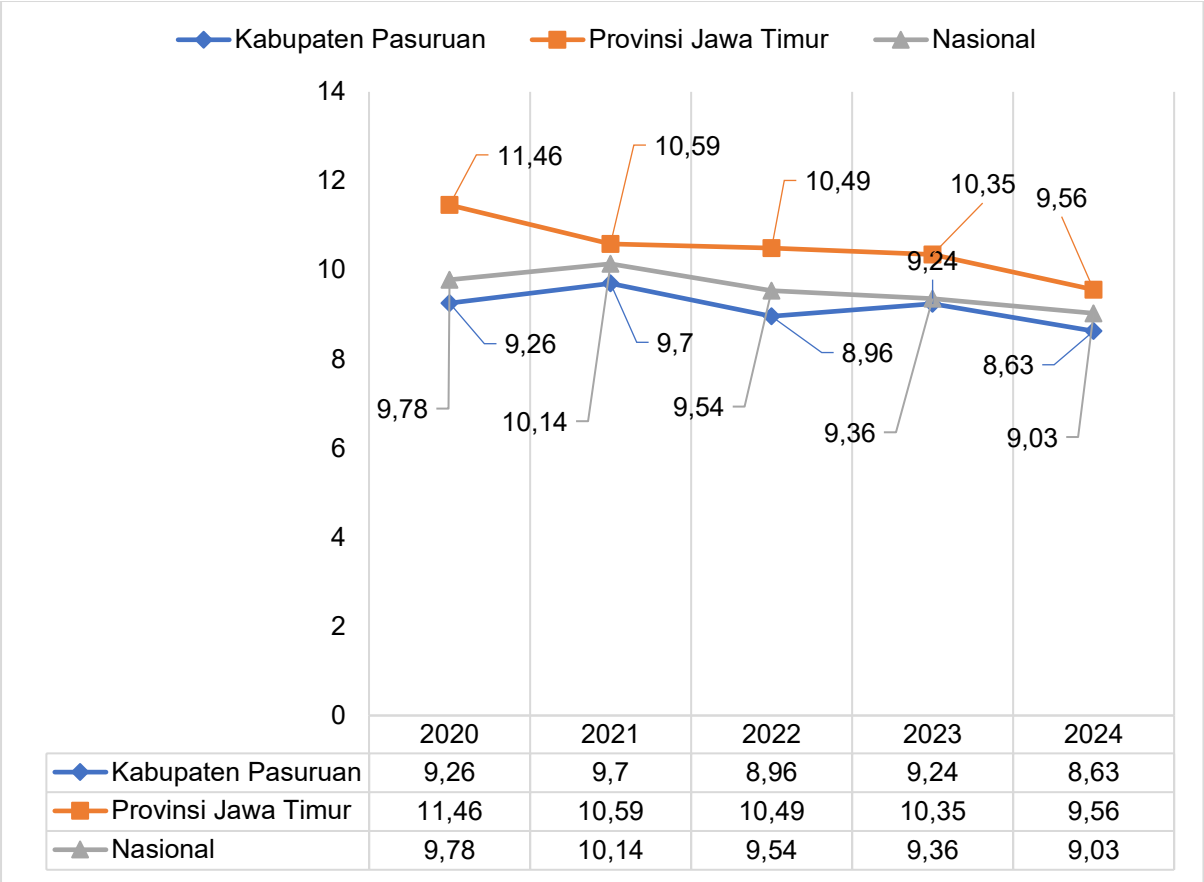
Secara umum, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan selalu berada di bawah (lebih baik) dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Pasuruan tercatat sebesar 8,63%, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Jawa Timur (9,56%) dan Nasional (9,03%). Hal ini mengindikasikan bahwa program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di daerah berjalan cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat rentan.

Selain melihat persentase (Head Count Index), kualitas kemiskinan juga diukur melalui Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,22 (2023) menjadi 1,09 (2024). Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan, yang berarti beban pengeluaran mereka untuk keluar dari kemiskinan semakin ringan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami perbaikan, turun dari 0,26 (2023) menjadi 0,21 (2024). Penurunan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin mengecil (distribusi pengeluaran di kalangan warga miskin semakin merata).

Namun, tantangan terlihat pada kenaikan Garis Kemiskinan (GK) yang terus meningkat setiap tahunnya. GK naik dari Rp429.624 (2023) menjadi Rp450.088 per kapita/bulan (2024). Kenaikan standar biaya hidup ini menuntut adanya peningkatan pendapatan masyarakat yang lebih progresif agar penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan (*near poor*) tidak jatuh kembali ke jurang kemiskinan akibat inflasi atau kenaikan harga kebutuhan pokok.

Berikut adalah data rincian indikator kemiskinan di Kabupaten Pasuruan serta tabel perbandingannya dengan tingkat Provinsi dan Nasional:



Gambar 2.11 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 2.18 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	151,43	159,78	148,62	154,09	144,84
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,26	9,7	8,96	9,24	8,63
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	355.299	368.686	394.016	429.624	450.088
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,15	1,17	1,29	1,22	1,09
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,23	0,24	0,29	0,26	0,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data pada kedua tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pasuruan berhasil memulihkan kondisi kesejahteraan masyarakat pasca-pandemi dengan capaian tahun 2024 yang sangat baik. Keberhasilan menekan angka kemiskinan hingga 8,63% (terendah dalam 5 tahun terakhir) yang dibarengi dengan penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah bersifat inklusif. Meskipun demikian, kenaikan standar Garis Kemiskinan harus terus diwaspadai sebagai sinyal perlunya pengendalian inflasi daerah yang efektif.

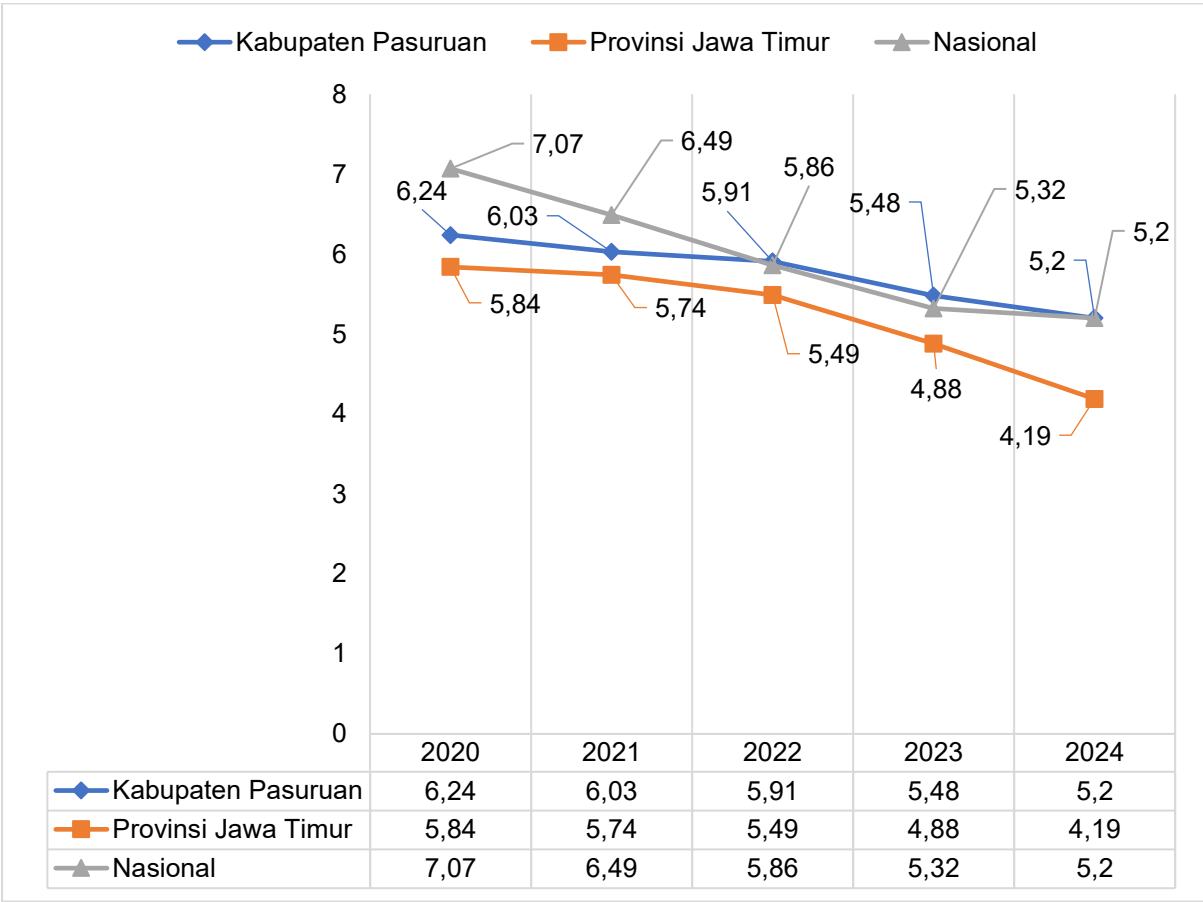
D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan proporsi jumlah pengangguran terhadap jumlah total angkatan kerja. Tingginya angka TPT biasanya dipicu oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan (permintaan tenaga kerja) dengan jumlah pencari kerja (penawaran tenaga kerja). Oleh karena itu, penurunan TPT menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bersandingan dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat sebagai strategi komprehensif penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pemulihan yang konsisten. TPT Kabupaten Pasuruan terus mengalami penurunan setiap tahunnya, bergerak dari angka 6,24% pada tahun 2020 menjadi 5,20% pada tahun 2024. Penurunan bertahap ini mengindikasikan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja di sektor riil dan efektivitas pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Namun, jika dilihat dari perspektif komparasi regional, Kabupaten Pasuruan masih menghadapi tantangan struktural. Data menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran di Kabupaten Pasuruan selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur di sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2024, saat Jawa Timur berhasil menekan pengangguran hingga angka 4,19%, Kabupaten Pasuruan masih berada di angka 5,20% (setara dengan angka Nasional). Kesenjangan ini menjadi sinyal bagi Pemerintah Daerah untuk lebih agresif dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan (skilling, reskilling, upskilling) agar kompetensi tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan industri, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru yang padat karya.

Rincian perkembangan data TPT dan perbandingannya dapat dilihat pada gambar bagan berikut:



Gambar 2.12 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar kerja di Kabupaten Pasuruan terus membaik yang ditandai dengan penurunan angka pengangguran secara berturut-turut selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, fakta bahwa angka TPT daerah masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur menuntut fokus kebijakan yang lebih tajam pada sisi *supply* (peningkatan *skill* SDM) dan sisi *demand* (investasi padat karya) untuk mengakselerasi penyerapan tenaga kerja di masa mendatang.

E. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur estimasi pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah dalam periode tertentu. Nilai ini diperoleh dari total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk. Secara teoritis, semakin tinggi angka PDRB per kapita, semakin tinggi pula tingkat kemakmuran atau standar hidup rata-rata penduduk di wilayah tersebut.

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kinerja PDRB per kapita Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren yang positif dan kompetitif. Secara nominal, nilai PDRB per kapita terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, dalam komparasi kewilayahan, capaian Kabupaten Pasuruan selama lima tahun terakhir selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Hal ini mengukuhkan posisi Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu penyangga ekonomi utama di Jawa Timur.

Namun, tingginya angka PDRB per kapita ini perlu dimaknai dengan cermat. Struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan didominasi oleh sektor industri pengolahan (kontribusi mencapai 60%) yang bertipologi padat modal. Kondisi ini menyebabkan perputaran nilai tambah ekonomi cenderung terkonsentrasi pada korporasi besar dan tidak serta-merta mencerminkan pendapatan riil yang diterima oleh setiap rumah tangga. Dengan kata lain, tingginya rata-rata tersebut "ditarik ke atas" oleh output industri besar, sementara masih terdapat kemungkinan kesenjangan pendapatan antar wilayah atau kelompok masyarakat. Oleh karena itu, angka ini lebih tepat dipandang sebagai indikator potensi ekonomi daerah ketimbang indikator tunggal kesejahteraan individu.

Dalam konstelasi regional Jawa Timur tahun 2024, Kabupaten Pasuruan menempati peringkat ke-5 tertinggi. Posisi ini berada di bawah Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, namun tetap berada jauh di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya. Fakta ini menegaskan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam pemerataan, skala ekonomi Kabupaten Pasuruan sangatlah masif.

Kabupaten Pasuruan masuk dalam jajaran "Top 5" ekonomi raksasa di Jawa Timur. Meskipun angka PDRB per kapita terlihat impresif, tantangan utama bagi pemerintah daerah adalah memastikan terjadinya pemerataan pembangunan. Fokus kebijakan tidak boleh hanya terpaku pada pertumbuhan angka rata-rata, melainkan harus diarahkan pada mekanisme redistribusi yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat menikmati kue pertumbuhan ekonomi tersebut, guna meminimalisir ketimpangan antara wilayah industri dan non-industri.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator strategis untuk mengukur keberhasilan upaya pembangunan kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat (diukur dari Angka Harapan Hidup), pengetahuan (diukur dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), serta standar hidup layak (diukur dari Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan).

Dalam melihat tren jangka panjang, data IPM Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi dua periode berdasarkan metodologi perhitungan, yaitu metode lama (SP2010) untuk tahun 2017-2021 dan metode baru (Long Form SP2020) untuk tahun 2022-2024. Berikut adalah perkembangan IPM periode pertama:

Tabel 2.19 Perkembangan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2021 (Metode SP2010)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
IPM	66,69	67,41	68,29	68,60	70,54
Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,90	70,17	70,17	70,23	70,25
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,05	12,30	12,31	12,41	12,58
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,82	6,38	7,11	7,40	7,41
Pengeluaran Per Kapita (Ribuan Rupiah)	-	-	10.381	10.164	10.297

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama periode 2017-2021, status pembangunan manusia di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan status dari kategori "Sedang" menjadi "Tinggi" (IPM $\geq$ 70) tepat pada tahun 2021 dengan nilai 70,54. Meskipun terjadi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan penurunan pada sisi ekonomi (Pengeluaran Per Kapita turun dari Rp10,38 juta menjadi Rp10,16 juta), nilai total IPM tetap tumbuh positif. Hal ini disebabkan oleh indikator kesehatan (Angka Harapan Hidup) dan pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) yang tetap menunjukkan tren kenaikan, membuktikan resiliensi sektor sosial dasar di tengah guncangan ekonomi.

Selanjutnya, mulai tahun 2022 perhitungan IPM menggunakan metode baru berbasis *Long Form* SP2020 yang memberikan potret kependudukan lebih akurat, khususnya pada indikator kematian dan umur harapan hidup.

Tabel 2.20 Perkembangan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024 (Metode Long Form SP2020)

Uraian	2022	2023	2024
IPM	71,29	71,91	72,36
Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,15	74,41	74,61
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,76	12,77	12,78
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,42	7,44	7,46
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	10.726	11.239	11.617

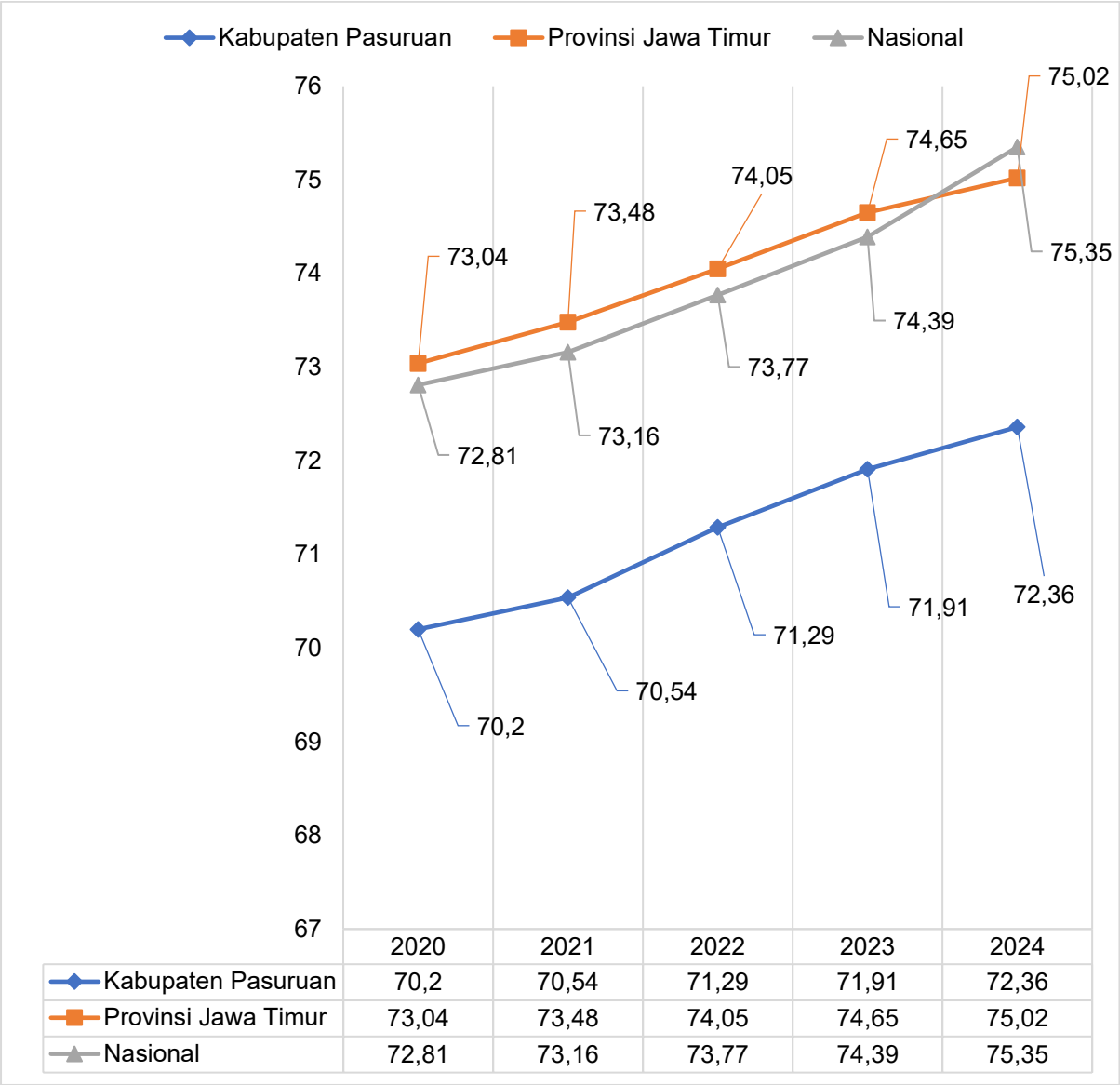
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Data yang dihasilkan melalui penerapan metode terbaru menunjukkan adanya lonjakan kualitas hidup masyarakat yang bersifat signifikan dan terukur. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan tercatat mencapai 72,36, yang menempatkan daerah ini pada kategori pembangunan manusia yang relatif baik dan mencerminkan keberhasilan akumulatif dari kebijakan di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Angka tersebut tidak sekadar menunjukkan peningkatan numerik, tetapi juga merepresentasikan perbaikan struktural dalam kualitas hidup penduduk secara menyeluruh.

Perubahan metodologi penghitungan memberikan dampak yang sangat nyata, terutama pada komponen Angka Harapan Hidup (AHH). Dengan metode terbaru, AHH Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 tercatat mencapai 74,61 tahun, jauh melampaui hasil perhitungan dengan metode sebelumnya yang hanya berada di kisaran 70 tahun. Selisih ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat, akses terhadap layanan medis, serta efektivitas intervensi kesehatan publik selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang substansial. Koreksi metodologis ini sekaligus memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi riil kesehatan penduduk.

Di sisi ekonomi, indikator Pengeluaran Per Kapita menunjukkan tren pemulihan yang konsisten dan berkelanjutan pasca-pandemi. Pada tahun 2024, nilai pengeluaran per kapita mencapai Rp11,617 juta per tahun, menandakan meningkatnya daya beli masyarakat serta mulai pulihnya aktivitas ekonomi rumah tangga. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan pendapatan, stabilitas konsumsi, dan kepercayaan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, data dalam tabel tersebut mengonfirmasi bahwa kualitas kesehatan, akses pendidikan, dan kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Pasuruan berada dalam lintasan pertumbuhan yang solid dan saling

memperkuat. Meskipun demikian, capaian positif ini tetap perlu ditempatkan dalam kerangka komparatif yang lebih luas, sehingga posisi Kabupaten Pasuruan dapat dievaluasi secara objektif melalui perbandingan dengan capaian regional pada wilayah sekitarnya.



Gambar 2.13 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

BAB III

KABUPATEN LAYAK ANAK

3.1. Kelembagaan

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki komitmen tinggi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Wujud utama komitmen tersebut termuat dalam bentuk kebijakan atau regulasi daerah. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan kelembagaan yang terstruktur, optimalisasi kebijakan yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, serta penyediaan perencanaan dan penganggaran yang memadai.

Pilar kelembagaan menjadi fondasi fundamental dalam upaya sistematis dan berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak. Komitmen tinggi ini tidak hanya bersifat normatif, namun diwujudkan secara konkret melalui kerangka regulasi yang kokoh, struktur organisasi yang fungsional hingga ke tingkat desa, serta sinergi pentahelix yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

A. Kerangka Regulasi sebagai Payung Hukum Utama

Wujud utama dari komitmen pemerintah daerah termanifestasi dalam bentuk kebijakan dan regulasi yang komprehensif. Kabupaten Pasuruan telah membangun landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa setiap program pemenuhan hak anak memiliki dasar yang jelas dan mengikat. Kerangka regulasi ini tidak hanya berfokus pada perlindungan anak secara spesifik, tetapi juga mencakup aspek-aspek pendukung yang menciptakan lingkungan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Beberapa produk hukum yang menjadi pilar utama antara lain:

1. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berfungsi sebagai kebijakan induk dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
2. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak, yang memberikan arahan teknis dan strategis dalam implementasi KLA.
3. Regulasi pendukung lainnya seperti Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas dan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perpustakaan, yang menjamin hak-hak spesifik anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus dan hak atas informasi serta literasi.

Komitmen ini terus diperkuat di tingkat legislatif, dibuktikan dengan sedang berjalannya proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Kabupaten Layak Anak yang diinisiasi oleh DPRD. Hal ini menandakan adanya kesadaran kolektif bahwa perlindungan anak adalah prioritas pembangunan daerah.

Keberadaan kerangka regulasi yang berlapis ini mencakup Perda induk (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) serta Perda pendukung yang spesifik (seperti Penyandang Disabilitas dan Perpustakaan) mengindikasikan sebuah pendekatan yang holistik. Ini bukan sekadar pemenuhan formalitas yuridis, melainkan sebuah arsitektur kebijakan yang dirancang secara sadar untuk memastikan bahwa pemenuhan hak-hak anak tidak terisolasi. Pendekatan ini mengintegrasikan hak anak ke dalam berbagai sektor layanan publik, yang secara langsung menjawab kompleksitas tantangan pembangunan manusia (IPM) dan demografi usia anak yang signifikan, sebagaimana telah dielaborasi pada BAB II.

B. Struktur Gugus Tugas yang Terorganisir dan Berjenjang

Untuk menerjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah membentuk struktur kelembagaan yang terorganisir dari tingkat kabupaten hingga ke akar rumput. Melalui SK Bupati Pasuruan Nomor 400.2.1/231/HK/424.013/2024, telah dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagai motor penggerak utama. Efektivitas gugus tugas ini dipastikan melalui struktur berjenjang yang menjangkau seluruh wilayah, terdiri dari 24 Gugus Tugas di tingkat Kecamatan dan 365 Gugus Tugas di tingkat Desa/Kelurahan .

Struktur ini didukung oleh lembaga teknis seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan dan penanganan kasus. Seluruh gerak langkah kelembagaan ini dipandu oleh dokumen perencanaan strategis, yaitu Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Tahun 2022-2026 dan dimonitor melalui Profil KLA yang diperbarui secara periodik.

Penetapan struktur gugus tugas yang menjangkau 24 Kecamatan dan 365 Desa/Kelurahan merupakan langkah strategis yang fundamental. Mengingat karakteristik geografis Kabupaten Pasuruan yang sangat beragam mencakup wilayah pesisir, dataran rendah industrial, hingga kawasan pegunungan sebagaimana diuraikan pada BAB II , model implementasi top-down terpusat dipastikan tidak akan efektif. Struktur yang berjenjang hingga ke tingkat desa ini memungkinkan terjadinya desentralisasi pelaksanaan program, adaptasi kebijakan yang responsif terhadap konteks lokal, serta percepatan identifikasi dan

intervensi terhadap anak-anak dalam kelompok rentan yang berada di wilayah dengan akses geografis yang menantang.

C. Dokumen Perencanaan sebagai Pemandu Arah Kebijakan

Seluruh gerak langkah kelembagaan KLA dipandu oleh dokumen perencanaan yang strategis dan terukur. Hal ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki tujuan yang jelas, target yang dapat dievaluasi, dan selaras dengan visi besar Kabupaten Layak Anak.



Gambar 3.1 Buku RAD KLA

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak Tahun 2022-2026 ini merupakan bukti konkret dari komitmen perencanaan jangka menengah. RAD berfungsi sebagai peta jalan strategis yang merinci program, kegiatan, target, serta Perangkat Daerah penanggung jawab untuk setiap klaster pemenuhan hak anak. Kehadiran dokumen ini menunjukkan bahwa implementasi KLA di Kabupaten Pasuruan tidak bersifat sporadis, melainkan terencana, sistematis, dan berkelanjutan.



Gambar 3.2 Buku Profil KLA

Profil Kabupaten Pasuruan Menuju Kabupaten Layak Anak adalah instrumen vital untuk monitoring dan evaluasi. Dokumen ini, yang diperbarui secara berkala seperti pada tahun 2024 ini, berfungsi untuk memotret kondisi terkini, mengukur capaian program terhadap indikator yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi. Dengan adanya profil ini,

pemerintah daerah memiliki basis data yang kuat untuk mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.



Gambar 3.3 Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA

Salah satu momen kunci dalam operasionalisasi KLA, yaitu Rapat Koordinasi Gugus Tugas dan Peningkatan Kapasitas melalui Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA). Visual ini menunjukkan bahwa komitmen kelembagaan tidak berhenti pada dokumen, tetapi dihidupkan melalui interaksi, sinergi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kegiatan seperti ini menjadi wadah untuk menyelaraskan persepsi, memecahkan masalah, dan memastikan semua anggota gugus tugas memiliki pemahaman yang sama dalam mengimplementasikan program di lapangan.

D. Partisipasi Anak sebagai Inti Perencanaan Pembangunan

Sejalan dengan semangat Konvensi Hak Anak, Kabupaten Pasuruan menempatkan partisipasi anak sebagai elemen sentral dalam siklus pembangunan. Keterlibatan Forum Anak tidak hanya bersifat seremonial, namun fungsional dan terlembaga. Dalam setiap proses penyusunan kebijakan, termasuk Ranperda KLA, Forum Anak secara konsisten dilibatkan untuk memberikan suara, perspektif, dan masukan.

Lebih dari itu, aspirasi anak telah terintegrasi ke dalam mekanisme perencanaan formal. Semua usulan yang lahir dari Forum Anak, baik yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan maupun kabupaten, dipastikan ditindaklanjuti oleh Bappelitbangda untuk kemudian didistribusikan menjadi sub-kegiatan di Perangkat Daerah terkait. Ini adalah bukti nyata bahwa suara anak didengar dan dihargai dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Pasuruan

E. Sinergi Pentahelix: Kolaborasi Lintas Sektor

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyadari bahwa mewujudkan KLA adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, dikembangkan model kolaborasi pentahelix yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai unsur masyarakat. Sinergi ini dilembagakan melalui penandatanganan kerja sama (MoU) dan diwujudkan dalam berbagai program nyata di lapangan:

1. Lembaga Masyarakat & Organisasi Internasional: Menjadi mitra strategis dalam edukasi dan kampanye, seperti kerja sama dengan Yayasan Plato Surabaya dan Fatayat dalam isu anti kekerasan, serta kolaborasi dengan UNICEF dalam penguatan kapasitas Forum Anak.
2. Dunia Usaha (CSR): Berkontribusi melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, contohnya PT Sorini Towa Berlian Corporindo yang membantu penanganan anak dengan Clubfoot (CTEV), serta PT. Charoen Pokphand dan PT. Nestle Indonesia yang mendukung percepatan penurunan stunting.
3. Akademisi: Perguruan tinggi seperti Universitas Merdeka Pasuruan berperan memberikan kajian dan sosialisasi berbasis keilmuan untuk penanganan kekerasan terhadap anak.
4. Aparat Penegak Hukum & TNI: BNN Kabupaten Pasuruan aktif dalam kampanye pencegahan narkoba di kalangan pelajar, sementara Kodim dan Polres terlibat dalam program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).
5. Media Massa: Berperan vital dalam menyebarkan komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang hak-hak anak kepada masyarakat luas melalui berbagai platform, termasuk media sosial pemerintah.



Gambar 3.4 Penandatanganan Kerjasama Pemerintah (MoU)

Keterlibatan aktif Dunia Usaha (CSR) dalam Sinergi Pentahelix memiliki bobot strategis yang sangat tinggi bagi Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana teridentifikasi dalam analisis makroekonomi di BAB II, struktur PDRB daerah ini didominasi secara

hegemonik oleh Sektor Industri Pengolahan (60,65%). Potensi ini mentransformasi peran CSR dari sekadar kontributor filantropis menjadi mitra pembangunan yang esensial. Keterlibatan perusahaan-perusahaan besar dalam penanganan stunting dan kesehatan anak menciptakan model simbiosis mutualisme, di mana pemerintah daerah memfasilitasi iklim investasi yang kondusif, sementara sektor industri berkontribusi secara signifikan terhadap keberlanjutan program sosial dan pemenuhan hak-hak anak.

3.2. Klaster 1: Hak Sipil dan Kebebasan

Hak Sipil dan Kebebasan merupakan fondasi dari seluruh hak anak, yang memastikan bahwa setiap anak diakui keberadaannya oleh negara, memiliki akses terhadap informasi yang layak, dan diberikan ruang untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pembangunan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menempatkan pemenuhan klaster ini sebagai prioritas utama, yang diwujudkan melalui terobosan layanan administrasi kependudukan, penyediaan fasilitas informasi yang ramah anak, serta pelembagaan partisipasi anak yang terstruktur.

A. Pemenuhan Hak Atas Identitas: Kepemilikan Akta Kelahiran

Kepemilikan akta kelahiran adalah hak pertama dan mendasar bagi setiap anak sebagai bukti legalitas dan pengakuan negara atas identitas mereka. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menunjukkan komitmen serius dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran, yang tercermin dari peningkatan cakupan secara signifikan. Tercatat, jumlah anak usia 0-18 tahun yang telah diregistrasi dan memiliki kutipan akta kelahiran meningkat dari 472.446 anak pada tahun 2023 menjadi 484.165 anak pada tahun 2024 .

Untuk mencapai target ini, telah dikembangkan berbagai inovasi layanan yang mendekatkan dan mempermudah akses bagi masyarakat di seluruh penjuru kabupaten.



Gambar 3.5 Inovasi Layanan e-PAKLADI

Program e-PAKLADI merupakan terobosan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memangkas birokrasi dan mempermudah pengurusan dokumen kependudukan, termasuk akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Keberhasilan program ini didukung oleh pembentukan 365 Pos Pelayanan yang tersebar di 365 Desa/Kelurahan, memastikan bahwa layanan tidak lagi terpusat di ibu kota kabupaten, melainkan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat di tingkat desa.

Inovasi e-PAKLADI, yang didukung oleh 365 Pos Pelayanan di tingkat Desa/Kelurahan, merupakan respons administratif yang sangat strategis terhadap tantangan geografis dan demografis Kabupaten Pasuruan yang telah diidentifikasi pada BAB II. Dengan luas wilayah 1.474,02 Km² yang mencakup 24 kecamatan dan topografi yang beragam, model layanan terpusat (centralized service) tidak lagi memadai. Desentralisasi layanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat desa ini secara fundamental memangkas hambatan aksesibilitas (biaya, waktu, dan jarak) bagi masyarakat di wilayah-wilayah terpencil. Ini adalah perwujudan nyata dari prinsip inklusivitas, yang memastikan bahwa hak dasar atas identitas hukum dapat dijangkau secara merata oleh setiap anak, terlepas dari lokasi geografis mereka.

B. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)

Menjamin hak anak atas informasi berarti menyediakan akses terhadap sumber pengetahuan yang aman, mendidik, dan sesuai dengan usia mereka. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan secara aktif mengembangkan berbagai program untuk menumbuhkan budaya literasi sejak dini, yang diatur dalam SK Kepala Dinas Nomor 041/124/424.088/2019.



Gambar 3.6 Ragam Kegiatan Informasi Layak Anak

Ragam kegiatan dalam penyediaan Informasi Layak Anak (ILA). Program-program seperti Perpustakaan Keliling yang menjangkau sekolah-sekolah di daerah pelosok, Storytelling (mendongeng) untuk anak usia dini, Pustaka

Jangkau Keluarga (PUJANGGA) , dan Pojok Baca Digital (Pocadi) adalah bukti nyata upaya pemerintah untuk membuat informasi dan pengetahuan dapat diakses dengan cara yang menyenangkan. Selain itu, program "Panggung Gembira Anak" di radio lokal memberikan ruang bagi anak untuk berekspresi sekaligus menjadi media informasi yang edukatif.

Pengembangan ragam fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) seperti Perpustakaan Keliling, Pujangga, dan Pocadi memiliki relevansi yang sangat tinggi bila dikaitkan dengan konteks pembangunan manusia di Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana dianalisis pada BAB II, terdapat kesenjangan signifikan antara Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mencapai 12,78 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih berada di angka 7,46 tahun . Program ILA ini berfungsi sebagai intervensi pendidikan non-formal yang krusial. Program-program ini berperan sebagai stimulan literasi di luar jam sekolah, memperkaya ekosistem pembelajaran anak, dan berpotensi menjadi salah satu instrumen untuk mengakselerasi peningkatan RLS secara jangka panjang dengan menumbuhkan minat baca sejak dini.

C. Pelembagaan Partisipasi Anak melalui Forum Anak

Salah satu pilar terpenting KLA adalah pelibatan anak secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Di Kabupaten Pasuruan, hak partisipasi ini tidak hanya diakui, tetapi juga dilembagakan secara formal melalui Forum Anak yang terstruktur dari tingkat kabupaten hingga desa. Wadah ini dibina oleh pemerintah sebagai sarana bagi anak untuk menyalurkan aspirasi, suara, dan kebutuhannya dalam pembangunan.

Landasan hukum pembentukan wadah ini sangat kuat, dibuktikan dengan adanya:

1. SK Bupati Pasuruan Nomor 400.2.4/521/HK/424/013/2024 tentang Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Pasuruan Periode 2024-2026.
2. 24 SK Camat untuk pembentukan Forum Anak di tingkat Kecamatan.
3. 365 SK Kepala Desa/Lurah untuk pembentukan Forum Anak di tingkat Desa/Kelurahan.

Struktur yang berjenjang ini memastikan bahwa suara anak dari berbagai wilayah dapat terakomodasi dan tersalurkan secara efektif.

D. Wujud Nyata Partisipasi Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)

Forum Anak Kabupaten Pasuruan secara aktif menjalankan perannya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). Mereka tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berkontribusi aktif dalam berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan hingga advokasi.



Gambar 3.7 Partisipasi Anak dalam Musrenbang

Keterlibatan anak dalam forum pengambilan keputusan tertinggi di daerah, yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pasuruan. Dalam forum ini, perwakilan Forum Anak menyampaikan secara langsung "Suara Anak Kabupaten Pasuruan" kepada para pemangku kebijakan. Kehadiran mereka memastikan bahwa isu-isu yang relevan dengan anak, seperti pencegahan perkawinan anak, anti-kekerasan, dan fasilitas ramah anak, menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



Gambar 3.8 Anak sebagai Agen Perubahan

Melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pembentukan Forum Anak di tingkat desa, dan peringatan Hari Anak Nasional (HAN), mereka secara aktif mengedukasi teman sebayanya dan masyarakat mengenai hak-hak anak. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk melatih kepemimpinan, kemampuan

berbicara di depan umum, dan advokasi, mempersiapkan mereka menjadi generasi penerus yang kritis dan peduli.

Pelembagaan partisipasi anak yang terstruktur dari tingkat Musrenbang Kabupaten hingga ke 365 Desa/Kelurahan merupakan sebuah investasi modal sosial yang sangat penting. Keterlibatan aktif anak dalam proses perencanaan ini berkorelasi positif dengan status pembangunan manusia (IPM) "Tinggi" dan capaian Gini Ratio "Rendah" yang dibahas pada BAB II. Dengan memberikan ruang partisipasi yang bermakna, pemerintah daerah tidak hanya mendidik generasi masa depan yang kritis dan demokratis, tetapi juga mempraktikkan model pembangunan yang sejati-nya inklusif. Praktik ini memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan terutama yang menyangkut alokasi sumber daya menjadi lebih aspiratif, tepat sasaran, dan mencerminkan distribusi manfaat pembangunan yang lebih merata.

3.3. Klaster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Lingkungan keluarga merupakan pilar pertama dan utama dalam siklus tumbuh kembang anak. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menempatkan penguatan ketahanan keluarga sebagai prioritas strategis, sembari memastikan ketersediaan lembaga pengasuhan alternatif yang terstandarisasi dan infrastruktur publik yang mendukung. Upaya ini bertujuan untuk menjamin setiap anak mendapatkan pola asuh yang berkualitas, baik di dalam lingkungan keluarga inti maupun dalam pengasuhan alternatif, serta dapat berinteraksi secara aman dan positif di ruang publik.

A. Penguatan Kapasitas Keluarga melalui Lembaga Konsultasi

Untuk membekali para orang tua dan keluarga dengan pengetahuan dan keterampilan pengasuhan yang komprehensif, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), telah mengembangkan berbagai lembaga konsultasi berbasis masyarakat. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan pendampingan bagi keluarga. Sebaran lembaga tersebut antara lain:

Tabel 3.1 Lembaga Konsultasi Berbasis Masyarakat

Lembaga	Jumlah
Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)	1 unit berbasis dinas
Bina Keluarga Balita (BKB)	365 kelompok di seluruh desa/kelurahan

Lembaga	Jumlah
Bina Keluarga Remaja (BKR)	60 kelompok
Pusat Pelayanan Kesejahteraan (Pusyangatra): 1 unit .	1 unit
Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)	200 kelas



Gambar 3.9 Pelayanan Konseling Puspaga

Salah satu layanan inti dari Puspaga, yaitu sesi konseling bagi orang tua dan keluarga. Puspaga berperan sebagai pusat rujukan yang menyediakan layanan konsultasi psikologis, informasi pengasuhan, dan mediasi masalah keluarga secara gratis dan profesional. Keberadaan layanan ini sangat krusial untuk membantu keluarga mengatasi tantangan pengasuhan, mencegah kekerasan dalam rumah tangga, dan memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang.



Gambar 3.10 Penguatan Kapasitas Bina Keluarga Balita (BKB)

Kegiatan Penguatan Kapasitas bagi kader Bina Keluarga Balita (BKB). Dengan adanya 365 kelompok BKB yang tersebar di seluruh desa, program ini menjadi garda terdepan dalam edukasi pengasuhan anak usia dini. Melalui BKB,

orang tua mendapatkan pengetahuan tentang stimulasi tumbuh kembang, gizi, kesehatan, dan pola asuh positif pada periode emas anak, yang secara langsung berkontribusi pada pencegahan stunting dan optimalisasi potensi anak.



Gambar 3.11 Penguatan Kapasitas Bina Keluarga Remaja (BKR)

Program ini dirancang khusus untuk keluarga yang memiliki anak usia remaja, sebuah fase yang penuh tantangan. Dalam BKR, orang tua dibekali cara berkomunikasi yang efektif dengan remaja, memahami perubahan psikologis mereka, serta pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan perilaku berisiko. Ini adalah investasi penting untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mempersiapkan remaja menjadi individu yang tangguh dan bertanggung jawab.

Keberadaan lembaga konsultasi yang masif dan terstruktur mencakup 365 kelompok BKB, 200 kelas SOTH, dan 60 kelompok BKR bukanlah sekadar penyediaan layanan, melainkan sebuah respons kelembagaan yang strategis terhadap struktur sosio-ekonomi Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana diidentifikasi pada BAB II, dominasi sektor industri pengolahan berpotensi besar menarik angkatan kerja perempuan (ibu) ke dalam pasar kerja formal. Kondisi ini dapat mengubah dinamika dan pola asuh di dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga-lembaga seperti Puspaga, BKB, dan BKR berfungsi sebagai sistem pendukung (support system) krusial bagi para orang tua pekerja, memastikan mereka tetap memperoleh pengetahuan dan keterampilan pengasuhan yang adaptif dan berkualitas di tengah tuntutan ekonomi.

B. Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif

Ketika pengasuhan di luar keluarga inti diperlukan, negara wajib memastikan bahwa lembaga pengasuhan tersebut memenuhi standar kelayakan untuk

menjamin hak-hak anak. Kabupaten Pasuruan secara serius melakukan standarisasi terhadap berbagai lembaga pengasuhan alternatif, baik yang formal maupun berbasis keagamaan.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA): Terdapat 41 LKSA yang seluruhnya telah terakreditasi oleh Kementerian Sosial RI. Pesantren: Terdapat 254 Pesantren yang telah memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) dari Kementerian Agama. Taman Penitipan Anak (TPA): Terdapat 8 TPA yang telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dari Pusdatin Kemendikbudristek.



Gambar 3.12 Bukti Akreditasi LKSA

Dokumen Sertifikat Akreditasi LKSA ini adalah bukti formal pengakuan dari Kementerian Sosial RI atas kelayakan sebuah lembaga dalam memberikan layanan pengasuhan. Akreditasi ini menjamin bahwa LKSA telah memenuhi standar sarana-prasarana, program layanan, manajemen, dan kualitas sumber daya manusia. Dengan memastikan seluruh 41 LKSA terakreditasi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan jaminan perlindungan dan kualitas hidup bagi anak-anak yang berada dalam pengasuhan alternatif.

Standarisasi dan akreditasi terhadap 41 LKSA serta kepemilikan NSPP oleh 254 Pesantren memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar pemenuhan administratif; ini adalah pilar jaring pengaman sosial (social safety net) bagi anak-anak dalam kelompok paling rentan. Analisis kemiskinan pada BAB II menunjukkan adanya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang mengindikasikan kerentanan ekonomi pada rumah tangga miskin. Ketika sebuah keluarga mengalami guncangan ekonomi atau disfungsi sosial, risiko penelantaran anak meningkat. Dengan memastikan seluruh lembaga pengasuhan alternatif telah

terstandarisasi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan jaminan bahwa anak-Anak yang terpaksa keluar dari pengasuhan keluarga inti akan diterima dalam lingkungan yang layak, aman, dan berkualitas, sehingga mencegah mereka dari risiko eksploitasi lebih lanjut.

C. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengimplementasikan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI) sebagai kebijakan strategis untuk memastikan semua aspek tumbuh kembang anak (kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan) terpenuhi secara terpadu. Kebijakan ini diperkuat dengan landasan hukum Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2022 .



Gambar 3.13 Bimtek Pengembangan PAUD-HI

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk Pengembangan PAUD-HI. Kegiatan ini adalah bentuk dukungan nyata pemerintah daerah kepada satuan-satuan PAUD agar mampu menerapkan layanan holistik-integratif. Melalui bimtek ini, para pendidik dan pengelola PAUD dibekali pengetahuan untuk mengintegrasikan layanan pendidikan dengan layanan kesehatan dasar (seperti pemantauan gizi dan imunisasi) dan parenting, sehingga PAUD menjadi pusat layanan tumbuh kembang anak yang komprehensif di masyarakat.

D. Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik

Dukungan terhadap tumbuh kembang anak juga diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur fisik di ruang-ruang publik yang aman, aksesibel, dan ramah anak. Ini merupakan implementasi dari hak anak untuk bermain, berekreasi, dan mendapatkan perlindungan di luar lingkungan rumah.



Gambar 3.14 Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)

Fasilitas Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), sebagaimana terwujud, merupakan salah satu infrastruktur publik esensial dalam arsitektur Kabupaten Layak Anak. Keberadaannya secara langsung memenuhi hak fundamental anak untuk bermain, berekreasi, dan memanfaatkan waktu luang, yang merupakan mandat utama dari Klaster 4. Hak ini tidak hanya dipandang sebagai sarana rekreasi semata, melainkan sebagai instrumen vital untuk stimulasi tumbuh kembang holistik anak, yang mencakup aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial.

Oleh karena itu, RBRA dirancang secara cermat dengan standar yang melampaui taman bermain konvensional. Desainnya secara mutlak mempertimbangkan aspek keamanan (bebas dari material berbahaya), keselamatan (konstruksi permainan yang aman dan terawat), kenyamanan, serta aksesibilitas yang inklusif bagi semua anak. Lebih dari sekadar ruang aktivitas motorik kasar, fasilitas ini juga dilengkapi dengan beragam permainan yang bersifat edukatif, yang berfungsi untuk merangsang imajinasi, kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, dan interaksi sosial yang sehat antar-anak.

Penempatan RBRA di berbagai lokasi strategis, termasuk mengintegrasikannya ke dalam fasilitas pelayanan publik seperti Puskesmas Lekok, memiliki nilai tambah yang signifikan. Langkah ini secara efektif mentransformasi wajah fasilitas kesehatan yang seringkali diasosiasikan dengan rasa cemas atau takut bagi anak menjadi ruang tunggu yang ramah dan menyenangkan. Hal ini selaras dengan implementasi Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang diamanatkan pada Klaster 3, sekaligus memastikan bahwa anak memiliki ruang khusus yang aman untuk beraktivitas dan berekspresi secara positif di berbagai titik ruang publik.



Gambar 3.15 Angkutan Sekolah Gratis

Program Angkutan Sekolah Gratis ini adalah intervensi krusial untuk menjamin hak anak atas pendidikan, khususnya bagi mereka yang menghadapi kendala jarak dan ekonomi. Dengan menyediakan transportasi yang aman dan gratis, pemerintah daerah tidak hanya meringankan beban keluarga, tetapi juga mengurangi risiko anak putus sekolah dan memastikan mereka dapat tiba di sekolah dengan selamat. Ini adalah wujud nyata keberpihakan pada aksesibilitas pendidikan yang merata.

Program Angkutan Sekolah Gratis sejatinya merupakan intervensi infrastruktur yang berfungsi sebagai jembatan penghubung langsung antara Klaster 2 (Lingkungan) dengan Klaster 4 (Pendidikan). Program ini secara taktis menjawab salah satu tantangan pembangunan manusia paling fundamental yang diidentifikasi pada BAB II: kesenjangan antara Harapan Lama Sekolah (HLS 12,78 tahun) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS 7,46 tahun) . Kesenjangan ini menunjukkan bahwa hambatan utama bukanlah pada aspirasi, melainkan pada retensi siswa di bangku sekolah. Dengan mengeliminasi hambatan biaya transportasi dan risiko keamanan dalam perjalanan yang sering menjadi alasan ekonomi dan sosial di balik angka putus sekolah program ini berfungsi sebagai instrumen konkret untuk menutup gap HLS/RLS tersebut.



Gambar 3.16 Ruang Laktasi di Fasilitas Publik

Ketersediaan Ruang Laktasi, seperti yang dicontohkan di fasilitas milik swasta (PT. Mayora) ini, menunjukkan adanya dukungan terhadap pemenuhan hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif. Fasilitas ini, yang juga tersedia di kantor-kantor pemerintahan dan fasilitas publik lainnya, memberikan ruang yang privat, bersih, dan nyaman bagi para ibu menyusui. Ini merupakan bagian penting dari ekosistem yang mendukung kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sejak awal kehidupannya.

Dorongan ketersediaan Ruang Laktasi, yang secara khusus dicontohkan pada fasilitas milik swasta (PT. Mayora) , merupakan sebuah respons kebijakan yang sangat relevan dan strategis terhadap karakteristik struktural perekonomian daerah. Sebagaimana telah teridentifikasi secara komprehensif pada BAB II, perekonomian Kabupaten Pasuruan didominasi secara signifikan oleh Sektor Industri Pengolahan , yang menyerap porsi besar dari angkatan kerja, termasuk perempuan dalam usia produktif. Tanpa adanya fasilitas pendukung di tempat kerja, para ibu pekerja akan menghadapi dilema substansial antara melanjutkan karier dengan pemenuhan hak anak atas ASI eksklusif. Oleh karena itu, fasilitasi Ruang Laktasi di kawasan industri dan perkantoran menjadi intervensi krusial yang menjembatani antara Klaster 3 (pemenuhan kesehatan dasar anak) dan Klaster 2 (penguatan lingkungan keluarga), memastikan bahwa derap laju pembangunan ekonomi industrial tidak menimbulkan eksese negatif terhadap fondasi kesehatan dan gizi generasi penerus.

3.4. Klaster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Kesehatan dasar dan kesejahteraan anak merupakan pilar krusial yang menentukan kualitas hidup dan masa depan generasi penerus. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjalankan strategi komprehensif untuk memastikan setiap anak memiliki awal kehidupan yang sehat, terlindungi dari penyakit, dan tumbuh optimal. Strategi ini bertumpu pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, intervensi spesifik untuk percepatan penurunan stunting, serta penciptaan lingkungan yang sehat dan protektif melalui penetapan fasilitas kesehatan ramah anak dan regulasi kawasan tanpa rokok.

A. Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara konsisten berupaya meningkatkan cakupan layanan kesehatan esensial bagi ibu hamil, bayi, dan balita. Upaya ini membuahkan hasil positif yang tercermin dalam sejumlah indikator kunci, antara lain:

1. Capaian Pertolongan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mencapai 94%, menunjukkan tingginya kesadaran dan akses ibu untuk melahirkan di bawah penanganan tenaga kesehatan profesional.
2. Cakupan Ibu Hamil memiliki Buku KIA mencapai 99%, memastikan setiap kehamilan terpantau dengan baik.
3. Cakupan Balita/Anak memiliki Buku KIA mencapai 100%, menjamin setiap anak memiliki catatan riwayat kesehatan dan tumbuh kembang yang lengkap.
4. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap mencapai 96,04%, memberikan perlindungan vital bagi anak dari penyakit berbahaya yang dapat dicegah.

Meskipun demikian, Angka Kematian Bayi (AKB) di 8 per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu (AKI) di 77 per 100.000 kelahiran hidup menjadi catatan yang terus menjadi fokus intervensi agar dapat ditekan lebih lanjut .

Analisis terhadap indikator-indikator ini menunjukkan sebuah pola yang spesifik: capaian pada indikator proses (seperti Cakupan Buku KIA dan Imunisasi) telah berada di level yang sangat tinggi, sementara indikator dampak (seperti AKB dan AKI) masih menjadi tantangan. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan tidak lagi terletak pada aksesibilitas layanan dasar, melainkan pada penanganan kasus rujukan dan kegawatdaruratan. Temuan ini sangat relevan dengan analisis geografis pada BAB II , di mana topografi yang beragam antara pesisir dan pegunungan mempersulit waktu tempuh rujukan. Oleh karena itu, inovasi seperti SELAMBU PERIAS dan JELITA SIAGA dirancang bukan sebagai program tambahan, melainkan sebagai solusi kritis untuk mengatasi gap spesifik dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

B. Intervensi Gizi dan Percepatan Penurunan Stunting

Salah satu fokus utama dalam pemenuhan kesejahteraan anak adalah perbaikan status gizi, khususnya dalam percepatan penurunan prevalensi stunting. Melalui sistem elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), pemerintah daerah melakukan pemantauan secara cermat dan berkelanjutan.



Gambar 3.17 Tren Penurunan Prevalensi Stunting

Grafik Status Gizi Balita di atas menunjukkan keberhasilan intervensi gizi yang dilakukan secara intensif di Kabupaten Pasuruan. Data menunjukkan tren penurunan prevalensi stunting yang sangat signifikan, dari 22,50% pada tahun 2019 turun drastis menjadi 5,30% pada bulan Agustus 2024. Penurunan tajam ini, terutama dari 7,20% menjadi 5,30% pada tahun 2024, mengindikasikan bahwa program-program intervensi gizi spesifik dan sensitif yang dijalankan, seperti pemberian makanan tambahan dan edukasi gizi, berjalan efektif dan tepat sasaran.

Penurunan prevalensi stunting yang drastis ini menjadi capaian yang sangat signifikan, terutama bila dikontekstualisasikan dengan temuan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada BAB II. Hal ini mengindikasikan bahwa sekalipun sejumlah rumah tangga berada dalam kerentanan ekonomi, intervensi gizi spesifik yang menyasar langsung pada ibu hamil dan balita terbukti sangat efektif. Keberhasilan ini tidak dapat ditinjau secara parsial; ini adalah buah dari konvergensi program yang sistematis. Penetapan 33 Puskesmas Ramah Anak (Klaster 3) berfungsi sebagai infrastruktur utama penyaluran layanan, sementara 365 kelompok BKB (Klaster 2) berperan sebagai instrumen edukasi dan pemantauan di tingkat komunitas.

C. Penetapan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak

Untuk menjamin hak anak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan protektif, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengambil langkah tegas dengan menetapkan seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai fasilitas yang ramah anak.



Gambar 3.18 Dasar Hukum Puskesmas Ramah Anak

Dokumen Keputusan Bupati Pasuruan tersebut merupakan landasan hukum yang menetapkan bahwa seluruh 33 Puskesmas di Kabupaten Pasuruan secara resmi berstatus sebagai Puskesmas Ramah Anak (PRA). Penetapan ini bukan sekadar label, melainkan sebuah komitmen untuk menyediakan pelayanan yang memenuhi standar keramahan anak. Ini mencakup penyediaan ruang tunggu dan bermain yang aman dan sesuai usia, adanya pojok laktasi, penerapan larangan merokok secara ketat di seluruh area puskesmas, serta pelayanan dari tenaga kesehatan yang komunikatif dan memahami psikologi anak.\

Penetapan 33 Puskesmas Ramah Anak (PRA) melalui Keputusan Bupati merepresentasikan sebuah transformasi fundamental dalam paradigma pelayanan kesehatan, yakni bergeser dari facility-centric (berpusat pada fasilitas) menjadi child-centric (berpusat pada anak). Ini lebih dari sekadar penyediaan ruang laktasi atau arena bermain; ini adalah komitmen kelembagaan untuk menjamin bahwa hak anak atas layanan kesehatan—termasuk hak untuk tidak terpapar asap rokok dan hak untuk didengar—bersifat non-diskriminatif dan dipenuhi dengan standar kualitas yang setara di 24 kecamatan, baik di pusat industri maupun di wilayah pegunungan.

D. Inovasi Unggulan untuk Peningkatan Kesehatan

Selain program reguler, Kabupaten Pasuruan juga mengembangkan berbagai inovasi untuk mengakselerasi pencapaian target kesehatan dan kesejahteraan.



Gambar 3.19 Inovasi “SELAMBU PERIAS”

Inovasi SELAMBU PERIAS (Selamatkan Ibu Menuju Persalinan Aman dan Sehat) adalah program terobosan yang dirancang untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Program ini mengintegrasikan upaya pendampingan intensif oleh bidan dan kader, mulai dari kunjungan rumah, pemantauan ibu hamil berisiko, hingga pendampingan rujukan. Inovasi ini memastikan setiap ibu hamil mendapatkan pengawalan kesehatan yang komprehensif sejak awal kehamilan hingga pasca-persalinan.



Gambar 3.20 Inovasi "BABY SERTIF"

BABY SERTIF (Baby Pulang Bawa Akta, KK & KIA) adalah inovasi layanan terintegrasi yang brilian antara sektor kesehatan dan administrasi kependudukan. Dengan program ini, setiap bayi yang lahir di fasilitas kesehatan mitra dapat langsung pulang dengan membawa tiga dokumen kependudukan esensial: Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) yang sudah diperbarui, dan Kartu Identitas Anak (KIA). Inovasi ini secara langsung memenuhi hak anak atas identitas (Klaster 1) sekaligus memberikan kemudahan luar biasa bagi orang tua.

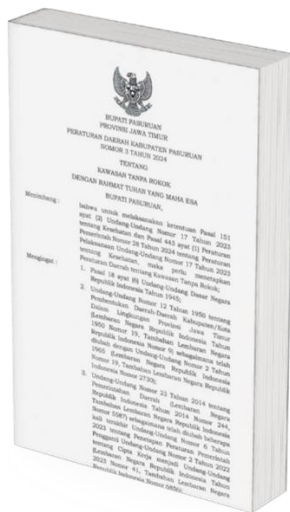


Gambar 3.21 Inovasi Promosi Kesehatan Lainnya

Rangkaian inovasi ini menunjukkan pendekatan yang kreatif dan berbasis komunitas dalam promosi kesehatan. POSTING (Posyandu Tematik Stunting) memfokuskan layanan posyandu pada pencegahan stunting. GERMISU (Gerakan Minum Susu) dan GEMARIKAN (Gerakan Makan Ikan) adalah kampanye untuk meningkatkan asupan protein hewani pada anak. Sementara JELITA SIAGA merupakan sistem penanganan gawat darurat maternal yang terintegrasi. Semua inovasi ini bekerja secara sinergis untuk meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan anak di Kabupaten Pasuruan.

Inovasi BABY SERTIF merupakan manifestasi praktik birokrasi yang sangat baik (good governance) dan berfungsi sebagai contoh ideal dari integrasi lintas-klaster. Inovasi ini secara simultan memenuhi Klaster 3 (Kesehatan) dengan mendorong persalinan di fasilitas kesehatan, sekaligus memenuhi Klaster 1 (Hak Sipil) dengan menjamin penerbitan Akta Kelahiran dan KIA secara instan. Dengan mengeliminasi hambatan birokrasi, sosial, dan ekonomi bagi orang tua untuk mengurus akta, program ini secara langsung berkontribusi pada percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang tercatat pada sub-bab 3.2.A.

- E. Mewujudkan Lingkungan Sehat Melalui Regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
Perlindungan anak dari dampak buruk asap rokok merupakan salah satu komponen penting dalam pemenuhan hak atas kesehatan dan lingkungan yang aman.



Gambar 3.22 Dasar Hukum Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah bukti komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk melindungi warganya, terutama anak-anak, dari paparan asap rokok. Perda ini secara tegas menetapkan area-area vital seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan fasilitas umum lainnya sebagai zona bebas asap rokok. Implementasi regulasi ini secara langsung menciptakan ruang publik yang lebih sehat dan aman bagi anak-anak untuk beraktivitas, belajar, dan bermain.

3.5. Klaster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Klaster 4 merupakan pilar esensial yang berfokus pada pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif, dan berkarakter. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengimplementasikan strategi multifaset dalam klaster ini, yang mencakup tiga area utama: penjaminan akses pendidikan universal melalui program Wajib Belajar 12 Tahun dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS); penciptaan lingkungan belajar yang aman dan nyaman melalui pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan kebijakan anti-kekerasan; serta penyediaan ruang ekspresi dan rekreasi yang positif melalui fasilitas kreativitas, budaya, dan rumah ibadah yang ramah anak.

- A. Penjaminan Akses Pendidikan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen penuh untuk menuntaskan Wajib Belajar 12 Tahun dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan. Untuk menangani isu Anak Tidak Sekolah (ATS) dan angka putus

sekolah, berbagai program terobosan dan dukungan aksesibilitas telah diluncurkan.



Gambar 3.23 Inovasi "GETARVOS" untuk Pendidikan Kesetaraan

Inovasi GETARVOS (Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Vokasi), yang diluncurkan sejak tahun 2023, merupakan solusi strategis untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualifikasi sumber daya manusia. Program ini diselenggarakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan tidak hanya memberikan ijazah kesetaraan (Paket A, B, C), tetapi juga membekali pesertanya dengan keterampilan vokasional yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Didukung melalui Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, GETARVOS menjadi jaring pengaman sosial pendidikan yang memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak yang putus sekolah untuk meraih masa depan yang lebih baik.

GETARVOS memiliki signifikansi strategis yang sangat tinggi apabila ditelaah dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana diidentifikasi secara mendalam pada BAB II, tantangan struktural utama pembangunan manusia di daerah ini adalah kesenjangan (gap) yang lebar antara Harapan Lama Sekolah (HLS) di angka 12,78 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di angka 7,46 tahun. Program GETARVOS berfungsi sebagai intervensi hilir yang fundamental untuk menutup kesenjangan tersebut. Program ini menyediakan "kesempatan kedua" bagi penduduk usia produktif yang telah terlanjur putus sekolah, sehingga secara langsung berupaya meningkatkan kualifikasi angkatan kerja dan berkontribusi pada peningkatan agregat RLS dalam jangka panjang.

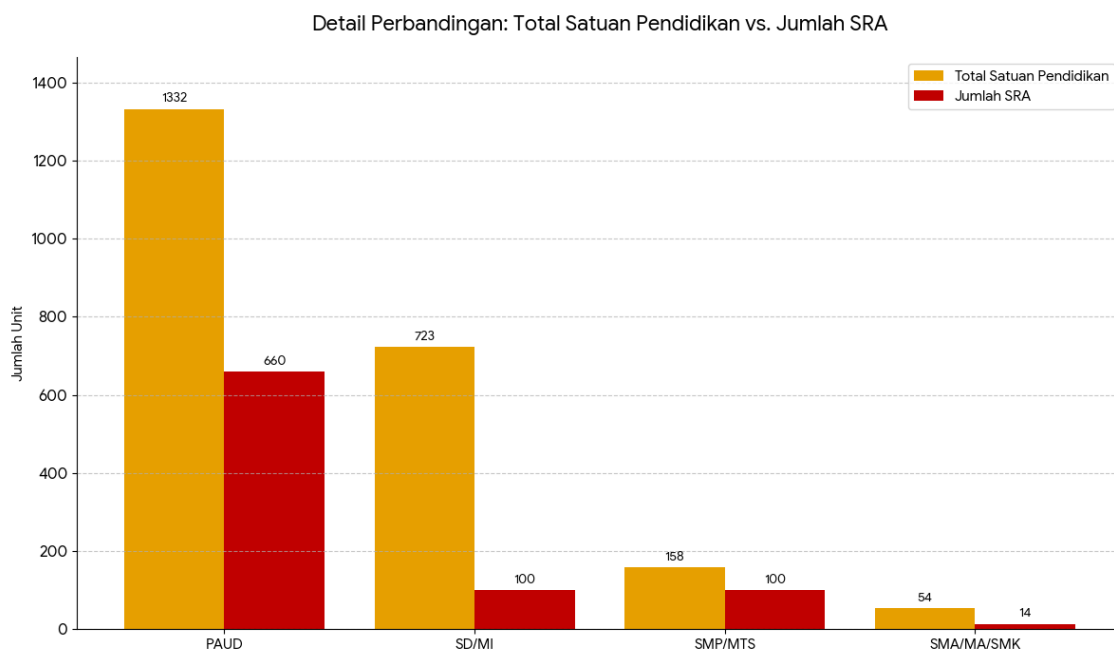


Gambar 3.24 Program Pendukung Aksesibilitas Pendidikan

Gambar ini menunjukkan salah satu program pendukung yang krusial, yaitu Angkutan Sekolah Gratis. Program ini, bersama dengan Sekolah Gratis Terbuka, dirancang untuk menghilangkan hambatan ekonomi dan geografis yang seringkali menjadi penyebab utama anak putus sekolah. Dengan menyediakan transportasi yang aman dan membebaskan biaya sekolah, pemerintah daerah memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari latar belakang ekonominya, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas.

B. Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Aman dan Nyaman

Kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari aspek akademis, tetapi juga dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan anak selama berada di lingkungan sekolah. Untuk itu, dikembangkan program Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan kebijakan perlindungan yang tegas.



Gambar 3.25 Sebaran Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)

Data ini memetakan progres implementasi SRA di berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Dari total 1.332 satuan PAUD, sebanyak 660 (49%) telah menjadi SRA. Untuk tingkat SD/MI, 100 dari 723 satuan (23%) telah berstatus SRA. Capaian tertinggi berada di tingkat SMP/MTs, di mana 100 dari 158 satuan (63%) sudah menjadi SRA. Sementara itu, untuk tingkat SMA/SMK/MA, 14 dari 54 satuan (10%) telah menjadi SRA. Data ini menunjukkan komitmen yang kuat, sekaligus menjadi dasar untuk melakukan akselerasi, khususnya di jenjang SD, SMA, dan SLB agar seluruh satuan pendidikan menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi anak.

Analisis data sebaran SRA menunjukkan pola yang memerlukan perhatian khusus. Capaian tertinggi berada di jenjang SMP/MTs (63%), yang mengindikasikan adanya fokus intervensi yang berhasil pada fase remaja awal. Namun, capaian yang relatif masih rendah di jenjang SD/MI (23%) menjadi sebuah tantangan kritis, mengingat besarnya jumlah satuan pendidikan (723 unit) dan krusialnya jenjang ini sebagai periode pembentukan karakter dasar. Akselerasi implementasi SRA di jenjang SD/MI menjadi prioritas mendesak, sebab lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan di usia formatif ini merupakan prasyarat mutlak untuk dapat memaksimalkan potensi akademis dan non-akademis anak di jenjang selanjutnya.



Gambar 3.26 Kebijakan Anti-Kekerasan di Sekolah

Dokumen ini merupakan bukti implementasi kebijakan "Zero Tolerance terhadap Kekerasan pada Anak" di lingkungan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan dari tingkat SD hingga SMA telah memiliki SK Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). TPPK ini bertugas sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pelaporan segala bentuk kekerasan,

perundungan, dan intoleransi di sekolah, sehingga menciptakan iklim belajar yang positif dan protektif bagi setiap siswa.

C. Fasilitas Pemanfaatan Waktu Luang, Budaya, dan Kreativitas

Pemenuhan hak anak untuk bermain, berekreasi, dan mengembangkan potensi non-akademiknya menjadi perhatian serius. Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara aktif memfasilitasi dan mengakui keberadaan pusat-pusat kegiatan kreatif dan budaya di masyarakat.



Gambar 3.27 Pusat Kreativitas Anak (PKA)

Kabupaten Pasuruan tercatat memiliki 213 Pusat Kreativitas Anak (PKA) yang tersebar di berbagai wilayah. PKA ini merupakan wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan minat dan bakat mereka di bidang seni dan budaya, seperti sanggar tari, musik, atau lukis. Sebagai bentuk pengakuan dan standardisasi, setiap PKA yang terdata diberikan Nomer Induk Kesenian yang dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menunjukkan adanya dukungan formal dari pemerintah terhadap ekosistem kreatif anak.



Gambar 3.28 Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)

Gambar ini menampilkan beberapa contoh dari 17 Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang ada di Kabupaten Pasuruan. Konsep RIRA melampaui fungsi utama sebagai tempat peribadatan; ia juga dirancang sebagai pusat kegiatan anak yang aman, inklusif, dan edukatif. Kehadiran RIRA seperti Masjid Manarul Islam, Masjid Moeklas Sidik, Klenteng Cheng Ho Pandaan, dan Gereja Bangil menunjukkan komitmen untuk menyediakan ruang positif bagi pembentukan karakter dan spiritualitas anak, sekaligus

mempromosikan nilai-nilai toleransi dan keberagaman sejak dini. Investasi dalam Pusat Kreativitas Anak (PKA) dan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) tidak dapat dipandang sekadar sebagai pemenuhan hak rekreasi, melainkan sebagai infrastruktur sosial yang vital dalam konteks Kabupaten Pasuruan. Sebagai daerah dengan dominasi industri pengolahan yang tinggi dan laju urbanisasi yang pesat, risiko terjadinya dislokasi sosial, anonimitas, dan paparan terhadap perilaku negatif cenderung meningkat. Kehadiran 213 PKA dan 17 RIRA yang terstandarisasi berfungsi sebagai benteng sosial. Fasilitas-fasilitas ini menyediakan ruang positif bagi anak untuk membangun identitas budaya, kohesi sosial, dan karakter yang kuat, yang pada gilirannya berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial yang tecermin dari capaian Gini Ratio "Rendah" sebagaimana dibahas pada BAB II.

3.6. Klaster 5: Perlindungan Khusus

Klaster Perlindungan Khusus adalah jaring pengaman bagi anak-anak yang berada dalam situasi paling rentan dan memerlukan intervensi negara secara langsung. Fokus utama Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam klaster ini adalah menyediakan sistem layanan yang responsif, komprehensif, dan berpusat pada kepentingan terbaik anak. Ini diwujudkan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang berfungsi sebagai pusat layanan terpadu untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, dan kondisi darurat lainnya.

A. Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak

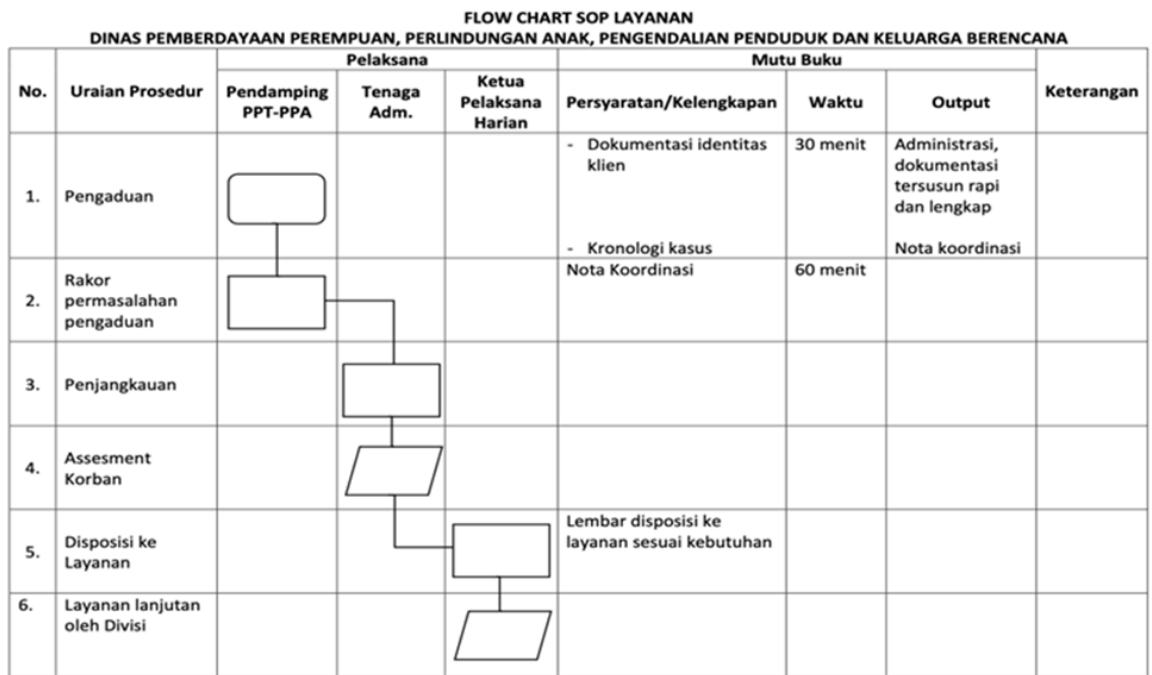
Salah satu indikator penting dalam perlindungan khusus adalah kapasitas daerah dalam merespons dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. Data pelaporan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yang menandakan meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melapor, serta tumbuhnya kepercayaan terhadap sistem layanan yang ada.



Gambar 3.29 Tren Kasus Kekerasan pada Anak

Penjelasan Lampiran: Grafik ini menyajikan data jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani dari tahun 2019 hingga 2024. Terlihat adanya peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan dan ditangani secara signifikan. Data menunjukkan lonjakan dari 57 kasus pada tahun 2022, yang kemudian meningkat lagi menjadi 81 kasus pada tahun 2023, dan mencapai 115 kasus pada tahun 2024 (data sementara) . Peningkatan ini tidak semata-mata dibaca sebagai kenaikan angka kekerasan, melainkan sebagai indikator positif keberhasilan program sosialisasi dan edukasi, di mana masyarakat kini lebih sadar akan hak-hak anak dan lebih percaya untuk melaporkan kasus ke lembaga yang berwenang.

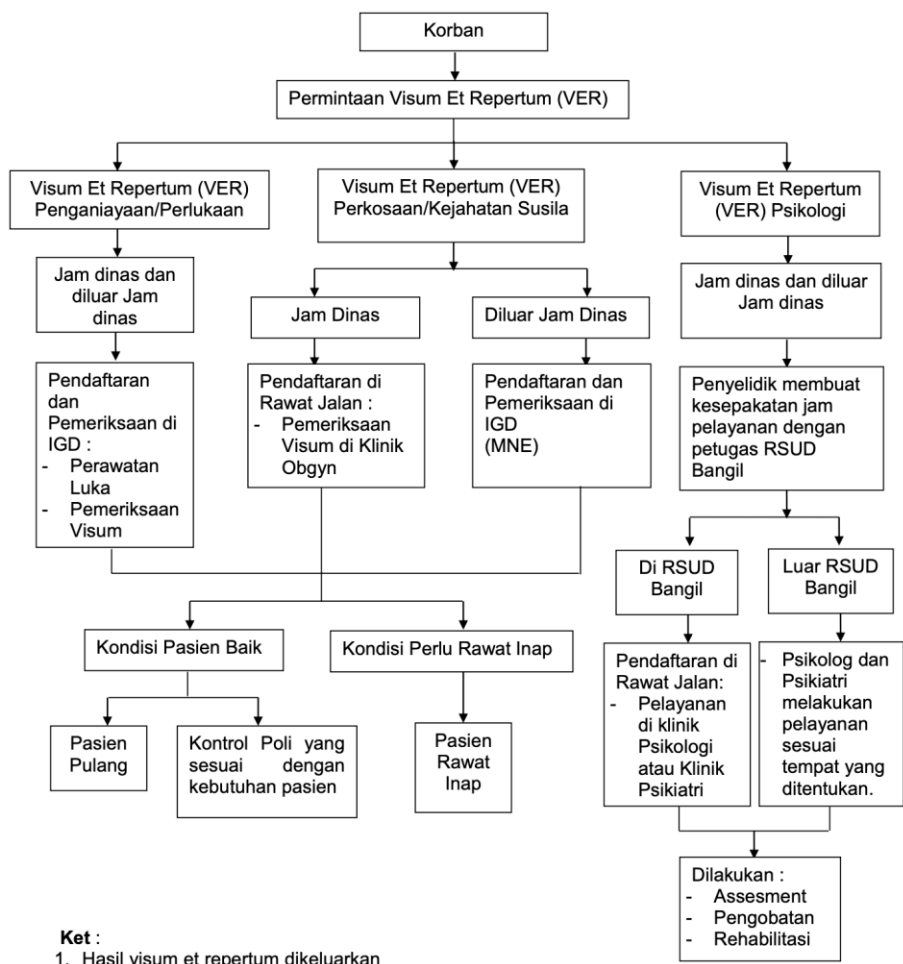
Interpretasi atas tren peningkatan kasus yang tertangani ini menuntut sebuah analisis multidimensional. Fenomena ini tidak dapat ditinjau secara terisolasi; ia berkorelasi positif dengan keberhasilan intervensi di Klaster 1. Pelembagaan partisipasi anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) serta masifikasi Informasi Layak Anak (ILA) secara kolektif telah berkontribusi pada peningkatan literasi hak dan keberanian masyarakat sipil (reporting behavior). Dalam konteks sosio-ekonomi Kabupaten Pasuruan yang bercorak industrial dengan segala potensi kerentanan sosial yang menyertainya (seperti TPT yang masih di atas rata-rata provinsi), data ini justru memvalidasi bahwa sistem perlindungan di Klaster 5 telah berfungsi secara responsif terhadap peningkatan permintaan layanan.



Gambar 3.30 Mekanisme Penanganan Kasus

Bagan alur ini menunjukkan bahwa penanganan kasus di Kabupaten Pasuruan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Setiap laporan akan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari Pengaduan, Rakor Permasalahan, Penjangkauan, Asesmen Korban, hingga Disposisi ke Layanan Lanjutan. SOP ini menjamin bahwa setiap korban mendapatkan penanganan yang profesional, terstruktur, dan tuntas sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.

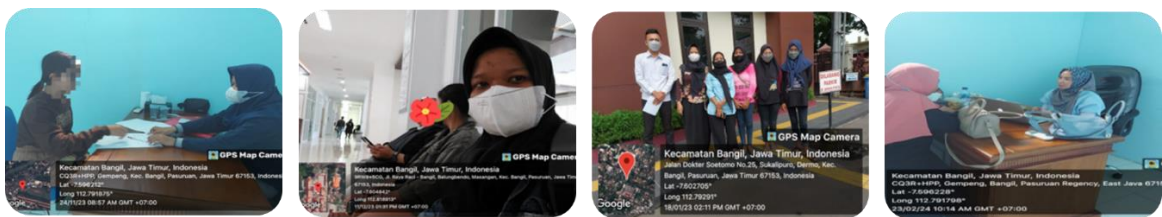
Selain itu Kabupaten Pasuruan juga telah memiliki mekanisme penanganan AMPK spesifik anak berhadapan dengan hukum dari sisi Kesehatan yang diampu oleh RSUD Bangil. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:



Gambar 3.31 Mekanisme Penanganan AMPK di RSUD Bangil

B. Layanan Komprehensif UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

UPTD PPA menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan perlindungan khusus. Sesuai dengan catatan dalam presentasi, Kabupaten Pasuruan telah memiliki layanan pengaduan yang bertujuan untuk menjangkau korban agar segera mendapat perlindungan . Setiap laporan yang masuk ditangani melalui alur yang komprehensif untuk memastikan pemulihan korban secara menyeluruh.



Gambar 3.32 Layanan Asesmen dan Pendampingan Korban

Rangkaian gambar ini menunjukkan inti dari pelayanan yang berpusat pada korban. Proses dimulai dengan Asesmen dan Konseling untuk memahami kondisi psikologis dan kebutuhan korban. Selanjutnya, UPTD PPA memberikan layanan vital seperti Pendampingan Visum di Rumah Sakit untuk mengumpulkan bukti medis, Pendampingan Sidang untuk memastikan korban terlindungi dan terwakili

secara hukum selama proses peradilan, serta Fasilitas Pemeriksaan Psikologi untuk penanganan trauma yang lebih mendalam.



Gambar 3.33 Layanan Penjangkauan dan Perlindungan

Layanan UPTD PPA bersifat proaktif dan tidak hanya pasif menunggu laporan. Tim melakukan Penjangkauan langsung ke rumah korban untuk memberikan dukungan di lingkungan yang familiar. UPTD PPA juga menyediakan Fasilitas Kausa Hukum untuk mengawal proses hukum korban. Bagi anak yang membutuhkan perlindungan darurat, Kabupaten Pasuruan telah memiliki Rumah Aman yang dikelola bekerja sama dengan Kepolisian, yang berfungsi sebagai tempat Rujukan dan Pemulangan yang aman.



3.34 Layanan Koordinasi dan Fasilitas Sistemik

Keberhasilan penanganan kasus tidak terlepas dari dukungan sistemik. Gambar ini menunjukkan adanya Koordinasi dengan Satgas PPA yang melibatkan berbagai lembaga. Selain itu, terdapat layanan Fasilitas Mediasi untuk kasus-kasus tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Seluruh operasional ini didukung oleh infrastruktur yang memadai, seperti Mobil dan Motor Pelayanan, yang memastikan tim dapat bergerak cepat dan responsif menjangkau korban di berbagai wilayah.

Ragam layanan komprehensif yang disediakan UPTD PPA mulai dari asesmen psikologis, pendampingan visum, fasilitas hukum, penjangkauan ke rumah korban, hingga penyediaan rumah aman merepresentasikan manifestasi operasional dari pilar kelembagaan yang dibahas pada Sub-bab 3.1. Keberadaan layanan yang lengkap dan sistematis ini adalah bukti bahwa komitmen regulasi dan struktur gugus tugas telah berhasil diterjemahkan menjadi intervensi nyata di tingkat lapangan. Namun, komprehensivitas layanan ini juga memiliki implikasi manajerial yang signifikan. Semakin tinggi kepercayaan publik (seperti terlihat pada Gambar 3.29), semakin besar pula beban layanan. Hal ini secara langsung memberikan justifikasi empiris yang kuat bagi

rekomendasi strategis di BAB IV mengenai perlunya penguatan alokasi anggaran, untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas layanan perlindungan khusus ini di masa mendatang.

3.7. Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak

Semangat Kabupaten Layak Anak tidak hanya berhenti di tingkat kebijakan kabupaten, tetapi juga diturunkan dan dihidupkan hingga ke tingkat administrasi terkecil. Kecamatan dan Desa/Kelurahan didorong untuk menjadi agen perubahan yang secara aktif menciptakan lingkungan ramah anak melalui inisiatif-inisiatif lokal yang kreatif dan partisipatif.



Gambar 3.35 Aktivitas Forum Anak di Tingkat Kecamatan

Terlihat berbagai aktivitas yang diinisiasi oleh Forum Anak di Kecamatan Tuter, Bangil, dan Purwosari. Kegiatan ini menunjukkan bahwa Forum Anak di tingkat wilayah tidak hanya sekadar struktur, tetapi merupakan organisasi yang aktif dalam menyelenggarakan kegiatan positif, mengadvokasikan hak-hak teman sebayanya, dan menjadi mitra pemerintah kecamatan dalam mewujudkan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak di komunitas mereka.



Gambar 3.36 Inisiatif Lokal dan Kreativitas Anak

Potret keragaman inisiatif lokal yang mendukung pemanfaatan waktu luang anak secara positif. Mulai dari Sekolah Sepak Bola di Kecamatan Winongan, Sanggar Seni Karawitan di Kecamatan Gempol, hingga kegiatan Paskibra di SMAN 1 Bangil, semua ini adalah komponen vital dari sebuah Kecamatan dan Desa Layak Anak. Fasilitas dan

komunitas seperti ini memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan bakat, membangun karakter, belajar bekerja sama, dan menjauhkan diri dari kegiatan negatif, yang secara langsung berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang kondusif.

Sub-bab ini memvalidasi efektivitas dari strategi desentralisasi kelembagaan yang dibahas pada Sub-bab 3.1 . Inisiatif-inisiatif lokal seperti aktivitas Forum Anak di tingkat Kecamatan dan sanggar seni di tingkat desa adalah bukti bahwa semangat KLA tidak terpusat di level kabupaten (centralized policy), melainkan telah berhasil diturunkan (cascaded) dan diinternalisasi di tingkat akar rumput. Dalam konteks geografis Kabupaten Pasuruan yang sangat heterogen (sebagaimana dianalisis pada BAB II) , model implementasi yang bertumpu pada inisiatif lokal (community-based initiatives) seperti ini menjadi kunci keberhasilan untuk memastikan program KLA relevan secara kontekstual dan mampu menjangkau seluruh anak

3.8. Penghargaan dan Inovasi

Upaya dan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan pemenuhan hak anak telah melahirkan berbagai inovasi layanan publik dan mendapatkan pengakuan di tingkat regional maupun nasional. Capaian ini bukan hanya menjadi bukti keberhasilan program, tetapi juga menjadi motor penggerak untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi anak dan keluarga.

A. Penghargaan Tingkat Nasional dan Provinsi



Gambar 3.37 Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Peringkat Nindya

Momen penerimaan Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Peringkat Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI . Peringkat Nindya merupakan salah satu kategori tertinggi yang menandakan bahwa upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di Kabupaten Pasuruan telah dilakukan secara sistematis, terencana, dan terintegrasi di sebagian besar klaster dan wilayah. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintah daerah dan motivasi untuk terus berbenah menuju peringkat Utama.



Gambar 3.38 Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri

Penghargaan ini menunjukkan komitmen Kabupaten Pasuruan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang peduli dan berbudaya lingkungan. Empat sekolah telah berhasil meraih predikat bergengsi, yaitu SMPN 1 Beji dan SMPN 1 Rejoso yang meraih predikat Sekolah Adiwiyata Mandiri, serta SMPN 2 Purwosari dan SDN 1 Karangsentul, Gondangwetan yang meraih predikat Sekolah Adiwiyata Nasional . Capaian ini membuktikan keberhasilan dalam mengintegrasikan isu-isu lingkungan ke dalam kurikulum dan budaya sekolah, yang sejalan dengan Klaster 4 KLA.



Gambar 3.39 Penghargaan Capaian Program KB Terbaik

Kabupaten Pasuruan juga meraih prestasi sebagai Terbaik ke-2 untuk Capaian Program Keluarga Berencana (KB) di Tingkat Provinsi Jawa Timur . Penghargaan ini sangat relevan dengan KLA, karena program KB yang berhasil berkontribusi langsung pada penguatan ketahanan keluarga, kesehatan ibu, dan kualitas pengasuhan anak. Ini merupakan bagian integral dari upaya pemenuhan hak anak yang dimulai dari perencanaan keluarga yang baik, sejalan dengan Klaster 2 dan 3.

Rangkaian penghargaan yang diterima Kabupaten Pasuruan mencakup KLA Peringkat Nindya, Adiwiyata Nasional dan Mandiri, serta Capaian KB Terbaik memvalidasi keberhasilan dari pendekatan pembangunan yang holistik dan terintegrasi. Pencapaian ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari satu klaster

tunggal, melainkan dari sinergi lintas sektor. Penghargaan KLA Nindya memvalidasi pilar kelembagaan dan perlindungan; Penghargaan Adiwiyata memvalidasi komitmen pada Klaster 4; dan Penghargaan KB memvalidasi penguatan di Klaster 2 dan 3. Secara kolektif, apresiasi eksternal ini menegaskan bahwa komitmen strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan (BAB I & II) telah berhasil ditranslasikan menjadi kinerja yang terukur, berdampak, dan diakui di tingkat regional maupun nasional, sekaligus menutup siklus analisis capaian pada BAB III ini.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Implementasi dan pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pasuruan, sebagaimana dielaborasi secara komprehensif dalam profil ini, merepresentasikan sebuah manifestasi dari paradigma pembangunan yang bergeser fundamental dari orientasi infrastruktur fisik semata menuju investasi strategis pada pembangunan modal manusia (human capital development). Capaian yang telah diraih, yang tervalidasi melalui penganugerahan Peringkat Nindya, bukanlah merupakan serangkaian program sporadis, melainkan buah dari sebuah arsitektur kebijakan yang terencana, terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan.

Analisis kontekstual pada BAB II telah mengidentifikasi fondasi makro Kabupaten Pasuruan: sebuah wilayah dengan struktur demografi usia anak yang signifikan, topografi yang heterogen, serta struktur ekonomi bercorak industrial yang menghadirkan dualitas tantangan dan potensi. Dokumen ini membuktikan bahwa strategi KLA Kabupaten Pasuruan dirancang secara sadar sebagai sebuah respons yang terkalibrasi dan adaptif terhadap realitas kontekstual tersebut. Pilar Kelembagaan (Sub-bab 3.1) terbukti menjadi motor penggerak utama, di mana komitmen yuridis melalui serangkaian Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati telah berhasil ditranslasikan menjadi struktur operasional yang fungsional, mencakup Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA 2022-2026 sebagai peta jalan strategis, serta desentralisasi Gugus Tugas hingga ke 365 Desa/Kelurahan sebagai ujung tombak implementasi di wilayah paling menantang.

Di seluruh lima klaster pemenuhan hak, dokumen ini mengidentifikasi adanya bukti empiris atas keberhasilan intervensi yang berbasis data. Pada Klaster 1, akselerasi pemenuhan hak sipil tidak hanya tercermin dari peningkatan kuantitatif registrasi akta kelahiran, tetapi juga dari keberhasilan inovasi e-PAKLADI dalam memangkas hambatan geografis. Pada Klaster 3, capaian paling signifikan terlihat pada penurunan drastis prevalensi stunting hingga 5,30%, sebuah hasil yang hanya mungkin dicapai melalui konvergensi program, mulai dari penetapan 33 Puskesmas Ramah Anak hingga penguatan BKB di Klaster 2. Pada Klaster 4, intervensi strategis seperti GETARVOS menunjukkan pemahaman mendalam untuk mengatasi kesenjangan struktural antara Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah yang teridentifikasi pada BAB II.

Lebih dari itu, strategi implementasi di Kabupaten Pasuruan terbukti melampaui sekat-sekat birokrasi konvensional. Keberhasilan ini ditopang oleh dua pilar sinergi: pertama, sinergi Pentahelix yang secara efektif memobilisasi sumber daya non-

pemerintah, terutama dari sektor industri (CSR) yang dominan , akademisi , dan lembaga masyarakat. Kedua, inovasi layanan publik yang brilian seperti BABY SERTIF dan SELAMBU PERIAS yang mendemonstrasikan praktik terbaik integrasi lintas-klaster, yakni antara layanan kesehatan (Klaster 3) dan layanan administrasi kependudukan (Klaster 1).

Pada akhirnya, capaian paling fundamental dari perjalanan KLA Kabupaten Pasuruan bukanlah semata-mata pada aspek teknis-administratif, melainkan pada keberhasilan pelebagaan partisipasi anak. Keterlibatan formal Forum Anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menandakan pergeseran paradigma yang esensial: dari memosisikan anak sebagai objek pasif pembangunan, menjadi subjek aktif yang suaranya didengar, dihargai, dan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Peringkat Nindya yang diraih adalah validasi atas sebuah proses yang holistik, terintegrasi, berbasis data, dan partisipatif. Profil ini menjadi dokumen pertanggungjawaban atas proses tersebut, sekaligus instrumen refleksi kritis untuk kalibrasi kebijakan di masa depan, demi memastikan tidak ada satu anak pun yang tertinggal dalam mewujudkan generasi emas Kabupaten Pasuruan.

4.2. Tantangan dan Arah Kebijakan Strategis

Pencapaian Peringkat Nindya dan serangkaian kemajuan substansial yang diuraikan dalam dokumen ini menandakan bahwa fondasi implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pasuruan telah terbangun dengan kokoh. Namun, dalam kerangka continuous improvement (perbaikan berkelanjutan), pencapaian ini bukanlah sebuah titik akhir, melainkan sebuah landasan untuk kalibrasi strategi yang lebih tajam dan intervensi yang lebih mendalam guna mencapai Peringkat Utama.

Analisis terhadap data capaian di lima klaster mengidentifikasi beberapa tantangan strategis yang memerlukan atensi kebijakan khusus. Tantangan-tantangan ini tidak lagi bersifat fundamental (apakah program ada?), melainkan bersifat kualitatif dan berkelanjutan (bagaimana memastikan kualitas, pemerataan, dan kapasitas sistem?).

Tantangan strategis pertama adalah pemerataan kualitas layanan di seluruh lini infrastruktur sosial. Dokumen ini telah memvalidasi keberhasilan kuantitatif dalam pembentukan lembaga, seperti desentralisasi 365 Gugus Tugas Desa , identifikasi 213 PKA , dan progres SRA . Namun, data capaian SRA juga menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antar jenjang pendidikan, di mana capaian di level SD/MI (23%) masih

jauh tertinggal dibandingkan SMP/MTs (63%) . Hal ini mengindikasikan bahwa akselerasi implementasi SRA di jenjang pendidikan dasar menjadi krusial. Demikian pula, desentralisasi gugus tugas hingga ke tingkat desa menuntut adanya jaminan standardisasi kapabilitas pelaksana di akar rumput.

Tantangan strategis kedua adalah peningkatan kapasitas sistem untuk merespons keberhasilan program. Dokumen ini menyoroti sebuah "paradoks keberhasilan" (paradox of success) pada Klaster 5. Peningkatan drastis jumlah kasus kekerasan yang tertangani dari 57 kasus pada 2022 menjadi 115 kasus pada 2024 adalah indikator positif atas meningkatnya kepercayaan publik (public trust) terhadap sistem layanan UPTD PPA. Akan tetapi, tren positif ini secara simultan berimplikasi langsung pada peningkatan beban layanan (caseload) yang signifikan. Sistem layanan yang komprehensif (mencakup asesmen, pendampingan hukum, visum, hingga rumah aman) menuntut ketersediaan sumber daya khususnya anggaran dan SDM psikolog/konselor yang harus tumbuh secara proporsional dengan permintaan layanan.

Tantangan strategis ketiga adalah penguatan integrasi data untuk perencanaan berbasis bukti yang presisi. Kompleksitas intervensi KLA, yang melibatkan sinergi lintas-sektor dari kesehatan (stunting) , pendidikan (SRA) , hingga perlindungan khusus (kasus kekerasan), menuntut adanya sebuah sistem data terpilah anak yang tunggal, terintegrasi, dan real-time. Fragmentasi data antar Perangkat Daerah berisiko menghambat ketajaman analisis dan ketepatan alokasi sumber daya.

Berdasarkan analisis atas tiga tantangan strategis tersebut, maka dirumuskan beberapa Arah Kebijakan Strategis yang direkomendasikan untuk Rencana Aksi Daerah (RAD) periode selanjutnya:

1. Akselerasi Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Pendidikan (Klaster 4): Merumuskan strategi percepatan dan pemerataan implementasi Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) secara masif, khususnya dengan memberikan afirmasi kebijakan dan alokasi sumber daya pada jenjang SD/MI dan SMA/SMK/MA/SLB, guna menutup kesenjangan disparitas capaian antar jenjang pendidikan.
2. Penguatan Kapasitas Layanan Perlindungan Khusus (Klaster 5): Melakukan penyesuaian (adjustment) alokasi anggaran yang lebih optimal untuk UPTD PPA. Kebijakan ini bersifat mendesak untuk memastikan kapasitas sistem (SDM dan operasional) mampu mengimbangi peningkatan beban layanan yang merupakan implikasi logis dari tumbuhnya kesadaran lapor masyarakat .
3. Standardisasi dan Diseminasi Layanan Waktu Luang (Klaster 4): Mendorong standardisasi Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) dan Pusat Kreativitas Anak

(PKA) secara lebih sistematis di seluruh kecamatan. Kebijakan ini bertujuan untuk mentransformasi kuantitas (jumlah) menjadi kualitas (standar layanan), guna menjamin ketersediaan ruang positif yang teruji bagi anak dalam memanfaatkan waktu luang.

4. Penguatan Kapasitas Pelaksana di Tingkat Akar Rumput (Kelembagaan): Mengintensifkan program peningkatan kapasitas SDM pelaksana KLA secara berkelanjutan dan berjenjang. Prioritas program ditujukan bagi aparat di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan (Gugus Tugas Desa) melalui pelatihan teknis, bimbingan, dan studi tiru, untuk menjamin kualitas implementasi program yang terdesentralisasi .
5. Optimalisasi Manajemen Data Lintas Sektor (Kelembagaan): Memperkuat koordinasi lintas Perangkat Daerah dengan fokus spesifik pada pengembangan mekanisme integrasi data. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan data terpilah anak yang selalu terbaru, terintegrasi, dan aksesibel, sehingga perencanaan program KLA di masa depan dapat dirumuskan secara lebih presisi, akurat, dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan
dan Pengembangan Manusia

HERU MAULANA, S.Sos.